

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
- 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

ketika si kecil

belum mendengar
belum melihat
belum mengerti
belum memahami
sombongnya dunia,.....
angkuhnya dunia,.....
dunia yang terkadang tidak bersahabat
si kecil memang belum dapat mengerti,
yang ia rasakan hanya tangan lembut
yang menyapa ketika ia membuka matanya

ketika si kecil mulai dapat melangkahkan kaki kecilnya
ia melangkah pelan tertatih sampai akhirnya....
ia berlari untuk mencari, mengerti dan memahami
apa itu dunia
kemanapun langkah si kecil
tangan-tangan lembut
tak bosan trus menyapanya

tangan lembut hanya berharap
semoga si kecil
dapat menjadi
tangan-tangan lembut bagi yang lain.



kado kecil buat mama. bapak dan adik-adikku tercinta

**PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM PDM-DKE
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA DAN
PENDAPATAN RUMAH TANGGA
(Kasus Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang,
Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah)**

Oleh :

MARTANTI ATMANINGRUM

A08496011



**JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2001**

**PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM PDM-DKE
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA DAN
PENDAPATAN RUMAH TANGGA
(Kasus Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang,
Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah)**

Oleh :

**MARTANTI ATMANINGRUM
A08496011**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pertanian
Pada Fakultas Pertanian
Institut Pertanian Bogor**

**JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2001**



RINGKASAN

MARTANTI ATMANINGRUM. Pengaruh Pelaksanaan Program PDM-DKE Terhadap Perkembangan Usaha dan Perubahan Pendapatan Rumah Tangga (Kasus Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah) di bawah bimbingan **YETI LIS PURNAMADEWI.**

Kemiskinan merupakan masalah nasional dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah saja, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama segenap pelaku ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga kemiskinan adalah masalah pokok dan perlu upaya pengentasan serta pemahanan secara mendalam. Terlebih sejak munculnya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 kemiskinan semakin meningkat dan menjadi masalah yang serius. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran akibat krisis ekonomi, sejak Tahun Anggaran 1998/1999 pemerintah meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang salah satu kebijakannya adalah program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE).

Pelaksanaan program PDM-DKE diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan menggerakkan kembali ekonomi rakyat melalui pemberian bantuan modal usaha dan membangun atau merehabilitasi sarana dan prasarana sosial-ekonomi. Disamping itu, pada program PDM-DKE ditambahkan dengan bantuan pendampingan dan proses perencanaan *bottom-up*.

Besarnya bantuan modal merupakan salah satu faktor penentu dalam menciptakan kegiatan produktif yang akhirnya mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peserta program PDM-DKE. Besarnya bantuan yang diterima oleh peserta program PDM-DKE akan tergantung pada alokasi dana antara kegiatan fisik dan ekonomi, dimana ketepatan alokasi dana tersebut salah satunya akan dipengaruhi oleh bagaimana terlaksananya proses perencanaan secara *bottom-up*. Karena sasarannya masyarakat miskin maka efektifitas program PDM-DKE ditentukan oleh kualitas pendampingan.

Permasalahannya, jumlah masyarakat miskin begitu banyak dibandingkan dengan dana yang tersedia sementara hasil penelitian sebelumnya menunjukkan pemberian bantuan kepada penerima program PDM-DKE didasarkan kepada pemerataan. Sementara itu proses perencanaan secara *bottom-up* masih menjadi pertanyaan karena pengalaman pembangunan selama bertahun-tahun bertumpu pada perencanaan *top-down*. Sedangkan pendampingan yang diberikan terbatas pada administrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mempelajari pelaksanaan program PDM-DKE yang berlangsung di desa Guworejo, (2) mengkaji pelaksanaan visi *bottom-up* dan pendampingan program PDM-DKE di desa Guworejo, serta (3) menganalisis pengaruh bantuan program PDM-DKE terhadap perkembangan usaha dan pendapatan rumah tangga peserta program PDM-DKE di desa Guworejo.

Penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah. Pengambilan unit sampel dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program PDM-DKE. Dalam penelitian ini data primer dan sekunder dianalisis dengan analisa kualitatif dan kuantitatif.

Pelaksanaan kegiatan program PDM-DKE di desa Guworejo dilaksanakan melalui beberapa tahap sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Program PDM-DKE, yaitu tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian. Hanya saja masing-masing tahapan tersebut belum dilaksanakan secara intensif sehingga belum sesuai dengan tujuannya, khususnya dalam tahap persiapan (sosialisasi) dan perencanaan. Dana bantuan program PDM-DKE di desa Guworejo seluruhnya digunakan untuk kegiatan ekonomi sebagai modal usaha dan disalurkan serta dikelola oleh 7 kelompok usaha bentukan baru dan seluruh kelompok RT. Dalam kelompok RT pengembalian dan perguliran dana berjalan lancar dan



sebaliknya yang terjadi di kelompok usaha. Hal ini karena kelompok RT merupakan kelompok yang sudah melembaga dan sudah terbiasa mengelola dana pinjaman dengan pengelolaan secara terbuka (*open management*).

Pelaksanaan visi *bottom-up* sudah diterapkan tetapi belum berjalan sebagaimana mestinya karena tidak ada transparansi dalam perencanaan dan peran aparat pemerintah (kabupaten dan kecamatan) masih dominan. Pendampingan oleh Fasilitator Desa (FD) hanya terbatas pada administrasi saja sehingga fungsi FD di desa Guworejo sepertinya hanya sebagai pelengkap saja.

Pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp 489.751,82 karena total modal dan volume produksi sedangkan jumlah tenaga kerja, jangkauan pemasaran, kualitas dan kemasan produk tidak mengalami perubahan.

Hasil uji statistik menunjukkan peubah umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan jumlah pinjaman berpengaruh nyata terhadap perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh dari persamaan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE adalah 0,814. Artinya 81,40 persen variasi perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE dapat dijelaskan oleh variasi variabel penjelas dalam model, dan sisanya sebesar 18,6 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model. Nilai F_{hitung} sebesar 8,30 nyata pada taraf 95 persen sehingga menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas dalam model persamaan secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE. Dalam persamaan ini tidak terdapat masalah multikolinier karena nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 . Uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson diperoleh bahwa autokorelasi tidak dapat disimpulkan.

Pendapatan rumah tangga peserta program PDM-DKE mengalami peningkatan dengan melihat rata-rata perubahan total pendapatan rumah tangga peserta program PDM-DKE yaitu sebesar Rp 789.042,19. Selain itu juga terjadi penurunan kemiskinan dengan membandingkan pendapatan per kapita sebelum dan

sesudah program PDM-DKE dilaksanakan. Peran bantuan program PDM-DKE terhadap peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan cukup besar dilihat dari besarnya perubahan proporsi pendapatan dari usaha yang didanai program PDM-DKE yaitu sebesar 4,95 persen.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



INSTITUT PERTANIAN BOGOR
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Martanti Atmaningrum
Nomor Pokok : A08496011
Judul : **PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM PDM-DKE
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA DAN
PENDAPATAN RUMAH TANGGA (Kasus Desa
Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen,
Propinsi Jawa Tengah)**

Dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di
Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian
Bogor.

Bogor, Mei 2001

Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian

Menyetujui

Dosen Pembimbing

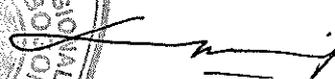

Ir. Yeti Lis Purnamadewi, MSc

NIP. 131 967 243

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian




Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS.

NIP. 131 284 865

Tanggal Kelulusan : 14 Mei 2001

PERNYATAAN

DENGAN INI, SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-BENAR MERUPAKAN HASIL KARYA SENDIRI DAN BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Mei 2001

MARTANTI ATMANINGRUM

A08496011



Hak cipta milik IPB University

IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Malang pada tanggal 2 Maret 1978 sebagai anak pertama dari empat bersaudara, dari keluarga Bapak Mardjoko (alm) dan Ibu Hardiastuti Tri Budiningsih.

Penulis menjalani pendidikan di kota Surakarta. Pada tahun 1990 penulis menamatkan pendidikan dasarnya dari Sekolah Dasar Negeri 44 Surakarta. Pada tahun yang sama, penulis diterima di SMP Negeri 1 Surakarta dan lulus pada tahun 1993. Kemudian penulis melanjutkan studinya di SMA Negeri 5 Surakarta dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1996.

Pada tahun 1996 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima sebagai mahasiswa strata-1 Fakultas Pertanian, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya.

Hak cipta milik IPB University



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah atas segala berkat dan rahmatNya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengambil judul untuk penelitian ini adalah “**Pengaruh Pelaksanaan Program PDM-DKE terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Rumah Tangga (Kasus Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah)**”. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pertanian pada Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Penelitian ini dititikberatkan pada pelaksanaan program PDM-DKE yang merupakan salah satu kebijakan program JPS. Penelitian di tingkat Desa Guworejo ini untuk melihat pelaksanaan program PDM-DKE , alokasi dana, *bottom-up*, dan pendampingan. Selain itu juga untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan program PDM-DKE terhadap perkembangan usaha dan pendapatan rumah tangga peserta program PDM-DKE.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini. Kendati demikian penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa yang membacanya walaupun hanya sebutir mutiara di antara untaian permata.

Bogor, Mei 2001

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayah (alm) dan Mama yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayangnya yang tulus. Juga untuk Bapak dan adik-adikku tercinta Uky, Dana dan Hida.
2. Ir. Yeti Lis Purnamadewi, MSc, selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktunya.
3. Dr. Ir. Harianto, MS yang telah bersedia menjadi dosen penguji utama.
4. Ir. Murdianto, MSi yang telah bersedia menjadi dosen penguji komdik.
5. Dr. Ir. Rina Oktaviani, MSi, yang telah bersedia menjadi moderator seminar.
6. Bapak Thomas Ramelan selaku Kepala Desa Guworejo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di wilayahnya.
7. Bapak Suwadiono selaku Ketua Pelaksanaan TKPP Pusat yang telah memberikan masukan dan buku-buku sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Gunardi, Ibu Jacky dan Angga yang telah memberikan semangat dan dukungan yang sangat berharga kepada penulis. *I love this family...*
9. Mas Yoyok atas perhatian dan kasih sayangnya.
10. Mas Nanang, Mbak Erna dan Om Mul yang sudah membantu penulis dalam mengurus surat-surat dan mencarikan informasi di BAPPEDA Sragen dan Kecamatan Karangmalang.
11. Arif yang dengan tulus bersedia nganterin selama turun lapang; Estri, atas akomodasinya selama ngurusin surat-surat di Semarang; Beni, terima kasih udah nganterin ke kantor-kantor.
12. Restuwati, atas dukungan moril dan kasih sayangnya yang sangat berharga. Terima kasih atas waktu yang sudah terbuang untukku. *I'll be remember for your kindness and be my beautiful friend forever...*
13. Erwin, thank banget atas perhatian dan persaudaraan selama 5 tahun ini. Terima kasih juga dengan masukan-masukan untuk perbaikan skripsi ini.

14. Donna dan Indah yang sudah menjadi sahabatku dan mau mendengar keluh kesah selama 1,5 tahun terakhir. *Thank you...*
15. Totie... thank ya udah menjadi teman setiaku meskipun sering dibentak-bentak.
16. Jangkung yang menjadi teman untuk berkonsultasi.
17. Masyarakat EPS 33 : Indah, Heni, Yeni, Mery, Nisma, Dede Kiki, Erwin, Nessa, Evi, Tina, Bonin, Dina R, Sarma, Andry, Tintin, Donna, Endang, Nina, Endah, Syahnan, Hertati, Surti, Neni, Irma, Afifah, Eva, Gloria, Agung, Opie, Dina D, Henry, Aan, Dian, Axa, Monika, Tony, Horasman, Jangkung. Terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan selama ini.
18. Dik Titik, terima kasih buat kamarnya dan *sorry* sering bikin ribut dan berantakan.
19. Buat semua yang terlewat belum disebut *thank you...*

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	8
2.2. Program-program Pemberdayaan Masyarakat.....	11
2.2.1. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT)	11
2.2.2. Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT).....	14
2.2.3. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	15
2.2.4. Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE)	16
2.3. Konsep Kemiskinan.....	26
2.4. Konsep Pendapatan dan Pengeluaran	29
2.5. Hasil Studi Terdahulu	31
III. KERANGKA PEMIKIRAN.....	33

© Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
4.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data	40
4.3. Metode Penentuan Sampel.....	41
4.4. Metode Analisis Data.....	41
4.5. Definisi Operasional	44

V. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

5.1. Lokasi dan Kondisi Geografis	47
5.2. Kondisi Sarana dan Prasarana Ekonomi.....	48
5.3. Kondisi Demografi.....	51
5.4. Kondisi Ekonomi.....	56
5.4.1. Pertanian.....	56
5.4.2. Non pertanian.....	57

VI. PELAKSANAAN PROGRAM PDM-DKE

6.1. Proses Pelaksanaan Program PDM-DKE.....	59
6.1.1. Tahap Persiapan	59
6.1.2. Tahap Perencanaan.....	63
6.1.3. Tahap Pelaksanaan	66
6.1.4. Tahap Evaluasi.....	73
6.1.5. Tahap Pelestarian	75
6.2. Kemampuan Pemerintah Lokal dan Masyarakat dalam Perencanaan Program PDM-DKE (Proses <i>Bottom-up</i>).....	82
6.3. Peran Pembinaan oleh Fasilitator dalam Pelaksanaan Program PDM-DKE.....	84



VII. PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM PDM-DKE TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA DAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA

7.1. Karakteristik Responden	89
7.2. Pengaruh Program PDM-DKE terhadap Perkembangan Usaha.	96
7.2.1. Jenis dan Perkembangan Usaha yang Didanai Program PDM-DKE	96
7.2.2. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pendapatan Usaha yang Didanai Program PDM-DKE	101
7.3. Pengaruh Program PDM-DKE terhadap Pendapatan Rumah Tangga.....	108
7.3.1. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga.....	108
7.3.2. Pengaruh Program PDM-DKE terhadap Pendapatan Rumah Tangga.....	112

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan.....	114
7.2. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA.....	118
---------------------	-----

LAMPIRAN.....	121
---------------	-----

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



DAFTAR TABEL

No	<u>Teks</u>	Hal
1.	Perbandingan Program IDT dengan Program PDM-DKE.....	25
2.	Jenis-jenis Penggunaan Tanah di Desa Guworejo	48
3.	Kondisi Bangunan Rumah Penduduk di Desa Guworejo	49
4.	Jumlah Pemilik Sarana Informasi di Desa Guworejo.....	50
5.	Jumlah Penduduk Desa Guworejo Menurut Jenis Kelamin (Tahun 1999)	51
6.	Jumlah Penduduk Desa Guworejo Menurut Umur (Tahun 1999).....	52
7.	Kualitas Penduduk Desa Guworejo Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (Tahun 1999)	53
8.	Perubahan Jumlah Penduduk (Tahun 1999).....	54
9.	Komposisi Penduduk Desa Guworejo Menurut Mata Pencaharian Utama (Tahun 1999)	54
10.	Jumlah Keluarga Miskin Desa Guworejo (Tahun 1999).....	56
11.	Jenis Usaha yang Didanai Program PDM-DKE T.A. 1998/1999 (dalam proposal)	65
12.	Pemilihan Responden Sebagai Penerima Dana Bantuan Program PDM-DKE	70
13.	Cara Pemilihan Jenis Usaha Responden.....	71
14.	Rata-rata Pinjaman Dana Bantuan Program PDM-DKE T.A. 1998/1999.....	72
15.	Keragaan Pengembalian Pinjaman Responden	76
16.	Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan/Pembinaan pada Responden	79
17.	Jumlah Penerima Dana Bantuan Program PDM-DKE T.A. 1998/1999 (Januari 1999 - Juli 2000).....	81
18.	Pembinaan/pendampingan yang Dilakukan FD Terhadap Responden...	86
19.	Peranan Pendamping di Mata Responden	87
20.	Lama Pendampingan yang Diinginkan Responden (sebulan sekali)	88



Hak Cipta milik IPB University

IPB University

21.	Jumlah Responden Menurut Umur.....	89
22.	Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin.....	90
23.	Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	90
24.	Sumber Pendapatan Responden.....	91
25.	Pendapatan dan Pengeluaran Responden	92
26.	Pengeluaran Rata-rata Responden.....	93
27.	Kondisi Rumah Responden	94
28.	Rata-rata Luas Pemilikan Lahan Responden	94
29.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Strata Kesejahteraan	95
30.	Pendapatan per Kapita Responden Sebelum Menerima Bantuan Program PDM-DKE	96
31.	Bentuk Usaha Responden yang Didanai Program PDM-DKE.....	97
32.	Jenis Usaha Responden yang Didanai Program PDM-DKE.....	98
33.	Frekuensi Responden Meminjam Bantuan Program PDM-DKE.....	98
34.	Jumlah Pinjaman Bantuan Program PDM-DKE Responden (sampai Juli 2000)	99
35.	Penggunaan Dana Bantuan Program PDM-DKE oleh Responden	100
36.	Perkembangan Usaha Responden Setelah Menerima Dana Bantuan Program PDM-DKE.....	101
37.	Hasil Regresi Faktor-faktor Pendapatan yang Mempengaruhi Perubahan Pendapatan Usaha yang Didanai Program PDM-DKE.....	104
38.	Analisa Ragam Model Perubahan Pendapatan Usaha yang Didanai Program PDM-DKE.....	106
39.	Perubahan Total Pendapatan Responden	110
40.	Perbandingan Pendapatan per Kapita Responden Program PDM-DKE Sebelum dan Sesudah Program PDM-DKE Dilaksanakan.....	111
41.	Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Pendapatan (Tahun 1998 dan 2000)	112

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



DAFTAR GAMBAR

No	<u>Teks</u>	Hal
1.	Struktur Organisasi Pelaksana Program IDT	13
2.	Struktur Organisasi Program PDM-DKE T.A. 1999/2000	21
3.	Mekanisme Pengajuan Dokumen Penarikan/Pencairan Dana	23
4.	Bagan Kerangka Pemikiran	39
5.	Mekanisme Penyaluran BLMd/k di Tingkat Desa Guworejo	67

@Hak cipta milik IPB University



DAFTAR LAMPIRAN

No	<u>Teks</u>	Hal
1.	Lingkaran Kemiskinan	122
2.	Model Ketidakberdayaan terhadap Kemiskinan (<i>The (dis) empowerment Model of Poverty</i>)	123
3.	Batas Miskin, Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin 1976-1996	124
4.	Peta Desa Guworejo	125
5.	Pengalokasian Dana Bantuan Program PDM-DKE T.A. 1998/1999 di Desa Guworejo.....	126
6.	Pemasukan dan Pengeluaran Dana Bantuan Program PDM-DKE T.A. 1998/1999 di Desa Guworejo	127
7.	Daftar Penerima (Penerima Awal) Dana Bantuan Program PDM-DKE T.A. 1998/1999 dan Nilai Dana Bantuan yang Diterima	128
8.	Pendapatan Responden Tahun 1998 dan Tahun 2000	132
9.	Hasil Pendugaan Persamaan Perubahan Total Pendapatan	133
10.	Perkembangan Usaha yang Didanai Bantuan Program PDM-DKE	134
11.	Karakteristik Responden	135
12.	Karakteristik Keluarga Sejahtera	136

© Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tiga masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang sering dijumpai di negara-negara sedang berkembang adalah pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan (kesenjangan antar golongan penduduk, kesenjangan antar kegiatan sosial ekonomi dan kesenjangan antar daerah). Kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan pangan-papan-sandang, kebutuhan hidup yang sehat, dan kebutuhan pendidikan dasar bagi anak-anak. Keadaan tersebut bukan kejadian yang dikehendaki oleh si miskin, melainkan suatu hal yang tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada pada dirinya.

Demikian halnya yang terjadi di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah nasional dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah saja, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama segenap pelaku ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Terlebih sejak munculnya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 kemiskinan dan pengangguran semakin menjadi masalah yang serius.

Dalam 17 tahun terakhir pembangunan ekonomi telah berhasil menurunkan kemiskinan, yaitu dari 54,2 juta jiwa (40,1 persen) pada tahun 1976 menjadi 40,6 juta jiwa (26,9 persen) pada tahun 1981, kemudian tingkat kemiskinan tersebut turun lagi menjadi 27,2 juta jiwa (15,1 persen) pada tahun 1990, 25,9 juta jiwa (13,7 persen) pada tahun 1993 dan 22,6 juta jiwa (11,34 persen) pada tahun 1996 (BPS, 1994), namun secara kuantitatif penduduk miskin masih tetap besar dan semakin sulit untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Apalagi pada pertengahan tahun 1997 bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat dengan tajam. Menurut Anonymous (1999d), angka pengangguran telah mencapai 13,8 juta jiwa dan jumlah rumah tangga miskin mencapai kurang lebih 80 juta jiwa. BPS memperkirakan jumlah penduduk miskin mencapai 80 juta jiwa lebih atau 40 persen dari total penduduk, bahkan ada yang memperkirakan mencapai 130 juta jiwa (Kompas dalam Sumodiningrat,1999).

@Hak cipta milik IPB University

Mulai awal PJP II (Repelita VI) pemerintah memandang perlu adanya program khusus penanggulangan kemiskinan yaitu program peningkatan penanggulangan kemiskinan. Program peningkatan penanggulangan kemiskinan ini kemudian dikenal sebagai program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilaksanakan berdasarkan Inpres No 5 Tahun 1993.

Program IDT merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Bantuan dana bergulir, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui program IDT merupakan suatu stimulan atau perangsang untuk memacu proses perubahan (transformasi struktural) dari kegiatan sosial ekonomi masyarakat menuju pada suatu kegiatan yang lebih maju. Pelaksanaan program IDT dimantapkan dengan program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). Program P3DT ini kemudian disempurnakan lagi menjadi bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dimana mengutamakan pembangunan yang dikelola langsung oleh masyarakat dalam wadah lembaga swadaya masyarakat desa yang dikoordinasikan dalam musyawarah di tingkat kecamatan.

Khusus dalam upaya menanggulangi pengangguran dan kemiskinan akibat krisis ekonomi, sejak Tahun Anggaran 1998/1999 pemerintah telah meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net Program*) sebagai upaya menyelamatkan penduduk yang terpuakul krisis ekonomi. Kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) mempunyai tujuan utama memicu dan memacu upaya penyelamatan (*rescue*) dan pemulihan (*recovery*) ekonomi. Upaya penyelamatan dilakukan melalui berbagai program penanggulangan dampak krisis yang ditujukan langsung kepada masyarakat melalui satu mekanisme penyaluran bantuan dalam wadah pengelolaan keuangan yang terpadu, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan melalui akses langsung ke masyarakat secara cepat dan berkelanjutan (*sustainability*). Program JPS menitikberatkan partisipasi masyarakat melalui bimbingan dan pendampingan.

Salah satu kebijaksanaan program JPS adalah Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) yang memberikan bantuan

langsung kepada masyarakat miskin dan yang menjadi miskin akibat krisis ekonomi. Petunjuk pelaksanaan maupun rambu-rambu pelaksanaan program PDM-DKE telah dipersiapkan oleh pemerintah pusat (Bappenas), namun bentuk kegiatan tergantung musyawarah di daerah. Dalam hal ini daerah diminta mampu mengidentifikasi, memformulasi dan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan program PDM-DKE di daerah masing-masing. Program PDM-DKE merupakan program bantuan pembangunan dengan mekanisme pelaksanaan yang bertumpu pada masyarakat dan disalurkan langsung kepada masyarakat yang kemudian dimantapkan dan diharapkan dapat dikembangkan sebagai langkah nyata pemberdayaan masyarakat (Gambar 2).

Pelaksanaan program PDM-DKE diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan menggerakkan kembali ekonomi rakyat melalui pemberian bantuan modal usaha dan membangun atau merehabilitasi sarana dan prasarana sosial-ekonomi. Pemberian bantuan modal usaha ini sifatnya hibah bergulir dan diperlukan peran aktif masyarakat untuk mengembangkannya. Pada pemberian bantuan modal kepada masyarakat miskin, hal terpenting adalah bantuan yang diberikan tersebut mampu meningkatkan kegiatan/usaha dan meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kembali bantuan modal tersebut dan ada sisa yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam memberdayakan masyarakat miskin adanya pendampingan dan mekanisme perencanaan secara *bottom-up* sangat diharapkan. Dalam menciptakan kegiatan yang produktif, masyarakat miskin tidak hanya kekurangan modal saja, tetapi juga didukung dengan rendahnya wawasan, keahlian/kemampuan dan informasi. Dengan demikian pemberian bantuan modal harus diimbangi dengan pendampingan. Pendampingan akan mempercepat proses pencapaian hasil yang diinginkan dan dapat menjaga keberlanjutan (*sustainability*) program PDM-DKE.

Haeruman (1997), mengungkapkan bahwa upaya pemerintah dalam pembangunan pedesaan perlu dikaitkan dengan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai dasar pemupukan modal, antara lain melalui pemberian bantuan dana sebagai modal usaha, pelatihan yang tepat, penerapan teknologi tepat guna, pembangunan



sarana pendukung, penyediaan sarana penunjang, dan penguatan lembaga sebagai wadah usaha masyarakat. Model pemberdayaan yang telah dikembangkan oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sangat efektif untuk menjembatani upaya-upaya tersebut.

Program PDM-DKE menggunakan mekanisme perencanaan alir bawah (*bottom-up*), dimana masyarakat menjadi subyek atau partisipan utama dalam pembangunan mulai dari peninjauan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, sampai ke pengawasan dan evaluasi. Masyarakat harus berani mengemukakan pendapatnya yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Dalam pengambilan keputusan harus didasarkan situasi dan kondisi masyarakat setempat supaya tidak terjadi kesalahan dalam implementasi kebijakan.

1.2. Permasalahan

Besarnya bantuan modal yang diterima oleh peserta program PDM-DKE merupakan salah satu faktor penentu dalam menciptakan kegiatan yang produktif yang akhirnya akan berdampak pada pencapaian peningkatan pendapatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh P3R-YAE bekerja sama dengan Pemda Tingkat I Propinsi Jawa Barat terungkap bahwa masyarakat berfikir dana program PDM-DKE merupakan “bantuan” pemerintah untuk modal usaha yang seharusnya dibagi merata kepada masyarakat, karena semua merasa berhak atas “bantuan” tersebut. Hal ini terjadi karena informasi tentang dana program PDM-DKE yang terbuka sehingga dengan pembagian dana yang lebih cenderung ke pemerataan akan membuat jumlah bantuan yang diterima oleh peserta menjadi kecil dan tidak cukup untuk modal. Sementara itu, jumlah dana bantuan program PDM-DKE relatif terbatas sedangkan jumlah rumah tangga miskin demikian banyak.

Besarnya dana yang diterima oleh rumah tangga peserta program PDM-DKE akan dipengaruhi oleh bagaimana alokasi dana yang dilakukan antara pembangunan sarana dan prasarana fisik dan kegiatan ekonomi. Seperti yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Program PDM-DKE, bantuan modal



program PDM-DKE yang diberikan sejak Tahun Anggaran 1998/1999 merupakan suatu sumber modal bagi rumah tangga miskin untuk digunakan sebagai tambahan modal dalam berproduksi atau membuka kegiatan/usaha baru. Selain itu juga digunakan untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik yang mendukung kegiatan ekonomi desa/kelurahan tersebut. Namun pengalokasian dana antara dua alternatif penggunaan tersebut akan tergantung pada kesesuaian dengan situasi dan kondisi dan kebijaksanaan daerah yang bersangkutan. Ketentuan alokasi dana tersebut akan mempengaruhi efektifitas program PDM-DKE dalam mencapai tujuan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga penerima dana bantuan program PDM-DKE

Ketepatan dalam alokasi dana salah satunya akan dipengaruhi oleh bagaimana proses perencanaan secara *bottom-up* dapat diwujudkan. Hal ini menjadi satu masalah yang menjadi pertanyaan penelitian karena proses perencanaan secara *bottom-up* tersebut dalam implementasinya memerlukan cukup waktu karena masyarakat dan pemerintah selama bertahun-tahun sebelumnya terbiasa dengan perencanaan *top-down*. Dari hasil temuan P3R-YAE menunjukkan bahwa visi *bottom-up* yang diemban program PDM-DKE seringkali tidak tampak. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah terbiasa dengan program pembangunan *top-down* yang dilaksanakan selama bertahun-tahun yang berdampak pada hilangnya keberdayaan masyarakat desa. Kemampuan masyarakat dalam pengambilan kebijakan pada tahap perencanaan masih jauh dari yang diharapkan. Selain itu, terjadi kurangpercayaan antara unsur masyarakat terhadap program dalam merespon mekanisme penyelenggaraan program PDM-DKE yang memang tergolong baru. Disamping itu, menurut hasil penelitian yang dilakukan PSP bekerja sama dengan JICA menunjukkan bahwa sosialisasi program PDM-DKE dan juga hampir semua program lainnya dilakukan dengan waktu yang sangat singkat.

Seperti dikemukakan sebelumnya, pendamping (Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Desa) mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mempercepat proses pencapaian hasil yang diinginkan dan menjaga keberlanjutan program PDM-

DKE. Namun dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Program PDM-DKE pendampingan yang dilakukan hanya sebatas perbaikan administrasi program. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh P3R-YAE yang menunjukkan bahwa tenaga pendamping yang disediakan kurang memadai baik dari segi jumlah (rasio pelayanan) maupun masa kerja (paling lama hanya 3 bulan). Hal ini berdampak nyata pada tidak adanya persiapan kelompok baik secara individu maupun kelembagaan, terutama untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) program PDM-DKE.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program PDM-DKE di desa Guworejo?
2. Bagaimana pelaksanaan visi *bottom-up* dan pendampingan program PDM-DKE di desa Guworejo?
3. Bagaimana pengaruh bantuan program PDM-DKE terhadap perkembangan usaha dan pendapatan rumah tangga peserta program PDM-DKE di desa Guworejo ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan mempertimbangkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Mempelajari pelaksanaan program PDM-DKE yang berlangsung di desa Guworejo.
2. Mengkaji pelaksanaan visi *bottom-up* dan pendampingan program PDM-DKE di desa Guworejo
3. Menganalisis pengaruh bantuan program PDM-DKE terhadap perkembangan usaha dan pendapatan rumah tangga peserta program PDM-DKE di desa Guworejo.



Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat penerima bantuan program PDM-DKE untuk mengetahui tingkat pendapatan mereka. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi perencana/pengambil keputusan sehubungan dengan kelanjutan program PDM-DKE. Disamping itu bagi peneliti lain merupakan rujukan atau perbandingan dalam melakukan penelitian sejenis, sedangkan bagi penulis penelitian ini sebagai media latihan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh serta mengangkat permasalahan untuk dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Banyak ahli yang mengemukakan pendapat mengenai makna pemberdayaan masyarakat, namun pada dasarnya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki (Sumodiningrat, 1996). Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers dalam Kartasasmita, 1996).

Menurut Sajogyo dkk (1999), pemberdayaan merupakan proses belajar yang produktif dan reproduktif. Produktif dalam pengertian mampu memberdayakan potensi diri dan lingkungan, dan kerjasama untuk memperoleh manfaat material dan imaterial bagi masyarakat pada jangka waktu tertentu. Reproduksi mempunyai arti mampu mewariskan nilai-nilai kearifan kepada generasi berikutnya. Terutama nilai-nilai pembebasan diri dari keterbelakangan dan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang diiringi dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat akan mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat karena masyarakat memiliki potensi untuk dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya (Kartasasmita, 1996).

Sementara itu Tjiptono dalam Papilaya (1998), mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah upaya memberikan otonomi, wewenang dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat merampungkan tugasnya sebaik mungkin.

Menurut Kartasasmita (1996), keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersatu dalam masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, serta memiliki nilai-nilai instrinsik, seperti kegotongroyongan, kekeluargaan dan kebhinekaan akan memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan masyarakat bertahan, mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Pemberdayaan senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun pihak yang peduli kepada masyarakat, paling tidak harus memuat lima hal pokok. **Pertama**, bantuan dana sebagai modal usaha; **Kedua**, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat; **Ketiga**, penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat; **Keempat**, pelatihan bagi masyarakat dan aparat; dan **Kelima**, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat (Sumodiningrat, 1997).

Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan. **Pertama**, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. **Kedua**, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan di daerah. **Ketiga**, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan (Kartasasmita, 1996).



Menurut Sumodiningrat (1999), kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. **Pertama**, kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat. **Kedua**, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. **Ketiga**, kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Secara konkret, pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat. Sementara itu pembangunan ekonomi rakyat harus diawali dengan usaha pengentasan kemiskinan, yang masih menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Usaha pengentasan kemiskinan harus berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktur ekonomi rakyat sehingga memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional (Sumodiningrat, 1997).

Pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui program di berbagai sektor yang dibiayai langsung dengan anggaran dalam negeri. Disamping itu upaya pemberdayaan ekonomi rakyat juga ditempuh dengan memanfaatkan dana masyarakat melalui perbankan. Melalui berbagai skema kredit, pemerintah membantu dengan memberikan subsidi bunga yang biayanya ditanggung oleh anggaran pembangunan. Pemberdayaan tidak hanya menyangkut pendanaan tetapi juga peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan kelembagaan (Pidato Presiden RI, 5 Januari 1999, dalam Sumodiningrat, 1999).

Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan program JPS yang salah satu kebijakannya adalah program PDM-DKE. Program JPS merupakan payung dari strategi dan langkah kebijaksanaan khusus dan reguler yang bertujuan memberdayakan masyarakat dan mewujudkan peran aktif masyarakat.

2.2. Program-program Pemberdayaan Masyarakat

Berbagai program bantuan pembangunan dengan mekanisme pelaksanaan yang bertumpu pada masyarakat, dan disalurkan langsung kepada masyarakat terus dimantapkan. Mekanisme ini diharapkan dapat dikembangkan sebagai langkah pemberdayaan masyarakat yang nyata. Salah satu program bantuan yang sedang dikembangkan dan terus disempurnakan adalah bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan bantuan program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE). Bantuan PDM-DKE adalah bantuan program yang menetapkan pola bantuan PPK. Bantuan PPK merupakan pengembangan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan dimantapkan dalam program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) (Sumodiningrat, 1999).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan masyarakat adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri (Kartasasmita, 1996).

2.2.1. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT)

Program pemberdayaan masyarakat mulai dilaksanakan sejak tahun 1994/1995 melalui program IDT. Program IDT merupakan perluasan dan peningkatan berbagai program dan upaya menanggulangi kemiskinan yang langsung ditujukan untuk menangani masalah kemiskinan pada tingkat pedesaan. Pada tingkat kelompok sasaran, program IDT bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, mendorong perubahan struktur masyarakat, dan membangun kapasitas masyarakat melalui pengembangan, peningkatan dan pemantapan kondisi sosial ekonomi (Sumodiningrat, 1997).

Program IDT merupakan suatu program untuk menumbuhkan dan memperkuat penduduk miskin dengan membuka kesempatan berusaha yang diarahkan untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dengan prinsip gotong-royong, keswadayaan dan peran serta. Keberhasilan pelaksanaannya tergantung dari

kepedulian aktif seluruh masyarakat, motivasi penduduk miskin untuk mengubah nasibnya, dukungan aparat pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan peran serta aktif berbagai pihak seperti perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pers dan dunia usaha.

Program IDT mempunyai 3 misi, yaitu sebagai gerakan masyarakat dan gerakan nasional, sebagai strategi pemerataan pembangunan yang terpadu, dan sekaligus bertujuan menggerakkan roda ekonomi rakyat melalui bantuan modal kerja, pendampingan, dan pembangunan prasarana fisik. Program IDT merupakan program khusus untuk menerapkan falsafah dasar kebijaksanaan anti kemiskinan dengan cara mempercayai orang miskin, bahwa mereka dapat mengangkat diri sendiri dengan kekuatan yang ada pada mereka (Mubyarto1996).

Pada program IDT terdapat tiga komponen dasar berupa bantuan dana bergulir untuk modal usaha, pembangunan prasarana pedesaan dan penyediaan pendampingan melalui tenaga pendamping baik lokal, teknis maupun khusus.

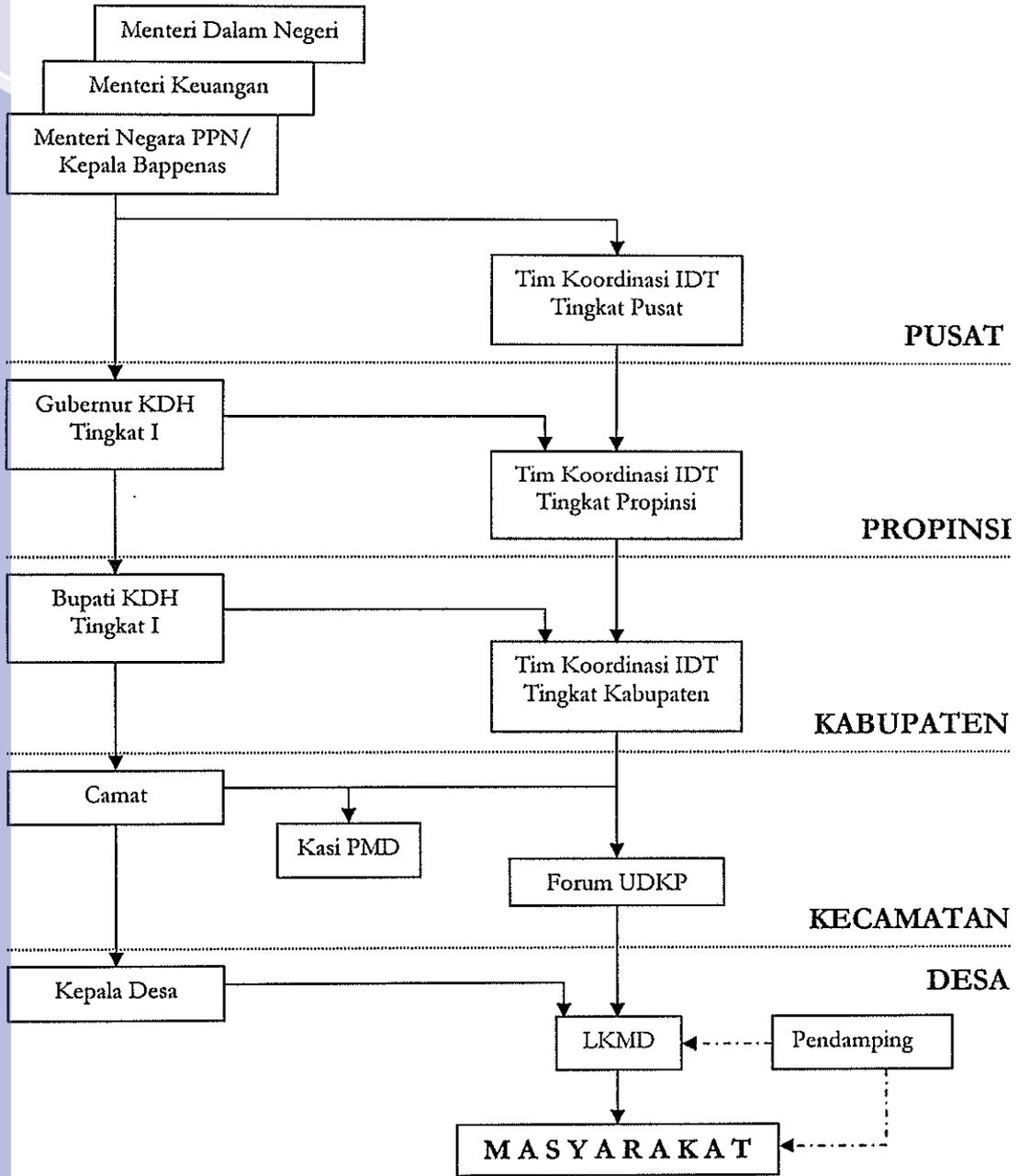
Bantuan dana program IDT sebesar Rp 20 juta per desa yang disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat melalui bank penyalur yang ditunjuk di tingkat kecamatan. Dana IDT merupakan hibah bergulir dan menjadi dana abadi milik masyarakat desa. Dana tersebut untuk dikembangkan lebih lanjut yang nantinya akan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan potensi sumberdaya alam setempat atau melalui kegiatan ekonomi yang sudah biasa dilakukan penduduk miskin sehari-hari. Inpres Desa Tertinggal oleh penduduk Yogyakarta diartikan menjadi "*Iki Duit Tangkarno*", artinya uang sebagai modal tidak untuk dihabiskan, tetapi harus dilipatgandakan melalui usaha dengan cara masing-masing (Mubyarto, 1996).

Dengan demikian, program IDT merupakan wujud pemihakan dan pemberdayaan masyarakat yang akan mendorong percepatan perubahan struktur masyarakat, memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University





Keterangan :

- : Garis Pembinaan
- ⋯→ : Garis Koordinasi
- - -> : Garis Bantuan Teknis

Gambar 1. Struktur Organisasi Program IDT

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

2.2.2. Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)

Pengembangan program IDT diimplementasikan dalam program P3DT yang merupakan pendukung program IDT. Program P3DT yang dioperasikan mulai tahun 1995/1996 menekankan bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar yang dapat mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat lokal. Peran serta aktif masyarakat lokal dalam kegiatan pembangunan di tingkat lokal, penguatan kelembagaan pembangunan di tingkat lokal, dan pelestarian hasil pembangunan melalui pemantapan sistem pelaporan (pemantauan dan evaluasi) makin dimantapkan dalam pelaksanaan program P3DT.

Tujuan dilaksanakannya program P3DT adalah : (1) meningkatkan akses pemasaran dan mengurangi isolasi wilayah, (2) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, (3) menciptakan lapangan kerja di desa terutama pada saat musim kemarau, (4) meningkatkan kemampuan kelembagaan desa dan masyarakat, serta (5) meningkatkan keterampilan masyarakat desa dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana (Sumodiningrat, 1997).

Lingkup program P3DT terdiri dari : pertama, pembangunan jalan dalam desa dan antar desa berupa peningkatan jalan tanah ke batu kerikil dan rehabilitasi jalan kerikil, termasuk pembangunan jalan sederhana. Kedua, pembuatan tambatan perahu sederhana untuk membuka akses melalui sungai dan laut. Ketiga, pembangunan dan perbaikan sarana air bersih dan sanitasi dengan sistem komunal (Sumodiningrat, 1997).

Program P3DT dilakukan dengan menggunakan pendekatan “cluster” (kelompok desa). Setiap kelompok terdiri dari 5 desa tertinggal dengan penjelasan minimal 3 desa tertinggal parah dan selebihnya merupakan desa tertinggal kategori lainnya yang berdekatan. Alokasi dana program P3DT per desa adalah sebesar Rp 120 juta untuk Jawa dan Madura dan Rp 130 juta untuk Luar Jawa dan Bali (Sumodiningrat, 1997).

Prinsip penguatan kelembagaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat lokal dan diwujudkan melalui wadah LKMD menjadi dasar pelaksanaan

kegiatan pembangunan prasarana dan sarana dasar sosial ekonomi. Melalui pelaporan yang tertib, perkembangan dan pelestarian pelaksanaan kegiatan, hasil pembangunan, dan dampaknya diketahui guna meningkatkan kapasitas masyarakat.

2.2.3. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Program P3DT disempurnakan menjadi Program Pengembangan Kecamatan. PPK menekankan pentingnya mekanisme perguliran dana bantuan langsung (*revolving block grant*) melalui lembaga keuangan milik masyarakat yang disebut Unit Pengelola Keuangan (UPK). Penggunaan dana bantuan melalui PPK dibatasi oleh persyaratan ketat. Dana bantuan yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat hanya boleh digunakan untuk membiayai investasi sosial dan ekonomi produktif (Sumodiningrat, 1999).

Pada PPK, bantuan langsung berupa hibah bergulir diberikan kepada desa dan dikoordinasikan oleh kecamatan. Setiap kecamatan mengkoordinasi 5 desa dengan kriteria tertentu. Bantuan langsung kepada desa yang dikoordinasi di kecamatan ini, dapat digunakan untuk membiayai investasi sosial berupa pembangunan prasarana umum (*public utilities infrastructure*), investasi ekonomi yang menghasilkan dana bergulir, dan kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat (*capacity building investment*).

Unit Pengelola Keuangan (UPK) di tingkat desa dan kecamatan perlu dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan dana bantuan. Pengelolaannya dilakukan sendiri oleh anggota masyarakat. Unit Pengelola Keuangan (UPK) berperan sebagai lembaga keuangan yang dapat menampung dan mengelola berbagai bantuan dan dana yang berputar di masyarakat. Unit Pengelola Keuangan (UPK) dapat berkembang menjadi lembaga keuangan alternatif milik masyarakat (LKM) yang tumbuh dari masyarakat sendiri. Lembaga keuangan alternatif milik masyarakat (LKM) ini merupakan embrio lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip perbankan yang penyelenggaraannya menerapkan prinsip kebersamaan. Dalam perkembangan

selanjutnya LKM dapat berbadan hukum koperasi (mengikuti UU Koperasi) atau berbadan hukum bank (mengikuti UU Perbankan) (Sumodiningrat, 1999).

Pada Tahun Anggaran 1998/1999, bantuan langsung telah diprogramkan untuk 1.500 kecamatan yang meliputi 7.500 desa. Dimana setiap kecamatan menerima 3 kali dengan nilai antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 750 juta setiap tahun.

2.2.4. Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE)

Dalam mengatasi krisis ekonomi, pengembangan bantuan dengan mekanisme PPK dipercepat melalui program PDM-DKE. Program PDM-DKE adalah program yang menerapkan prinsip PPK, tetapi persyaratan penggunaan dana bantuan yang dimanfaatkan langsung bersifat lebih longgar sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sosial ekonomi yang menjadi prioritas masyarakat lokal (Sumodiningrat, 1999).

Program PDM-DKE merupakan penyempurnaan dari program IDT, P3DT, PPK serta berbagai pengalaman pembangunan padat karya yang menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan memberikan penekanan pada prinsip pengembangan ekonomi rakyat.

Tujuan dan Sasaran Program PDM-DKE

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui peningkatan pendapatan.
- b. Menggerakkan kembali ekonomi rakyat melalui pemberian modal usaha dan membangun atau merehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi serta sosial yang mendukung sistem produksi, distribusi barang dan jasa.
- c. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana sosial ekonomi rakyat dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sasaran penerima bantuan adalah penduduk miskin baik pria maupun wanita, yaitu penduduk yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilannya, dan yang



sumber penghasilannya tidak cukup bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari khususnya untuk pengadaan pangan, pembiayaan pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Alokasi dana untuk kegiatan ekonomi sama sekali tidak diperbolehkan untuk masyarakat mampu. Sasaran penduduk miskin tersebut dijangkau melalui kegiatan masyarakat yang diorganisir oleh Organisasi Masyarakat Lokal bersama kelompok masyarakat lainnya. Kegiatan yang dapat diusulkan untuk memperoleh pembiayaan dari program PDM-DKE hanya kegiatan yang dapat menjangkau dan mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk miskin di daerah.

Sasaran lokasi adalah desa/kelurahan yang berada satu wilayah kecamatan, kecuali desa/kelurahan yang berada di kecamatan perkotaan yang menerima bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan/atau kecamatan pedesaan yang menerima bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di dalam satu kabupaten/kota.

Macam kegiatan yang dapat diusulkan pada hakekatnya fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi setempat sepanjang dapat menciptakan penghasilan kepada sebanyak mungkin penduduk miskin di daerah tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa : (a) Pemeliharaan/pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi rakyat, antara lain jalan, jembatan, saluran irigasi, saluran limbah, pembuangan sampah, jaringan air minum, sarana pengendalian banjir, dan dukungan usaha rakyat yang mampu melibatkan banyak sumberdaya manusia atau komponen tenaga kerja, dan (b) Segala macam kegiatan ekonomi rakyat, termasuk peningkatan ketahanan pangan, pengembangan usaha masyarakat yang mengalami kelesuan dengan pemberian bantuan modal usaha, dan pemantapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi.

Organisasi Pengelolaan dan Pelaksanaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta mendukung kelancaran pengelolaan program PDM-DKE, dibentuk suatu sistem organisasi pengelolaan dan pelaksanaan program pada setiap tingkat pemerintahan, yang terdiri dari :

i. Tim Koordinasi Pengelolaan Program (TKPP)

Untuk mengendalikan dan membina pelaksanaan kegiatan, dibentuk Tim Koordinasi di berbagai tingkat pemerintahan, yaitu (1) Di tingkat Pusat dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas. (2) Di tingkat Propinsi dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program Propinsi yang ditetapkan oleh Gubernur. (3) Di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.

ii. Pemimpin Proyek

Untuk membantu tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Program dalam pelaksanaan program PDM-DKE serta menyiapkan, melaksanakan, dan memantau seluruh administrasi kegiatan program PDM-DKE, diadakan Pimpro dan Pimbagpro di berbagai tingkat pemerintahan, yaitu (1) Di tingkat Pusat diadakan Pimpro Pembinaan dan Pengendalian Program dan Pimbagpro Perencanaan dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Mendagri. (2) Di tingkat Propinsi diadakan Pimpro yang ditetapkan oleh Gubernur dan Pimbagpro Monitoring yang ditetapkan oleh Mendagri. (3) Di tingkat Kabupaten/Kota diadakan Pimpro Kab/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

iii. Konsultan

Untuk membantu kegiatan pengelolaan pelaksanaan kegiatan, maka ditunjuk dan ditempatkan Konsultan pada berbagai tingkatan, yaitu (1) Konsultan Manajemen Pusat (KM-Pusat). (2) Konsultan Monitoring Propinsi (KM-Propinsi). (3) Konsultan Pendamping Kabupaten/Kota (KP-Kab/Kota).

Fungsi/tugas konsultan pendamping sebagai berikut :

➤ Tahap Persiapan

- Membantu dalam menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan pengelolaan operasional program PDM-DKE kepada pembina desa dan aparat desa.
- Mengumpulkan data umum yang relevan dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program PDM-DKE (meliputi antara lain data potensi



desa, jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin berdasarkan jenis kelamin).

- Menganalisa data dan temuan lapangan yang berkaitan dengan hambatan partisipasi perempuan dari program sebelumnya.
- Menunjuk dan menempatkan Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Desa/Kelurahan (FD/K).
- Memberi pembekalan kepada FK dan FD/K mengenai pendampingan dalam penyusunan rencana kerja.

➤ Tahap Perencanaan dan Penyusunan Program

- Memfasilitasi koordinasi dengan Dinas Teknis terkait untuk membantu masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan.
- Membantu secara teknis dan manajemen kepada masyarakat di dalam penyusunan rencana kegiatan.

➤ Tahap Pelaksanaan

- Memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program yang dihadapi masyarakat, terutama yang tidak dapat dipecahkan oleh FK dan FD/K.
- Melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada perwakilan Konsultan Monitoring Propinsi.

➤ Tahap Evaluasi

Melakukan evaluasi hasil dan kinerja pelaksanaan sebagai masukan kepada Tim Koordinasi Pengelola Program (TKPP) Kabupaten/Kotamadya di dalam melestarikan dan memelihara hasil-hasil yang telah dicapai dalam program PDM-DKE.

iv. Koordinator Pelaksana Lapangan (KPL)

Di tingkat Kecamatan, ditunjuk seorang Koordinator Pelaksana Lapangan (KPL) yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Koordinator Pelaksana Lapangan berfungsi menyebarluaskan informasi, mengkoordinasikan, mengendalikan,

memperlancar pelaksanaan program dan memantau pelaksanaan kegiatan program di seluruh desa/kelurahan di wilayah kecamatan.

v. Fasilitator Kecamatan (FK)

Fasilitator Kecamatan ditempatkan oleh Konsultan Pendamping Kabupaten/Kota untuk membantu KPL dalam sosialisasi, memberi pelatihan dan pembinaan kepada TPKd/k dan Fasilitator Desa/Kelurahan, memantau, mengawasi, menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari para Fasilitator Desa/Kelurahan, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan ke Konsultan Pendamping.

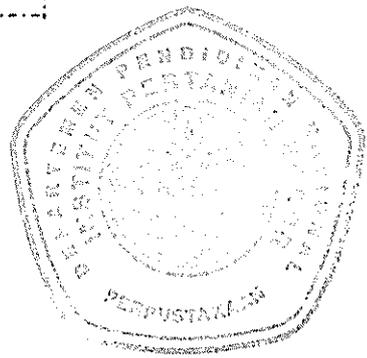
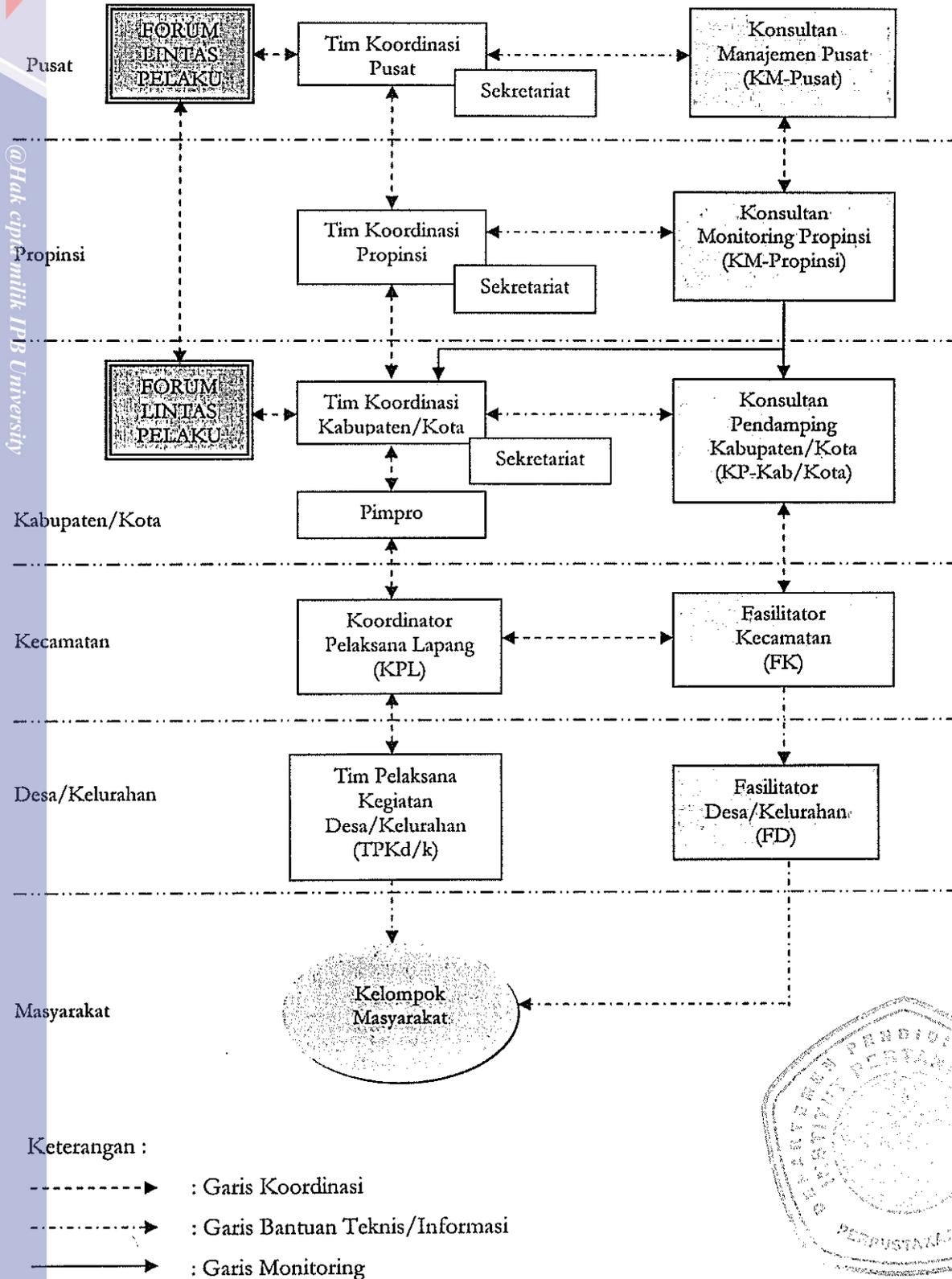
vi. Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan (TPKd/k)

Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan (TPKd/k) berfungsi untuk melaksanakan seluruh program PDM-DKE di tingkat desa/kelurahan, yang meliputi tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelestarian. TPKd/k ini dibentuk dalam musyawarah desa/kelurahan dan pengurusnya dipilih oleh masyarakat secara terbuka dan demokratis.

vii. Fasilitator Desa/Kecamatan (FD)

Fasilitator Desa/Kelurahan (FD) merupakan anggota masyarakat desa yang menonjol kemampuan dan kepemimpinannya yang dipilih dalam musyawarah desa/kelurahan untuk membantu menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat desa/kelurahan.





Gambar 2. Struktur Organisasi Program PDM-DKE T.A. 1999/2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

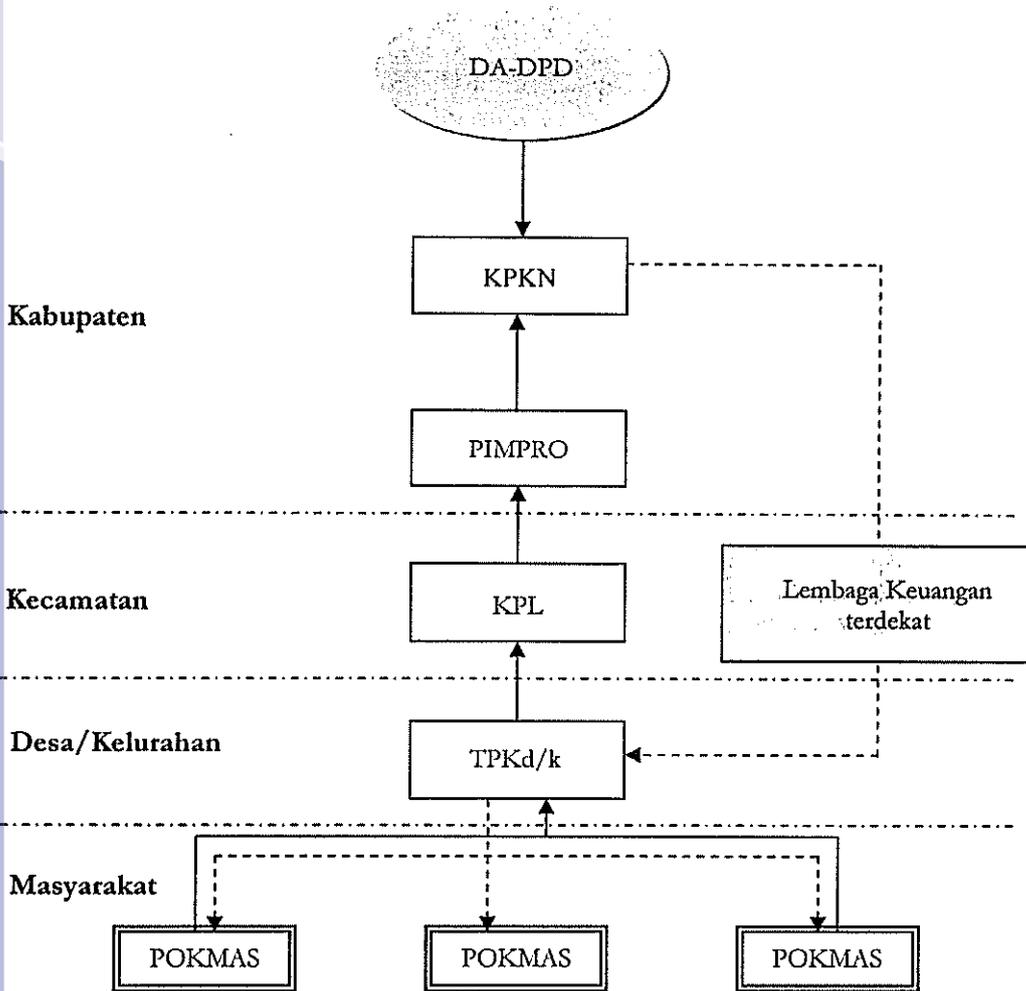
@Hak cipta milik IPB University

Pendanaan

Penyaluran dana program PDM-DKE mengikuti mekanisme dana Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang disalurkan langsung kepada masyarakat melalui lembaga keuangan terdekat. Dana bantuan program PDM-DKE untuk masing-masing daerah disalurkan melalui dokumen Daftar Alokasi dana Pembangunan Daerah (DA-DPD), yang dilampiri daftar jumlah dana bantuan yang dialokasikan untuk tiap-tiap daerah tingkat Kabupaten/Kota.

Alokasi dana program PDM-DKE terdiri dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Bantuan Manajemen (BM) serta Bantuan Operasional dan Pengendalian (BOP). Besarnya BLM setiap kabupaten/kotamadya ditetapkan di tingkat pusat berdasarkan jumlah penduduk miskin, perubahan jumlah penduduk miskin, dampak krisis ekonomi dan pertimbangan alokasi bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Dana BLMd/k ini dialokasikan untuk penambahan modal investasi dan modal kerja, melaksanakan proyek pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana di setiap desa/kelurahan, bantuan operasional dan insentif Tim Pelaksana Kegiatan desa/kelurahan serta insentif bagi Fasilitator Desa/Kelurahan. Besarnya BLMd/k untuk setiap desa/kelurahan minimal Rp 25.000.000,00 sedang biaya operasional dan insentif bagi TPKd/k setinggi-tingginya Rp 4.000.000,00 dan insentif Fasilitator Desa setinggi-tingginya Rp 1.500.000,00 yang diambil dari BLMd/k dan ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa/kelurahan.





Keterangan :

DA-DPD : Daftar Alokasi Dana Pembangunan Daerah

KPKN : Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

PIMPRO : Pemimpin Proyek

KPL : Koordinator Pelaksana Lapangan

TPKd/k : Tim Pelaksana Kegiatan desa/kelurahan

POKMAS : Kelompok Masyarakat

-----> : Aliran Dana

-----> : Aliran Pengajuan Dokumen Pencairan/Penarikan Dana

Gambar 3. Mekanisme Pengajuan Dokumen Penarikan/Pencairan Dana

Bantuan PDM-DKE merupakan bantuan langsung yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan ini bersifat hibah bergulir (*revolving grant*) yang digunakan untuk investasi ekonomi yang menghasilkan dana bergulir dan kegiatan pengembangan kemampuan masyarakat. Sistem penyelenggaraan bantuan program PDM-DKE menempatkan mekanisme pembangunan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, menguntungkan semua pihak, dan dapat dikembangkan untuk pelaksanaan lebih lanjut. Pada prinsipnya dana PDM-DKE adalah dana milik masyarakat yang harus dinikmati oleh sebanyak-banyaknya masyarakat miskin di desa/kelurahan tersebut selamanya. Jadi setelah dana tersebut berada di desa/kelurahan, masyarakat di daerah tersebut mempunyai hak sepenuhnya dalam pengelolaan penggunaan dana tersebut sehingga prinsip otonomi benar-benar dapat diselenggarakan oleh jajaran aparat Pemda Dati II.

Pemahaman hakikat program PDM-DKE dilakukan melalui pemahaman hakikat program IDT, karena pada intinya program PDM-DKE mempunyai pendekatan yang sama dengan program IDT. Perbedaannya terletak pada sasaran penerima dan ruang lingkup pelaksanaan yang diperluas (Sumodiningrat, 1999). Sasaran penerima dana bantuan program PDM-DKE diperluas menjadi penduduk miskin, penduduk rentan krisis, dan penduduk yang menganggur akibat terkena dampak krisis. Ruang lingkup pelaksanaan juga diperluas dengan penambahan pembangunan sarana dan prasarana fisik ekonomi. Tabel 1 menyajikan perbandingan antara program IDT dengan program PDM-DKE.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tabel 1. Perbandingan Program IDT dengan Program PDM-DKE

Unsur Program	Program IDT	Program PDM-DKE
Ruang Lingkup	Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi desa, memenuhi kebutuhan pokok, menyediakan pelayanan dasar serta menciptakan suasana yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian modal usaha, latihan keterampilan, bimbingan, dan pendampingan.	Sama dengan IDT dan ditambah dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik yang mendukung ekonomi.
Sasaran Penerima	Penduduk miskin	Penduduk miskin, penduduk rentan krisis, dan penduduk yang menganggur akibat terkena dampak krisis.
Pendekatan	Partisipatif melalui perencanaan <i>bottom-up</i> , masyarakat bukan objek dari proyek pembangunan tetapi sebagai subjek.	Sama dengan IDT
Pelaksana	Lembaga Tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Propinsi dan Tingkat Pusat, serta didukung LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dll.	Sama dengan IDT
Status Dana	Dana hibah bergulir	Sama dengan IDT

Sumber : Sumodiningrat (1999) , Marina (1997) dan Anonymous (1999b)

Program IDT, P3DT, PPK dan PDM-DKE merupakan model pembangunan partisipasi. Pembangunan partisipasi mengutamakan pembangunan yang dikelola dan dilakukan langsung oleh masyarakat lokal, khususnya di pedesaan, dalam wadah musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan. Pembangunan partisipatif menekankan upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ditunjukkan dengan pelaksanaan program bantuan yang ditujukan kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan pemberdayaan aparat yang meliputi komponen-komponen masyarakat, antara lain lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan lainnya dan perguruan tinggi. Dalam hal ini peranan Tim Koordinasi/Pembina terutama di daerah tingkat II menjadi sangat penting sebagai wadah masyarakat pembangunan di daerah (Sumodiningrat, 1999).

Dari beberapa program pemberdayaan yang dikeluarkan pemerintah sejak dari program IDT sampai program PDM-DKE, ternyata program PDM-DKE merupakan program pembangunan partisipatif yang paling bagus dilihat dari aspek pemberdayaan. Perencanaan pada program PDM-DKE menggunakan pendekatan perencanaan alir bawah (*bottom-up*) dimana peran pemerintah lokal terutama pemerintah desa dalam menentukan bentuk kegiatan yang akan dilakukan sangat dominan dengan melihat potensi dan karakteristik daerahnya. Pemerintah pusat hanya memberikan petunjuk dan arahan sedangkan pengelolaannya diserahkan pada kebijakan pemerintah lokal. Sedangkan pada program pemberdayaan masyarakat lainnya, bentuk kegiatan program sudah ditentukan dari pusat sehingga pemerintah lokal tinggal menerapkannya.

2.3. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi masalah kehidupan yang bersifat kontroversial dan kompleks dalam era pembangunan ini. Kemiskinan telah terombang-ambing diantara pilihan untuk mendahulukan pertumbuhan atau pemerataan pembangunan dan hasilnya. Masalah ini telah menjawai pilihan bangsa Indonesia untuk mengutamakan stabilitas dan efektifitas pemerintahan atau dinamika kehidupan dan demokrasi. Persoalan kemiskinan telah merasuki pilihan diantara memberikan tanggung jawab penuh kepada negara dan pemerintah atau masyarakat bersama pemerintah. Persoalan kemiskinan semakin tenggelam di bawah pertarungan kepentingan intra dan antar lapisan menengah dan atas masyarakat untuk menguasai posisi, aset dan hasil pembangunan (Arbi Sanit, 1991).

Banyak perbedaan terjadi diantara para ilmuwan, perencana maupun politisi dalam memandang konsep kemiskinan. Perbedaan terletak pada penilaian tentang garis kemiskinan, sehingga tercipta perbedaan nilai relatif dan absolut dari kemiskinan tersebut, juga perbedaan dalam penilaian tentang cara penghitungan nilai, dimana garis kemiskinan itu harus ditempatkan. Disamping itu, ukuran kemiskinan yang



digunakan di suatu daerah tidak selalu sama dengan daerah lain karena sangat dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan tingkat kemajuan suatu masyarakat.

Walaupun ada perbedaan dalam konsep kemiskinan yang dikemukakan oleh banyak ahli, namun pada dasarnya ada beberapa kesamaan dalam melihat kemiskinan yakni ketidakmampuan pendapatan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan yang paling dasar yaitu pangan dan non pangan. Dalam kaitan ini Bank Dunia mendefinisikan keadaan miskin sebagai: *"Poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standards across the whole society"* (World Bank, 1990)". Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Dari sisi sini kemiskinan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Mardinus (1995), mengemukakan pengertian kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sementara batas kemiskinan absolut yang dapat dipergunakan yakni suatu kondisi dimana tingkat pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar fisik untuk makan, pakaian dan perumahan.

BPS (1993), memasukkan seseorang dalam kategori miskin apabila ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan sebagai batas kemiskinan. Batas/garis kemiskinan ini adalah nilai rupiah setara dengan 2100 kalori per kapita setelah ditambah dengan nilai rupiah dari beberapa kebutuhan non pangan yang essensial, seperti sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Kriteria batas garis kemiskinan penduduk yang dikemukakan Sajogyo dalam Sumodiningrat, dkk (1999) menggunakan satuan kilogram beras ekuivalen. Berdasarkan kriteria ini masyarakat dibedakan dalam beberapa kelompok :

1. Sangat miskin, apabila penghasilan per kapita per tahun di bawah setara dengan 240 kg beras untuk daerah pedesaan, dan 360 kg beras untuk daerah perkotaan.



2. Miskin, apabila penghasilan per kapita per tahun setara dengan 240 kg beras sampai 320 kg beras untuk daerah pedesaan, dan 360 kg beras sampai 480 kg beras untuk daerah perkotaan.
3. Hampi cukup, apabila penghasilan per kapita per tahun setara dengan 320 kg beras sampai 480 kg beras untuk daerah pedesaan, dan 480 kg beras sampai 720 kg beras untuk daerah perkotaan.
4. Cukup, apabila penghasilan per kapita per tahun di atas setara dengan 480 kg beras untuk daerah pedesaan, dan 720 kg beras untuk daerah perkotaan.

Menurut BKKBN (1996), keberadaan Keluarga Sejahtera digolongkan ke dalam lima tingkatan sebagai berikut : (1) Keluarga Pra Sejahtera (Pra S), yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan; (2) Keluarga Sejahtera I (KS I), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi; (3) Keluarga Sejahtera II (KS II), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya (*development needs*), seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi; (4) Keluarga Sejahtera III (KS III), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan; (5) Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Pengelompokan kriteria masing-masing tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada Lampiran 12.



Salim dalam Saharti (1998) mengemukakan lima karakteristik kemiskinan. Adapun karakteristik kemiskinan tersebut adalah:

1. Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri.
2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah.
4. Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas.
5. Banyak diantara mereka yang berusia relatif muda dan tidak memiliki keterampilan dan pendidikan.

M.G. Quibria (1993) dalam Sumodinigrat, dkk (1999) mengatakan ciri-ciri kemiskinan yaitu: pertama, kemiskinan lebih banyak ditemukan di daerah pedesaan daripada perkotaan. Kedua, kemiskinan berkorelasi positif dengan jumlah anggota keluarga dan berkorelasi negatif dengan jumlah pekerja dalam suatu keluarga. Ketiga, kemiskinan berkaitan dengan masalah budaya yang dinamis.

2.4. Konsep Pendapatan dan Pengeluaran

Menurut Penny dan Singarimbun dalam Ursula (1995), pendapatan adalah arus kesempatan untuk membuat pilihan-pilihan diantara berbagai alternatif penggunaan sumber-sumber yang langka. Artinya jika orang harus memanfaatkan suatu sumber untuk kelangsungan hidupnya sedangkan sumber kehidupan tersebut belum dapat dijangkau dalam pemanfaatannya seperti tanah yang belum digarap oleh manusia, maka tidak ada pilihan lain yang tersedia sebagai alternatif seperti berburu dan mengumpulkan hasil-hasil yang dapat diperoleh.

Atmakusuma dalam Marita (1998), mendefinisikan pendapatan rumah tangga sebagai total penerimaan dari satu rumah tangga dikurangi total pengeluarannya baik dari kegiatan usahatani maupun kegiatan luar usahatani dalam suatu periode tertentu.

Pendapatan keluarga terutama berasal dari dua sumber yaitu pendapatan dari usaha sendiri (pertanian dan non pertanian) dan pendapatan dari kegiatan berburuh. Pendapatan dari usaha sendiri terutama ditentukan oleh aset yang dimiliki (misalnya



luas tanah untuk usahatani dan besarnya modal untuk usaha non pertanian). Sedangkan pendapatan dari kegiatan berburuh terutama ditentukan oleh jumlah jam kerja dan tingkat upah (Mubyarto, 1985).

Sedangkan Nurmanaf dalam Sulaeman (1997), mengemukakan bahwa secara umum sumber pendapatan rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua yaitu: dari dalam sektor pertanian dan dari luar sektor pertanian. Sumber pendapatan sektor pertanian mencakup penerimaan yang berasal dari usahatani padi sawah, usahatani tanaman semusim (non padi), usahatani tanaman pekarangan dan tanaman tahunan, usaha perkebunan, usaha budidaya perikanan kolam, kegiatan buruh tani dan jasa tanah. Sedangkan sumber pendapatan dari luar sektor pertanian meliputi pendapatan yang berasal dari kegiatan perdagangan, usaha angkutan, industri rumah tangga dan kegiatan berburuh di luar pertanian. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan tersebut diidentifikasi sebagai persentase pendapatan masing-masing sumber terhadap total pendapatan dari masing-masing sumber terhadap total pendapatan rumah tangga.

Sumber pendapatan rumah tangga pada kegiatan pertanian di pedesaan pada umumnya berasal dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: usahatani padi sawah, kegiatan usahatani peternakan dan kolam, kegiatan usahatani di kebun dan pekarangan, dan kegiatan berburuh tani. Sedangkan sumber pendapatan dari kegiatan non pertanian berasal dari kegiatan dagang dan industri, pegawai dan jasa, dan berburuh di luar pertanian (Gunawan dan Sadikin dalam Arif, 1997). Pada rumah tangga di pedesaan, pendapatan dari sektor pertanian masih merupakan sumber pendapatan utama rumah tangga karena sebagian besar masyarakat masih bekerja di sektor pertanian.

Keragaman pekerjaan atau kombinasi pekerjaan di sektor pertanian dan non pertanian sering dijumpai di pedesaan, khususnya di Pulau Jawa. Hal ini disebut “Pola nafkah ganda”, yang merupakan suatu pola usaha dan bekerja di sektor pertanian dan non pertanian. Alasan yang melatarbelakangi pola nafkah ganda antara lain : **Pertama**, tidak cukupnya pendapatan di usahatani. **Kedua**, pekerjaan dan



pendapatan di usahatani umumnya amat musiman sehingga diperlukan waktu menunggu yang relatif lama sebelum hasil/pendapatan bisa dinikmati. Dalam situasi demikian, peranan pekerjaan yang memberikan pendapatan di luar pertanian sangat besar. Ketiga, usahatani banyak mengandung resiko dan ketidakpastian, misalnya panen gagal atau produksi merosot, dll. Dengan demikian masyarakat tidak hanya tergantung atau mengandalkan pendapatan pada sektor pertanian saja melainkan pendapatan dari sektor non pertanian juga dituntut untuk lebih berperan.

Tingkat pendapatan (*income*) dan tingkat pengeluaran (*expenditure*) rumah tangga adalah indikator untuk mengetahui tingkat hidup (*level of living*) rumah tangga tersebut (Townsend dalam Sajogya, 1983).

Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan. Pada tingkat pendapatan rumah tangga yang sangat rendah, pengeluaran rumah tangga lebih besar dari pendapatan, dalam hal ini berarti pengeluaran untuk konsumsi bukan hanya berasal dari pendapatan tetapi juga dari sumber-sumber lainnya; seperti tabungan, hutang, kiriman dan lain-lain. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga yang diterima, semakin tinggi pula konsumsi yang dilakukan. Pada tingkat pendapatan tertentu konsumsi rumah tangga akan sama dengan pendapatan rumah tangga. Jika pendapatan rumah tangga mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka rumah tangga tidak akan menggunakan seluruh pendapatan untuk konsumsi, berarti pengeluaran rumah tangga lebih rendah daripada pendapatan rumah tangga. Pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi merupakan tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga (Soekirno dalam Sjamsudin, 1988).

2.5. Hasil Studi Terdahulu

Penelitian mengenai pelaksanaan program PDM-DKE sudah dilakukan beberapa institusi. Pusat Studi Pembangunan (PSP) bekerja sama dengan JICA mengungkapkan bahwa meskipun pelaksanaan program-program pembangunan berbeda judul atau nama, namun tidak ada perubahan yang signifikan di dalamnya. Sebagai contoh, program IDT dan P3DT merupakan dua program pengentasan



kemiskinan sebelum terjadi krisis ekonomi. Setelah krisis ekonomi, ide-ide dari program IDT dan P3DT digabungkan dalam dua program yaitu: program PDM-DKE untuk daerah perkotaan dan PPK untuk daerah pedesaan. Kedua program tersebut berisikan pembangunan fisik dan ekonomi dimana pada penerapannya terdapat variasi dalam penentuan alokasi untuk kegiatan fisik dan ekonomi.

Namun demikian, terlihat bahwa tidak ada perbaikan konsep dalam penerapan program PDM-DKE dan PPK meskipun terdapat beberapa masalah yang dihadapi selama pelaksanaan program IDT, khususnya berhubungan dengan efektifitas dana bergulir.

P3R-YAE bekerja sama dengan Pemda Tingkat I Propinsi Jawa Barat melakukan pemantauan program PDM-DKE di wilayah Jawa Barat. Dari hasil penelitian diperoleh kenyataan bahwa program-program pembangunan terdahulu berdampak pada hilangnya keberdayaan komunitas desa yang ditunjukkan dengan pembangunan yang berciri *top-down*, paternalistik, sentralistik, mekanistik dan serba seragam dalam konteks komunitas desa yang sangat beragam, baik fisik-geografis, ekonomi, sosial dan budaya. Dialog dan proses partisipatif terabaikan, demi pencapaian target yang seringkali mengagungkan perubahan fisik-materi-artifisial dan mengesampingkan tumbuhnya jiwa-mental-kemandirian dan tanggung jawab. Jika ada banyak komunitas desa telah mengalami kemajuan fisik-material secara nyata akibat pembangunan, namun dibalik itu yang lebih sering terjadi sesungguhnya adalah kemandegan, kalau bukan kemunduran sosial. Kemunduran yang nyata terlihat dari memudarnya modal sosial komunitas desa, yakni melemahnya kemandirian (keswadayaan dan partisipasi) masyarakat, bersamaan dengan menguatnya ketergantungan komunitas desa pada bantuan dari luar.





III. KERANGKA PEMIKIRAN

Kemiskinan merupakan sebab dan sekaligus akibat, sehingga melahirkan konsep lingkaran kemiskinan. Lingkaran ini merupakan sari dari rangkaian berbagai kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan yang mengakibatkan suatu negara tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi atau terjebak dalam kondisi “*equilibrium of poverty*”. Konsep tersebut dikemukakan oleh Ragnar Nurske dalam Sukirno (1985) yang mengatakan bahwa suatu negara adalah miskin karena ia merupakan negara miskin (*A Country is poor, because it is poor*). Menurut pendapatnya, dalam lingkaran kemiskinan yang terpenting adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan kepada terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan di lain pihak adanya keinginan untuk menanam modal.

Kemiskinan diawali oleh faktor eksternal/struktural (ketidaksempurnaan pasar, pembangunan di bawah standar dan keterbelakangan) dan faktor internal pelaku pembangunan (kurangnya modal), yang kemudian menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas menyebabkan pendapatan riil menjadi rendah yang kemudian mengakibatkan rendahnya tingkat tabungan dan kemudian berujung pada rendahnya investasi. Alur tersebut kemudian kembali lagi pada titik awal, yaitu kurangnya modal, yang kemudian berputar kembali seperti semula (Lampiran 1).

Untuk memecahkan masalah kemiskinan, tidak ada jalan lain selain memutus tali lingkaran kemiskinan tersebut. Usaha pemecahan masalah kemiskinan harus mampu mengatasi permasalahan internal sekaligus masalah eksternal/struktural yang dihadapi oleh pelaku pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan tidak lepas dari kemampuan masyarakat untuk melaksanakan pembentukan modal (*capital formation*). Samuelson dan Nordhaus (1989), mengatakan bahwa *capital formation* merupakan tingkat kesanggupan masyarakat dalam



III. KERANGKA PEMIKIRAN

Kemiskinan merupakan sebab dan sekaligus akibat, sehingga melahirkan konsep lingkaran kemiskinan. Lingkaran ini merupakan sari dari rangkaian berbagai kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan yang mengakibatkan suatu negara tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi atau terjebak dalam kondisi “*equilibrium of poverty*”. Konsep tersebut dikemukakan oleh Ragnar Nurske dalam Sukirno (1985) yang mengatakan bahwa suatu negara adalah miskin karena ia merupakan negara miskin (*A Country is poor, because it is poor*). Menurut pendapatnya, dalam lingkaran kemiskinan yang terpenting adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan kepada terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan di lain pihak adanya keinginan untuk menanam modal.

Kemiskinan diawali oleh faktor eksternal/struktural (ketidaksempurnaan pasar, pembangunan di bawah standar dan keterbelakangan) dan faktor internal pelaku pembangunan (kurangnya modal), yang kemudian menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas menyebabkan pendapatan riil menjadi rendah yang kemudian mengakibatkan rendahnya tingkat tabungan dan kemudian berujung pada rendahnya investasi. Alur tersebut kemudian kembali lagi pada titik awal, yaitu kurangnya modal, yang kemudian berputar kembali seperti semula (Lampiran 1).

Untuk memecahkan masalah kemiskinan, tidak ada jalan lain selain memutuskan tali lingkaran kemiskinan tersebut. Usaha pemecahan masalah kemiskinan harus mampu mengatasi permasalahan internal sekaligus masalah eksternal/struktural yang dihadapi oleh pelaku pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan tidak lepas dari kemampuan masyarakat untuk melaksanakan pembentukan modal (*capital formation*). Samuelson dan Nordhaus (1989), mengatakan bahwa *capital formation* merupakan tingkat kesanggupan masyarakat dalam

menggunakan tabungan atau surplus yang tersedia untuk kegiatan produktif bagi keperluan masa depan. Tabungan atau surplus adalah hasil perputaran kegiatan ekonomi yakni produksi, distribusi dan konsumsi.

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, terbatasnya dana modal dan tabungan masyarakat yang dapat diciptakan untuk membiayai pembentukan modal merupakan suatu penghambat yang sangat penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah dan terbatasnya sektor moderen menyebabkan negara berkembang tersebut tidak mampu untuk mengumpulkan dana yang berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pemerintah yang rendah menyebabkan kemampuan sektor pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunannya juga sangat terbatas. Untuk membantu mengatasi hal-hal ini, negara-negara maju memberikan bantuan keuangan secara langsung maupun lewat badan-badan internasional (Sukitno, 1985).

Model ketidakberdayaan terhadap kemiskinan (*The (dis) empowerment model of poverty*) menitikberatkan pada pendekatan politik daripada pendekatan kebutuhan dasar, dimana berbagai kebutuhan dasar telah diidentifikasi berikut ukuran-ukuran kepuasannya yang merupakan proses utama dalam perencanaan. Titik awal model ketidakberdayaan terhadap kemiskinan adalah anggapan bahwa rumah tangga miskin kurang mempunyai kekuatan sosial (*social power*) untuk mengembangkan kondisi anggota keluarganya. Model tersebut menempatkan ekonomi rumah tangga pada pusat kekuatan sosial dimana menghubungkan ke berbagai dasar kekuatan sosial sehingga memungkinkan untuk diukur dan dibandingkan.

Pada model ketidakberdayaan terhadap kemiskinan pemberian bantuan modal bukan satu-satunya cara untuk mengurangi kemiskinan, karena masyarakat tidak hanya miskin modal tetapi juga kurang wawasan, keahlian/kemampuan serta informasi sehingga dibutuhkan peran dari suatu lembaga yang akan mengontrol pelaksanaan tindakan yang dilakukan (Lampiran 2).

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Dengan mengacu pada teori *capital formation* dan *the (dis) empowerment model of poverty* di atas, upaya pemerintah dalam pembangunan pedesaan perlu dikaitkan dengan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai dasar pemupukan modal, antara lain melalui pemberian bantuan dana sebagai modal usaha, pelatihan yang tepat, penerapan teknologi tepat guna, pembangunan sarana pendukung, penyediaan sarana penunjang, dan penguatan lembaga sebagai wadah usaha masyarakat (Haeruman, 1997).

Pemerintah melalui program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) memberikan bantuan modal yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan. Selain itu, pemerintah juga memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan program PDM-DKE, baik di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota yang disebut konsultan maupun di tingkat kecamatan dan desa yang disebut fasilitator. Agar penduduk miskin dan wilayah minus dapat ditolong maka kebijaksanaan pembangunan harus berorientasi pada tujuan kemakmuran dan harus dimotivasi serta dikendalikan dari bawah. Pendekatan pembangunan seperti ini disebut *bottom-up planning*.

Penyaluran dana bantuan program PDM-DKE menerapkan pendekatan bantuan langsung kepada masyarakat melalui mekanisme Daftar Alokasi Dana Pembangunan Daerah (DADPD). Dalam hal ini dana bantuan menjadi milik daerah sejak DADPD disahkan. Sejak dana bantuan berada di daerah, masyarakat di daerah tersebut memiliki hak sepenuhnya untuk mengelola dana tersebut sehingga prinsip otonomi daerah benar-benar dapat diselenggarakan oleh Pemda Dati II. Penyaluran dana bantuan seperti dalam Pedoman Umum Program PDM-DKE harus dilakukan secara cepat, langsung ke kelompok masyarakat (pokmas) penerima, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berkelanjutan (Gambar 3).

Dana program PDM-DKE merupakan modal bergulir yang dapat diartikan sebagai dana abadi dalam bentuk bantuan modal kepada rumah tangga miskin yang tergabung dalam kelompok masyarakat, yang tetap berada dan tumbuh berkembang di desa/kelurahan bersangkutan. Bagi anggota kelompok, dana tersebut merupakan



pinjaman yang harus dikembalikan kepada kelompok dan oleh kelompok kemudian dikembalikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan desa/kelurahan (TPKd/k). Melalui musyawarah desa/kelurahan dana yang telah dikembalikan kepada TPKd/k tersebut, dipinjamkan kembali kepada kelompok lain yang membutuhkan.

Bantuan modal bergulir digunakan sebagai modal usaha produktif yang dapat memperbesar skala usaha. Bantuan modal tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk membuka usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang telah ada dan tergantung potensi yang dimiliki masyarakat.

Pendampingan dan visi *bottom-up* yang diemban program PDM-DKE sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha yang didanai program PDM-DKE. Selain itu, pendampingan dan visi *bottom-up* juga berpengaruh pada alokasi dana bantuan program PDM-DKE. Pada perencanaan di desa, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam penentuan alokasi dana untuk kegiatan fisik maupun ekonomi. Dengan hadirnya pendamping, akan mengarahkan masyarakat dalam memutuskan kebijakan. Pendamping hanya memberikan informasi, arahan, bimbingan dan kemudahan bagi masyarakat dalam perencanaan dan tidak diperbolehkan ikut campur dalam pengambilan keputusan supaya keberadaan visi *bottom-up* tetap dipertahankan. Alokasi dana program PDM-DKE terdiri dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Bantuan Manajemen (BM) dan Bantuan Operasional dan Pengendalian (BOP). Besarnya alokasi dana BLM untuk kegiatan fisik dan ekonomi mempengaruhi besarnya bantuan modal yang diterima peserta program PDM-DKE. Semakin besar alokasi dana untuk kegiatan fisik maka semakin kecil alokasi dana untuk kegiatan ekonomi, dan begitu pula sebaliknya.

Dari segi kelembagaan, program PDM-DKE menekankan pentingnya peran Tim Koordinasi/Pembina di tingkat Pusat dan Daerah dalam mendampingi masyarakat melaksanakan program PDM-DKE. Pendamping adalah kader teknis dan kader pembangunan desa yang dapat didayagunakan dalam kegiatan pendampingan kelompok sasaran (Bappenas dalam Julianta, 1997). Fungsinya adalah melakukan bimbingan, penyuluhan dan memfasilitasi keperluan penduduk



miskin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Kebutuhan masyarakat miskin di pedesaan akan pendampingan diibaratkan sebagai anak yang baru bisa berjalan yang masih membutuhkan bimbingan. Kehadiran pendamping penting dalam perkembangan kelompok, namun demikian tingkat ketergantungan kelompok terhadap pendamping hendaknya berbanding terbalik dengan tahap pembentukan kelompok. Pada awal pertumbuhan kelompok, pendamping mutlak diperlukan karena pendamping merupakan salah satu faktor luar yang dapat meningkatkan keberhasilan kelompok. Tetapi dengan semakin berkembangnya kelompok, peran pendamping diharapkan akan semakin kecil. L.M. Kolopaking dan Fredian Tonny dalam Muchtar (1997), mengemukakan tiga strategi pendekatan pembangunan kelembagaan dan partisipasi yaitu ; Pendekatan pertama, kelembagaan moderen berperan sebagai “penguasa”, Pendekatan kedua, kelembagaan moderen berperan sebagai “pendidik”, dan Pendekatan ketiga, kelembagaan moderen sebagai “penasehat”. Ketiga pendekatan kelembagaan dan partisipasi tersebut dapat menjadi kerangka acuan dalam menentukan peran pendamping yang sesungguhnya dalam pelaksanaan program PDM-DKE.

Sumodiningrat (1999), mengatakan bahwa pada pendampingan masyarakat lokal di daerah melibatkan jajaran aparat Pemda yang tergabung dalam wadah Tim Koordinasi/Pembina yang dibantu oleh tenaga ahli dari unsur konsultan manajemen, perguruan tinggi, lembaga pengemban swadaya masyarakat (LPSM/LSM). Pembinaan yang dilakukan ditekankan pada prinsip pemberdayaan masyarakat.

Program PDM-DKE merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menggunakan pendekatan pembangunan partisipatif, dimana mekanisme perencanaannya adalah perencanaan alir bawah (*bottom-up*). Dalam pelaksanaannya masyarakat harus menjadi pelaku dalam pembangunan ekonomi dan berperan aktif. Konsep *bottom-up* pada hakekatnya dilatarbelakangi oleh upaya mengurangi atau menghilangkan kesenjangan (*gap*) antara pemerintah pusat dan masyarakat (tingkat desa) dalam mengambil keputusan. Pembangunan dari bawah merupakan suatu strategi pembangunan yang lebih dapat diterima dan merupakan refleksi dari wujud



perubahan ide dan maksud dari pembangunan itu sendiri, yang artinya bahwa pembangunan dari bawah inilah yang sebenarnya disebut pembangunan. Hanafiah dalam Simanjuntak (1995), mengatakan bahwa secara spesifik, pembangunan dari bawah dimaksudkan untuk (a) kontrol terhadap “*backwash effect*” sebagai dampak pembangunan dari atas, yaitu yang memerlukan hubungan timbal balik antar wilayah, antar pedesaan dan perkotaan serta antar regional dan nasional. ; dan (b) menumbuhkan kondisi yang dinamis di wilayah-wilayah yang lambat berkembang.

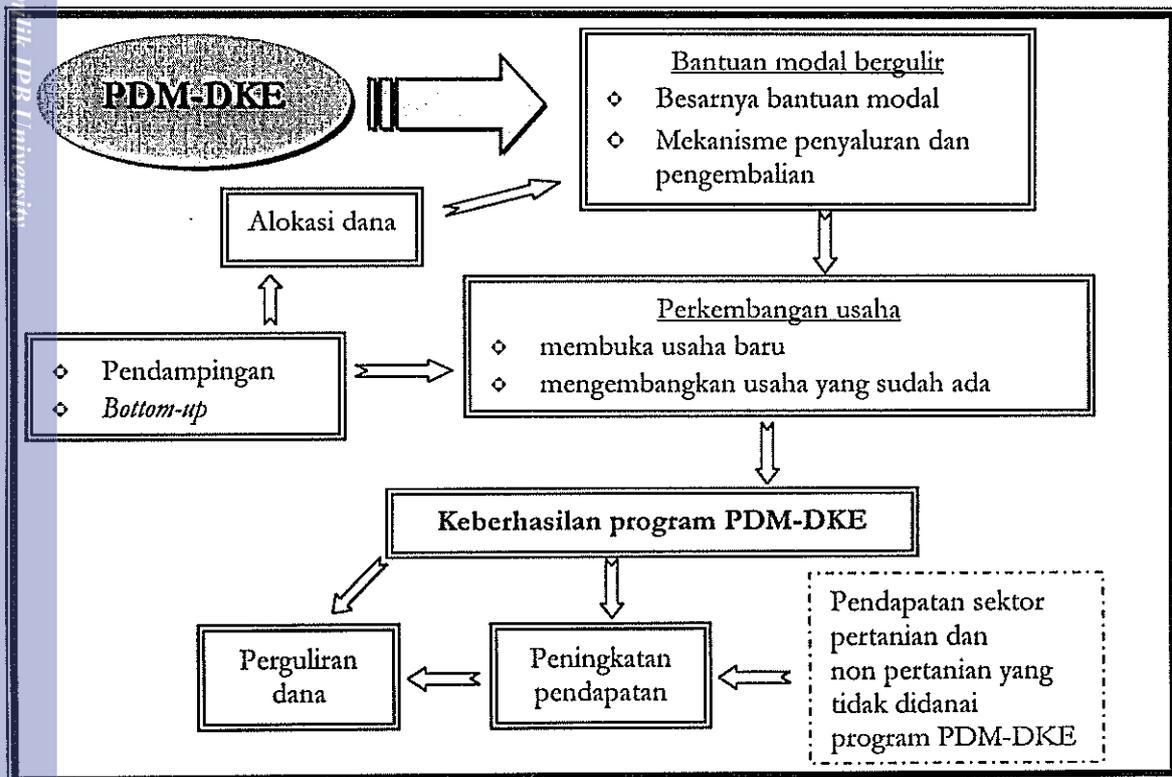
Pengalaman pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia pada awal Orde Baru merupakan kebijaksanaan dari pusat mengingat perekonomian Indonesia dan stabilisasi nasional pada saat itu memang masih buruk. Prioritas utama pembangunan diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Beberapa program yang merupakan kebijaksanaan pemerintah pusat antara lain program Bimbingan Masyarakat (BIMAS), Intensifikasi Masyarakat (INMAS), Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Inpres Reboisasi.

Sejak Pelita II pendekatan pembangunan *bottom-up* mulai dilaksanakan mengingat beragamnya kondisi perwilayahan yang ada. Program PDM-DKE membawa visi *bottom-up* yang diharapkan mampu menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri sehingga nantinya dapat memperbaiki kondisi dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Pada dasarnya tingkat pendapatan ditentukan oleh perkembangan usaha yang terjadi sehingga jika usaha berkembang, maka diharapkan tingkat pendapatan rumah tangga juga mengalami peningkatan. Sedangkan perkembangan usaha tersebut ditentukan pula oleh sumberdaya manusia yang mengelola, sehingga karakteristik penerima dana bantuan menunjang keberhasilan program; seperti umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusaha dan lain-lain. Selain itu, proses pelaksanaan program yang lancar juga memberikan dukungan dalam perkembangan usaha. Pendapatan yang meningkat dan berjalannya perguliran dana dengan lancar merupakan titik tolak keberhasilan program PDM-DKE. Tetapi peningkatan pendapatan ini apakah benar-benar dari adanya program PDM-DKE yang tepat

sasaran ataukah dari sumber pendapatan lainnya? Karena mungkin saja terjadinya peningkatan pendapatan bukan dari adanya program PDM-DKE, melainkan dari sektor pertanian atau sektor non pertanian yang tidak didanai program PDM-DKE yang semakin meningkat dengan membaiknya perekonomian bangsa Indonesia.

Kerangka pemikiran ini disajikan dalam bentuk bagan di bawah ini.



Gambar 4. Bagan Kerangka Pemikiran



IV. METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan berdasarkan pertimbangan bahwa desa Guworejo merupakan salah satu desa di kecamatan Karangmalang yang memperoleh dana PDM-DKE dan pelaksanaan serta administrasinya cukup baik.

Pelaksanaan penelitian di lapangan (pengumpulan data) dilakukan dari tanggal 28 Juni 2000 sampai dengan 28 Juli 2000. Alasan pemilihan waktu penelitian ini karena program PDM-DKE yang telah berjalan adalah program PDM-DKE tahun anggaran 1998/1999 dan sudah berakhir bulan Maret 1999. Sehingga dengan pemilihan waktu penelitian tersebut, ingatan responden mengenai pelaksanaan program ini masih cukup kuat.

4.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang berkaitan dengan penelitian. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara langsung dengan responden melalui panduan kuisisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya maupun wawancara secara bebas dengan penerima dana bantuan program PDM-DKE, pengurus TPKd/k, FD, pengurus LKMD, aparat desa, dan informan lainnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program PDM-DKE baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Data primer yang diperoleh dari responden penerima dana bantuan program PDM-DKE meliputi karakteristik responden (nama, jenis kelamin, umur, klasifikasi penerima bantuan, jumlah tanggungan, pekerjaan utama, pekerjaan sampingan,

pendidikan, pemilikan lahan dan penguasaan kekayaan), keragaan usaha yang dibiayai program, pandangan terhadap pelaksanaan program, keterlibatan dalam pelaksanaan program, serta pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Data sekunder meliputi laporan keuangan setiap RT, laporan pelaksanaan program di desa, laporan pertanggungjawaban program tingkat desa dan laporan pertanggungjawaban program tingkat kabupaten. Data penunjang lainnya adalah profil desa dan potensi desa.

4.3. Metode Penentuan Sampel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yang populasinya adalah penerima bantuan program PDM-DKE di desa Guworejo. Pengambilan unit sampel dilakukan pada kelompok masyarakat program PDM-DKE di desa Guworejo secara acak sederhana (*simple random sampling*) berdasarkan data penerima dana bantuan dari desa dan RT, dimana kelompok masyarakat tersebut adalah kelompok RT. Jumlah responden yang diambil adalah 30 orang dari penerima dana bantuan program PDM-DKE Tahun Anggaran 1998/1999.

4.4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data primer dan sekunder dianalisis dengan analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif yang berupa analisis deskriptif tabulasi sederhana dipergunakan untuk mengetahui :

- (1) Pelaksanaan program PDM-DKE di tingkat desa Guworejo dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan pelestarian.
- (2) Pelaksanaan visi *bottom-up* oleh pemerintah desa dan masyarakat desa Guworejo dan pendampingan yang dilakukan oleh Fasilitator Desa.

Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh bantuan program PDM-DKE terhadap perkembangan usaha dan pendapatan peserta program PDM-DKE.

Untuk menganalisis perubahan pendapatan usaha yang didanai bantuan program PDM-DKE dan variabel-variabel yang mempengaruhinya digunakan regresi linier berganda. Pengujian dilakukan dengan bantuan program komputer *Minitab 11*.

Model fungsi regresi yang dipakai untuk menganalisis data ditulis sebagai berikut :

$$Y^* = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_5x_5 + b_6x_6 + b_7x_7 + b_8x_8 + b_9x_9 + b_{10}x_{10} \dots \quad (1)$$

Keterangan : Y^* = Perubahan pendapatan usaha yang didanai bantuan program PDM-DKE

b_0 = Intersep

b_1 - b_{10} = Koefisien regresi

x_1 = Umur (Tahun)

x_2 = Tingkat pendidikan (Tahun)

x_3 = Jumlah tanggungan keluarga (Jiwa)

x_4 = Tenaga kerja (Jiwa)

x_5 = Lama berusaha (Tahun)

x_6 = Jumlah pinjaman (Rp)

x_7 = Tingkat bunga (%)

x_8 = Perubahan output (Rp)

x_9 = Jenis Kelamin (0 = perempuan ; 1 = laki-laki)

x_{10} = Jumlah modal (Rp)

x_{11} = Perubahan waktu kerja x_{12} = jumlah pinjaman & edlampiy

Selanjutnya untuk menguji apakah model yang digunakan untuk menduga peubah signifikan atau tidak, dilakukan pengujian serentak seluruh variabel dugaan.

Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : Seluruh variabel bebas dalam model tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga peserta program PDM-DKE.

H_1 : Sedikitnya ada satu variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga peserta program PDM-DKE.

Untuk pengujian hipotesis di atas digunakan uji statistik menurut sebaran F, yaitu :

$$F_{hitung} = \frac{SSR/(k-1)}{SSE/(n-k)} \dots \dots \dots \quad (2)$$

Dimana : SSR = jumlah kuadrat residual

SSE = jumlah kuadrat yang dijelaskan

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel

Jika F_{hitung} lebih besar dibandingkan F_{tabel} , maka tolak H_0 dan terima H_1 .

Sedangkan untuk mengetahui lebih jelas variabel-variabel mana yang berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas, dilakukan uji-t, dengan mempergunakan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : masing-masing variabel dalam model tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga peserta program PDM-DKE.

H_1 : masing-masing variabel dalam model berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga peserta program PDM-DKE.

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan uji statistik t_{hitung} sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{S_{\beta_i}} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana : β = nilai dugaan koefisien regresi ke-i
 S_{β_i} = standar deviasi koefisien regresi ke-i

Jika t_{hitung} lebih besar dibandingkan t_{tabel} , maka tolak H_0 dan terima H_1 .

Untuk menunjukkan seberapa besar variabel-variabel bebas secara bersama-sama dapat menerangkan variabel tidak bebas digunakan koefisien determinasi (R^2). Dalam analisis regresi linier berganda koefisien determinasi yang dilihat adalah koefisien determinasi yang terkoreksi (R^2_{adj}). Koefisien determinasi terkoreksi dirumuskan sebagai berikut :

$$R^2_{adj} = 1 - \frac{(1-R^2) (n-1)}{(n-k)} \dots\dots\dots (4)$$

Nilai R^2_{adj} ini terletak antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model cukup bagus, karena variabel-variabel bebas secara bersama-sama dapat menerangkan hampir seratus persen keragaman dari peubah tidak bebas.

Untuk melihat apakah dalam persamaan yang diduga terdapat hubungan linier antar peubah bebasnya digunakan uji multikolinier. Uji multikolinier dengan uji Marquardt dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) pada masing-masing peubah bebasnya. Jika nilai VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa persamaan

tersebut tidak mengalami multikolinier. Sebaliknya jika nilai VIF peubah bebasnya lebih besar dari 10 menunjukkan persamaan tersebut masih mengalami multikolinier.

Untuk menganalisis perkembangan usaha selain digunakan analisis regresi linier berganda, juga digunakan analisis kuantitatif sederhana dan kemudian ditabulasikan yaitu dengan menganalisis perkembangan usaha sebelum dan sesudah program PDM-DKE dari segi total modal, volume produksi, jumlah tenaga kerja, pendapatan dan pemasaran (jangkauan pasar, kualitas dan kemasan).

Untuk menganalisis pengaruh bantuan program PDM-DKE terhadap pendapatan rumah tangga peserta program digunakan analisis pendapatan. Perubahan pendapatan rumah tangga (Y) dihitung dari selisih antara pendapatan akhir dengan pendapatan awal dengan mempertimbangkan indeks tahun dasar dengan harga konstan. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = \text{Pendapatan akhir} - \text{Pendapatan awal} \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan :

Y	= Perubahan pendapatan rumah tangga
Pendapatan akhir	= Pendapatan petani setelah menerima bantuan PDM-DKE (pendapatan tahun 2000)
Pendapatan awal	= Pendapatan petani sebelum menerima bantuan PDM-DKE (pendapatan tahun 1998)

Untuk mentransformasikan pendapatan awal ke nilai sekarang digunakan :

$$Pa_t = Pa (1+i)^n \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan :

Pa_t	= Nilai sekarang dari pendapatan awal
Pa	= Pendapatan awal
i	= Tingkat bunga
n	= Tahun

Untuk melihat pengaruh bantuan program PDM-DKE terhadap total pendapatan dengan membandingkan proporsi pendapatan tiap sektor ekonomi sebelum menerima bantuan program PDM-DKE (Tahun 1997) dan sesudah menerima bantuan program PDM-DKE (Tahun 2000). Penghitungan proporsi menggunakan program *Excell* yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel.

4.5. Definisi Operasional

1. Pendapatan Rumah Tangga Petani (Rp/th) adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh petani dari seluruh sumber pendapatan yang dimiliki, baik dari usaha yang didanai program PDM-DKE maupun dari usaha yang tidak didanai PDM-DKE selama satu tahun.
2. Pendapatan Awal (Rp/th) adalah pendapatan rumah tangga petani sebelum memperoleh dana PDM-DKE, yang berasal dari seluruh sumber pendapatan yang dimiliki petani selama satu tahun.
3. Pendapatan Akhir (Rp/th) adalah pendapatan rumah tangga petani setelah menerima dana PDM-DKE, yang berasal dari seluruh sumber pendapatan yang dimiliki petani baik dari usaha yang didanai program PDM-DKE maupun dari usaha yang tidak didanai program PDM-DKE selama satu tahun.
4. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga (Rp/th) adalah selisih antara pendapatan akhir dan pendapatan awal, dimana pendapatan awal terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam nilai sekarang.
5. Perubahan pendapatan usaha yang didanai bantuan program PDM-DKE (Rp/th) adalah perubahan pendapatan pada usaha yang mendapat dana bantuan modal program PDM-DKE bisa tergolong sektor pertanian atau tergolong sektor non pertanian selama satu tahun.
6. Umur (Tahun) adalah satuan hidup penerima yang diukur dalam tahun.
7. Tingkat pendidikan (Tahun) adalah pendidikan formal yang pernah diikuti di sekolah atau lembaga formal, seperti SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Lamanya diukur dengan jumlah tahun seseorang menjalani pendidikannya.
8. Jumlah tanggungan keluarga (Jiwa) adalah banyaknya anggota keluarga yang masih dibiayai dan tinggal bersama kepala keluarga.
9. Tenaga kerja (Jiwa) adalah jumlah total tenaga kerja yang membantu responden dalam menjalankan usahanya.
10. Lama usaha (Tahun) adalah pengalaman penerima dana bantuan dalam menjalankan usahanya.

@Hak Cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

11. Jumlah pinjaman (Rp) adalah banyaknya dana bantuan yang diterima masyarakat yang digunakan sebagai modal usaha.
12. Tingkat bunga (%) adalah tingkat pengembalian pinjaman yang ditetapkan secara musyawarah.
13. Perubahan output (Rp) adalah selisih output dari usaha yang didanai program PDM-DKE pada tahun 1998 dan 2000.
14. Jenis kelamin dibedakan, yakni 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki.
15. Jumlah modal (Rp) adalah besarnya modal yang digunakan pada usaha yang didanai program PDM-DKE.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



V. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

5.1. Lokasi dan Kondisi Geografis

Desa Guworejo merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, dimana secara geografis kabupaten Sragen terletak diantara $110,45^0$ BT – $111,10^0$ BT dan $7,15^0$ LS – $7,30^0$ LS. Wilayah administratif kabupaten Sragen dibagi menjadi 4 Wilayah Pembantu Bupati dan meliputi 20 kecamatan dan 207 desa/kelurahan.

Desa Guworejo adalah salah satu dari 10 desa yang terdapat di wilayah kecamatan Karangmalang. Jarak desa Guworejo ke ibukota kecamatan adalah 3 km ke arah Timur yang ditempuh selama 30 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor, sementara jarak desa Guworejo ke ibukota kabupaten adalah 3 km ke arah Utara dengan waktu 30 menit dengan mengendarai kendaraan bermotor dan jarak desa Guworejo ke ibukota propinsi sekitar 123 km yang ditempuh antara 4-6 jam dengan menggunakan bus umum. Dari jarak tersebut terlihat bahwa desa Guworejo tidak termasuk dalam desa yang terpencil, karena letaknya yang masih dekat dan mudah dijangkau dari ibukota kecamatan dan kabupaten. Selain itu, desa Guworejo juga dilewati jalan kabupaten sepanjang 5 km. Dengan demikian perhubungan dari desa Guworejo ke kabupaten cukup lancar.

Berdasarkan letak administratif, desa Guworejo berbatasan dengan desa Kroyo di sebelah Utara, desa Wonokroso di sebelah Selatan, desa Plosokerep di sebelah Barat, dan desa Puro di sebelah Timur. Desa Guworejo terbagi ke dalam 3 dusun, yaitu Plosorejo, Guworejo serta Jimbar, dan terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) serta 29 Rukun Tetangga (RT). Untuk lebih jelas, letak desa penelitian dapat dilihat pada Lampiran 4.

Kondisi topografi desa Guworejo secara umum adalah berupa dataran dengan ketinggian 25 meter dari permukaan laut. Sedangkan curah hujan rata-rata per tahun diperkirakan 150 mm/tahun dengan suhu udara berkisar 35^0 C.

Desa Guworejo memiliki luas wilayah 435,7885 ha, dengan proporsi penggunaan tanah terbesar secara berturut-turut adalah untuk sawah irigasi ½ teknis yaitu sebesar 209,6395 (48,11 persen) dan untuk pekarangan/bangunan seluas 114,7425 ha (26,33 persen). Perincian mengenai masing-masing jenis penggunaan tanah dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Jenis-jenis Penggunaan Tanah di Desa Guworejo.

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Tanah kering :		
	a. Pekarangan/bangunan	114,7425	26,33
	b. Tegak/kebun	4,0250	0,92
	c. Ladang penggembalaan	0,8055	0,18
2	Tanah Perkebunan (Perkebunan negara)	92,2460	21,17
3	Tanah sawah (Irigasi ½ teknis)	209,6395	48,11
4	Tanah keperluan fasilitas umum :		
	a. Lapangan olahraga	1,0250	0,24
	b. Kuburan	3,5550	0,82
5	Jalan dan sungai	9,7500	2,23
Total		435,7885	100,00

Sumber : Monografi desa Guworejo (1999)

5.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Ditinjau dari ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan desa Guworejo terkesan sebagai desa yang sudah maju. Hal tersebut bisa dilihat dari tersedianya keberadaan prasarana ekonomi seperti pasar desa, transportasi dan komunikasi yang lancar, sarana pendidikan dari SD sampai dengan SMP, dan penggunaan PAM bagi sejumlah penduduk untuk memenuhi air minum. Namun, jika dilihat dari bangunan rumah penduduk, masih banyak rumah yang tidak permanen.

Bangunan rumah di desa Guworejo seluruhnya berjumlah 1.355 buah. Kondisi bangunan rumah penduduk disajikan dalam Tabel 3. Jenis rumahnya yaitu

rumah permanen (Tipe A) 161 buah, rumah semi permanen (Tipe B) sebanyak 89 buah dan rumah tidak permanen berjumlah 1.105 buah. Kondisi bangunan rumah penduduk masih banyak yang tidak permanen (81,55 persen), namun demikian sudah layak huni dan sanitasinya cukup baik.

Tabel 3. Kondisi Bangunan Rumah Penduduk Desa Guworejo

No	Jenis Bangunan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tipe A (permanen)	161	11,88
2	Tipe B (semi permanen)	89	6,57
3	Tipe C (tidak permanen)	1.105	81,55
Total		1.355	100,00

Sumber : Data Monografi desa Guworejo (1999)

Selain itu desa Guworejo memiliki Balai Desa yang kondisi fisiknya masih tergolong baik. Balai Desa sering digunakan untuk pertemuan atau rapat yang mengikutsertakan tokoh masyarakat, tim penggerak PKK, anggota Karang Taruna, masyarakat desa, dll. Di Balai Desa inilah masyarakat desa berkumpul dan membicarakan masa depan desa Guworejo. Desa Guworejo memiliki prasarana olahraga yang berupa lapangan sepakbola, lapangan bulu tangkis dan lapangan bola volley.

Desa Guworejo sudah mempunyai sarana belanja yang berupa pasar yang letaknya 100 meter dari Balai Desa dan akan segera dipindahkan di samping Balai Desa, 5 toko dan 22 warung/kios perorangan. Keberadaan pasar, toko dan kios tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa.

Prasarana transportasi seperti jalan darat yang melewati desa Guworejo adalah jalan kabupaten sepanjang 5 km dan jalan desa 7 km. Sedangkan kondisi jalan aspal (22,5 km), jalan batu (2,5 km), dan jalan tanah (0,5 km) sudah mulai rusak. Meskipun kondisi jalan sudah mulai rusak, namun transportasi masih tergolong baik dan lancar, hal ini terbukti dengan adanya fasilitas angkutan desa yang setiap saat selalu ada.

Selain menggunakan angkutan umum, masyarakat sebagian besar masih menggunakan sepeda.

Dalam hal sarana komunikasi hanya ada 2 pesawat telepon, sedangkan sarana informasi berupa televisi milik pribadi dan radio. Berdasarkan data profil desa tahun 1999, jumlah pesawat televisi yang dimiliki oleh masyarakat desa Guworejo sebanyak 512 buah dan pesawat radio sebanyak 679 buah (Tabel 4). Dengan demikian masyarakat desa Guworejo sudah cukup maju, karena mereka tidak hanya menggunakan sarana radio saja sebagai informasi tetapi juga telah menggunakan sarana televisi untuk melihat dan mengetahui perkembangan dan kemajuan dunia.

Tabel 4. Jumlah Pemilik Sarana Informasi di Desa Guworejo

No	Sarana Komunikasi	Jumlah (buah)
1	Televisi	512
2	Radio	679
Total		1.191

Sumber : Potensi desa Guworejo (1999)

Sarana pendidikan yang ada di desa Guworejo mulai dari TK sampai SLTP sehingga desa Guworejo dapat dikatakan desa yang sudah sadar pentingnya pendidikan karena fasilitas pendidikan sudah tersedia. Jumlah TK sebanyak 4, SD ada 4 dimana kondisinya sudah mulai rusak dan SMP sebanyak 2. Sedangkan sarana peribadatan yang ada adalah masjid sebanyak 8 dan 2 langgar. Selain itu juga terdapat 6 majelis taklim yang digunakan untuk belajar ilmu agama dengan murid 210 orang.

Untuk memelihara kesehatan ibu hamil, ibu menyusui dan balita, terdapat posyandu yang mengadakan pemeriksaan sebulan sekali. Selain itu, di desa Guworejo juga ada seorang dokter umum, 2 orang bidan, seorang mantri kesehatan, seorang perawat, dan dukun bayi yang bersertifikat berjumlah 4 orang. Dengan melihat adanya dokter dan bidan, menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat desa Guworejo sangat diperhatikan.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat menggunakan sumur gali, sumur pompa, dan PAM. Sebagian besar mereka menggunakan sumur gali, dimana jumlah sumur gali yang ada adalah 368 buah. Sedangkan masyarakat yang menggunakan sumur pompa adalah 8 orang dan yang memasang PAM adalah 49 orang.

5.3. Kondisi Demografi

Pada akhir tahun 1999 penduduk desa Guworejo tercatat berjumlah 3.987 jiwa dan terdiri 884 KK. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan umur dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5 menunjukkan komposisi penduduk desa Guworejo menurut jenis kelamin terdiri dari 1.944 laki-laki (48,76 persen) dan 2.043 perempuan (51,24 persen). Jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan ternyata lebih banyak daripada laki-laki, dan dalam hal ini perempuan mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian dimana perempuan di desa Guworejo kebanyakan bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Kaum perempuan memberikan sumbangan yang besar terhadap penghasilan rumah tangga meskipun penghasilan yang mereka peroleh bukan merupakan penghasilan utama rumah tangga melainkan sebagai penghasilan tambahan.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Guworejo Menurut Jenis Kelamin (Tahun 1999)

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	1.944	48,76
Perempuan	2.043	51,24
Total	3.983	100,00

Sumber : Potensi desa Guworejo (1999)

Penduduk desa Guworejo yang berusia produktif (15-49 tahun) sebesar 54,77 persen. Sedangkan sisanya sebesar 45,23 persen merupakan penduduk yang tidak produktif. Dengan melihat hasil tersebut, penduduk usia produktif dan tidak produktif mempunyai selisih yang tidak banyak sehingga hampir seimbang. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Guworejo Menurut Umur (Tahun 1999)

Umur	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
0-12 bulan	72	1,81
13 bulan-4 tahun	218	5,47
5-6 tahun	103	2,58
7-12 tahun	457	11,46
13-15 tahun	363	9,11
16-18 tahun	283	7,10
19-25 tahun	550	13,79
26-35 tahun	679	17,03
36-45 tahun	518	12,99
46-50 tahun	154	3,86
51-60 tahun	296	7,42
61-75 tahun	184	4,62
> 76 tahun	110	2,76
Total	3.987	100,00

Sumber : Potensi desa Guworejo (1999)

Kondisi tingkat pendidikan di desa Guworejo sudah cukup bagus, ini ditunjukkan dengan komposisi pendidikan penduduk yang sudah seimbang antara penduduk yang tamat SD, tamat SMP dan tamat SMA. Menurut tingkat pendidikan, 35,34 persen masyarakat desa Guworejo berpendidikan SD atau yang sederajat (932 jiwa). Selain itu masyarakat yang buta aksara dan angka sudah tidak ada lagi, sedangkan yang tidak tamat SD sekitar 15,17 persen (Tabel 7). Masyarakat generasi tua pada umumnya hanya berpendidikan tidak tamat SD atau tamat SD saja.

Sedangkan pada umumnya generasi muda sudah berpendidikan minimal tamat SMP. Hal ini menunjukkan kualitas pendidikan masyarakat desa Guworejo sudah mengalami perbaikan.

Tabel 7. Kualitas Penduduk Desa Guworejo Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (Tahun 1999)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Belum sekolah	-	-
2	Tidak Tamat SD	400	15,17
3	Tamat SD	932	35,34
4	Tamat SMP	641	24,31
5	Tamat SMA	636	24,12
6	Tamat Akademi (D1-D3)	28	1,06
7	Tamat Perguruan Tinggi	-	-
8	Buta huruf	-	-
Total		2.627	100,00

Sumber : Profil desa Guworejo (1999)

Selama tahun 1999 penduduk desa Guworejo mengalami perubahan jumlah penduduk sebesar 91 jiwa. Penduduk yang lahir sejumlah 72 jiwa sedangkan yang meninggal sejumlah 31 jiwa. Selain itu penduduk yang migrasi datang adalah 5 jiwa dan migrasi keluar adalah 7 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8. Penduduk yang datang merupakan penduduk yang pindah dari desa lain ataupun datang dari merantau di luar kota. Sedangkan penduduk yang keluar dari desa Guworejo adalah mereka yang bekerja di luar kota atau merantau ke luar Jawa dan penduduk yang pindah ke desa lain karena menikah dengan orang desa lain. Dengan melihat sedikitnya penduduk yang migrasi, bukan berarti desa Guworejo merupakan desa yang makmur yang bisa sebagai tumpuan masyarakat. Hal ini terjadi karena sebagian besar penduduk desa Guworejo adalah komuter dimana mereka berangkat pagi untuk bekerja di luar desa Guworejo dan kembali lagi sore hari.

Tabel 8. Perubahan Jumlah Penduduk (Tahun 1999)

No	Perubahan	Jumlah (Jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
1	Lahir	34	38
2	Meninggal Dunia	14	17
3	Penduduk Datang	2	3
4	Penduduk Pergi	3	4

Sumber : Profil desa Guworejo (1999)

Penduduk desa Guworejo sebagian besar bekerja sebagai buruh tani, yaitu sebesar 1.546 jiwa (62,34 persen), yang lainnya adalah petani penggarap tanah (19,28 persen), buruh bangunan (8,15 persen), PNS (5,23 persen), buruh industri (2,37 persen) dan sisanya sebesar 2,63 persen adalah pengrajin, perkebunan, pedagang, ABRI dan pensiunan. Komposisi penduduk berdasarkan pekerjaannya dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Komposisi Penduduk Desa Guworejo Menurut Mata Pencaharian Utama (Tahun 1999)

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani penggarap tanah	478	19,28
2	Pengrajin/industri kecil	10	0,40
3	Buruh tani	1.546	6,34
4	Buruh industri	59	2,37
5	Buruh bangunan	202	8,15
6	Perkebunan besar/kecil	15	0,60
7	Pedagang	8	0,32
8	PNS	130	5,23
9	ABRI	3	0,12
10	Pensiunan (PNS/ABRI)	34	1,37
Total		2.480	100,00

Sumber : Monografi desa Guworejo (1999)

Masyarakat desa Guworejo sebagian besar mempunyai pola nafkah ganda, yaitu suatu pola usaha dan bekerja di sektor pertanian dan non pertanian. Hal ini terjadi karena pendapatan mereka dari usahatani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu pekerjaan dan pendapatan dari usahatani pada umumnya musiman sehingga diperlukan waktu untuk menunggu hasil/pendapatan yang relatif lama. Mereka yang bekerja sebagai buruh tani hanya bekerja pada saat masa tanam dan masa panen saja yaitu sekitar 3 bulan dalam sekali masa tanam. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai buruh tani perkebunan tebu yang ada di desa Guworejo. Tingkat upah buruh tani laki-laki sebesar Rp 7.000,00 sedangkan buruh perempuan sebesar Rp 5.000,00. Dengan keadaan yang demikian, peranan sektor non pertanian sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan.

Sektor non pertanian yang cukup banyak diminati masyarakat selama menunggu masa panen adalah buruh bangunan (8,15 persen). Hal ini dikarenakan upah pada buruh bangunan cukup besar yaitu antara Rp 10.000,00 sampai Rp 15.000,00. Disamping itu pekerjaan ini tidak mengharuskan mereka untuk tiap hari bekerja dan selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu, masyarakat juga memilih berdagang kecil-kecilan seperti membuka warung.

Masyarakat desa Guworejo ada yang bekerja sebagai buruh industri (2,37 persen) di pabrik gula, karena letak Pabrik Gula Mojo berdekatan dengan desa Guworejo. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai buruh tekstil di kabupaten Karanganyar yang letaknya sebelah Selatan kabupaten Sragen. Warga yang bekerja pada pabrik gula sebagian besar adalah laki-laki dan bekerja hanya pada saat musim giling selama 3 bulan. Sedangkan yang bekerja pada pabrik tekstil sebagian besar adalah perempuan.

Masyarakat yang bekerja di bidang industri kecil hanya sedikit sekali yaitu 0,40 persen saja. Hal ini terjadi karena pada umumnya industri yang ada adalah industri rumah tangga yang hanya mempekerjakan anggota keluarga sendiri. Industri rumah tangga yang banyak dijumpai di desa Guworejo adalah industri emping melinjo, pembuatan tempe, dan krupuk kulit.



Desa Guworejo termasuk desa yang paling banyak mempunyai Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di kecamatan Karangmalang berdasarkan pendataan keluarga miskin tahun 2000, yaitu Keluarga Pra Sejahtera sejumlah 396 KK (44,8 persen dari total KK) dan Keluarga Sejahtera I sejumlah 151 KK (17,08 persen dari total KK).

Tabel 10. Jumlah Keluarga Miskin Desa Guworejo (Tahun 2000)

Kriteria Keluarga			Penyebab Kemiskinan			Strata	
Miskin	Miskin sekali	Jumlah	Tidak punya penghasilan	Penghasilan tidak cukup	Jumlah	Pra KS	KS I
541	6	547	343	204	547	369	151

Sumber : Rekap Data Keluarga Miskin Berdasarkan Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2000, Kecamatan Karangmalang

5.4. Kondisi Ekonomi

5.4.1. Pertanian

Bagi sebagian besar penduduk desa Guworejo pertanian merupakan sumber mata pencaharian pokok. Luas tanah yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian adalah seluas 209,6395 hektar sawah irigasi ½ teknis. Penduduk yang berkecimpung di bidang pertanian sebagian besar adalah buruh tani sejumlah 1.546 jiwa (62,34 persen) sedangkan petani pemilik lahan hanya sejumlah 478 jiwa (19,28 persen) atau secara kumulatif mencapai 81,62 persen.

Jenis tanaman pertanian yang diusahakan meliputi padi dan palawija. Sebelum ada Proyek Bengawan Solo, petani hanya mampu menanam padi 2 kali dalam setahun selanjutnya palawija. Setelah ada Proyek Bengawan Solo petani dapat menanam padi 3 kali dalam setahun tetapi ada juga petani yang tetap menanam padi-padi-palawija. Keberadaan proyek ini dirasa oleh masyarakat sangat membantu dalam hal pengairan, karena desa Guworejo termasuk desa yang kurang bagus pengairannya karena jauh dari sumber air, selain itu hasil panen yang diperoleh juga semakin meningkat. Hasil panen biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sendiri sisanya dijual untuk membeli benih, pupuk dan kebutuhan lainnya. Sebagian

besar masyarakat mempunyai kebun meskipun tidak terlalu luas dan letaknya di samping atau di belakang rumah. Kebun pada umumnya ditanami tanaman buah-buahan, singkong, kelapa, bahkan ada juga yang ditanami pohon jati. Hasil dari kebun ini hanya untuk konsumsi sendiri karena hasil yang diperoleh tidak banyak.

Selain itu ada sebagian kecil penduduk yang memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di rumah untuk budidaya ikan lele, ikan emas, dan ikan gurame. Tetapi ikan-ikan tersebut tidak untuk dijual melainkan hanya untuk kepentingan konsumsi keluarga saja.

5.4.2. Non Pertanian

Meskipun sektor non pertanian bukan mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat desa Guworejo, tetapi sektor non pertanian cukup besar memberikan sumbangan terhadap penghasilan rumah tangga. Masyarakat desa Guworejo tidak bisa hanya mengandalkan penghasilan dari sektor pertanian saja karena penghasilan mereka dari sektor pertanian hanya sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sektor non pertanian yang banyak berkembang di desa Guworejo adalah bidang perdagangan. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan dengan berdagang perputaran uang yang terjadi cepat sehingga cepat pula menghasilkan. Di bidang perdagangan ini warga memanfaatkan pasar yang berada di sebelah Balai Desa Guworejo untuk melakukan aktifitasnya di bidang ini. Selain itu ada yang membuka warung di rumah mereka sendiri tetapi ada juga yang berdagang di luar desa Guworejo. Jenis dagangan yang diusahakan meliputi sayuran, barang kebutuhan sehari-hari, makanan dan minuman, dan lain-lain dengan skala usaha yang kecil, dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 500.000,00 per bulan. Ada juga pedagang dengan skala usaha yang besar, mereka biasanya berdagang ke luar Pulau Jawa. Penghasilan mereka berkisar antara Rp 1.000.000,00 sampai Rp 2.000.000,00 sekali jalan. Biasanya mereka pergi berdagang selama 2 bulan kemudian kembali ke desa untuk istirahat dan mengambil barang dagangan selanjutnya.

Di bidang jasa khususnya bengkel sepeda, cukup memberikan sumbangan yang besar terhadap penghasilan rumah tangga masyarakat desa Guworejo. Usaha bengkel sepeda ataupun sepeda motor cukup banyak diminati masyarakat desa Guworejo karena cepat memberikan hasil. Selain membuka bengkel sepeda, biasanya mereka juga menjual sepeda bekas yang telah diperbaiki, ada juga yang sambil membuka kios bensin eceran dan warung kecil.

Selama krisis ekonomi banyak penduduk yang membuka pekerjaan baru, yaitu berjualan alat-alat kosmetik dengan berjalan dari rumah ke rumah di luar desa Guworejo. Pekerjaan ini dilakukan oleh perempuan pada hari minggu atau hari libur kerja, karena kebanyakan dari mereka adalah buruh pabrik. Pekerjaan ini cukup memberikan sumbangan terhadap penghasilan rumah tangga. Selain itu ada juga yang berjualan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari dengan berjalan kaki mengelilingi desa dengan sistem kredit, usaha ini sering disebut sebagai candak kulak. Pedagang hanya berjualan seminggu sekali sekaligus menagih uang pembayaran barang minggu lalu. Pekerjaan ini cukup memberikan hasil yang lumayan selain itu juga meringankan pembeli yang tidak punya uang sedangkan mereka sangat membutuhkan barang tersebut.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



VI. PELAKSANAAN PROGRAM PDM-DKE

6.1. Proses Pelaksanaan Program PDM-DKE

Pelaksanaan kegiatan program PDM-DKE Kabupaten Dati II Sragen Tahun Anggaran 1998/1999 dilaksanakan selama 120 (seratus duapuluh) hari kalender yaitu dimulai pada tanggal 14 November 1998 sampai 15 Maret 1999. Program PDM-DKE dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu :

6.1.1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ditunjukkan dengan sosialisasi program PDM-DKE, dimana sosialisasi merupakan dasar yang menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan program PDM-DKE. Sosialisasi merupakan proses penyadaran masyarakat untuk dapat hadir sebagai subyek pembangunan. Dengan situasi dan proses kemiskinan yang berbeda-beda, sosialisasi program yang tidak ditangani dengan baik menyebabkan upaya pembentukan ekonomi produktif, transformasi sosial dan penguatan stabilitas politik tidak berjalan seragam di seluruh daerah.

Tahap persiapan dilaksanakan mulai pertengahan November 1998 sampai dengan awal Desember 1998 atau sekitar 15 (lima belas) hari kalender. Sosialisasi program PDM-DKE dimulai dari tingkat kabupaten dan dilanjutkan di tingkat kecamatan. Sosialisasi program di tingkat kecamatan Karangmalang dihadiri oleh KMT-II, Bappeda Tingkat II Sragen, Camat dan aparatnya, Fasilitator Kecamatan (FK), Kepala Desa dan Ketua I LKMD dari seluruh desa di kecamatan Karangmalang. Pada sosialisasi tersebut membicarakan mengenai bantuan program PDM-DKE yang akan turun : a) latar belakang, tujuan dan sasaran pokok program, b) organisasi pelaksanaan dan pengelolaan program, c) tahap-tahap pelaksanaan program, d) pendanaan, dan e) evaluasi dan pelestarian. Sosialisasi dilaksanakan selama dua jam dengan pembicara dari KMT-II dan Bappeda Tingkat II Sragen. Materi sosialisasi sudah dapat diterima dengan jelas oleh pihak kecamatan dan peserta dari desa. Hanya saja, sosialisasi yang dilakukan relatif singkat yaitu selama 3 hari

sehingga pemahaman dan penguasaan materi secara mendalam masih kurang yang akhirnya kurang mampu mengembangkan materi di lapangan.

Setelah sosialisasi di tingkat kecamatan Karangmalang selesai, dilanjutkan sosialisasi di tingkat desa masing-masing. Sosialisasi program PDM-DKE di desa Guworejo dilaksanakan di Balai Desa yang dihadiri KMT-II, FK, Kepala Desa dan aparatnya, LKMD, LMD, Ketua RW/RT dan tokoh masyarakat. Sosialisasi di desa Guworejo dilaksanakan dua kali dengan lama waktu dua jam setiap pertemuan.

Sosialisasi di tingkat desa Guworejo yang pertama difasilitasi oleh Kepala Desa dan membicarakan mengenai pengenalan program PDM-DKE serta pemilihan TPKd/k dan FD. Sosialisasi ini dihadiri oleh KMT-II, FK, Kepala Desa dan aparatnya, LKMD, LMD, Ketua RW/RT dan tokoh masyarakat. Fasilitator Kecamatan memberikan penjelasan mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran program, organisasi pengelola program, tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan, pendanaan serta evaluasi dan perguliran. Proses pemilihan TPKd/k dilakukan melalui musyawarah mufakat yang dipandu oleh FK dimana sebelumnya dijelaskan tugas-tugas pengelola program tingkat desa tersebut. Ketua TPKd/k dijabat oleh Ketua I LKMD, yaitu Bapak Suparno yang sehari-harinya berprofesi sebagai guru SMP di desa Guworejo. Ketua I LKMD tersebut dikenal sebagai orang yang pandai bergaul, pandai dan cekatan yang terlihat dari cara menyampaikan materi dalam musyawarah dan laporan yang dibuat secara sistematis dan rapi. Sekretaris TPKd/k dijabat oleh Ketua Umum LKMD, yaitu Bapak Irfan yang juga berprofesi sebagai guru SMP dan mempunyai usaha toko kelontong yang lengkap dan maju. Bapak Irfan sangat disegani oleh warga di RT-nya karena kecakapannya dalam berorganisasi, keuletannya dalam berdagang dan disiplin. Bendahara Desa terpaksa harus menjabat sebagai Bendahara TPKd/k karena Bendahara LKMD tidak dapat melaksanakan tugas tersebut karena mempunyai pekerjaan yang banyak sehingga dikhawatirkan akan mengganggu jalannya alokasi dana bantuan. Pemilihan Bendahara Desa yaitu Bapak Siswanto menjadi Bendahara TPKd/k ini berdasarkan pengalaman kerja yang dikenal jujur dan cakap dalam menangani keuangan desa. Fasilitator Desa dijabat oleh Bapak



Maridin yang merupakan pensiunan guru SD. Terpilihnya Bapak Maridin sebagai FD karena ditunjuk oleh Fasilitator Kecamatan dengan mempertimbangkan bahwa Bapak Maridin merupakan sesepuh masyarakat desa Guworejo sehingga diharapkan dapat membimbing dan mendampingi masyarakat dalam melaksanakan program.

Pembentukan TPKd/k dan FD ini berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program PDM-DKE. Kriteria untuk TPKd/k adalah mempunyai kemampuan, bersedia mencurahkan waktu sesuai dengan waktu yang disepakati dalam musyawarah, jujur dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sedangkan kriteria untuk FD adalah mempunyai kemampuan dan kepemimpinan. Pemilihan TPKd/k didasarkan pada pengalaman bekerja dan kemampuan masing-masing pengurus. Sedangkan pemilihan FD dilakukan tidak berdasarkan musyawarah melainkan penunjukkan oleh FK, hal ini jelas menunjukkan pemilihan FD tidak secara demokratis. Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa susunan anggota TPKd/k dan FD tersebut sudah dapat mewakili kriteria yang sudah ditentukan, meskipun masih ada kekurangannya. Namun, banyak masyarakat yang merasa kurang puas dengan terpilihnya Bapak Maridin sebagai FD. Mereka beranggapan bahwa seharusnya yang menjabat sebagai FD adalah orang yang masih kuat dan sehat sehingga tidak mengganggu jalannya pelaksanaan program PDM-DKE.

Sosialisasi kedua tidak lagi difasilitasi oleh Kepala Desa melainkan sudah menjadi tanggung jawab TPKd/k. Sosialisasi kedua dihadiri oleh FK, LKMD, LMD, TPKd/k, FD, Kepala Desa dan aparatnya, Ketua RW/RT dan tokoh masyarakat. Dalam sosialisasi kedua ini Ketua TPKd/k dan FD sekali lagi menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran program, menentukan kriteria dan menentukan aturan perguliran. Cara penyampaian sosialisasi program PDM-DKE di tingkat desa bersifat instruktif dan kurang bersifat dialogis. Selain itu, materi sosialisasi berkisar pada buku Petunjuk Pelaksanaan Program PDM-DKE sehingga sosialisasi lebih ditekankan pada aspek teknis operasional. Penjelasan mengenai konsep program PDM-DKE yang menyangkut latar belakang lahirnya program, pengalokasian dana dan adanya pendampingan kurang dipahami oleh masyarakat desa Guworejo.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Sosialisasi program di desa Guworejo hanya terbatas pada aparat desa, Ketua RW/RT dan beberapa tokoh masyarakat, sehingga Ketua RW/RT mempunyai tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai program PDM-DKE kepada warga di RW/RT masing-masing. Sosialisasi kepada warga dilakukan pada saat pertemuan rutin bulanan dengan menghadirkan aparat desa dan TPKd/k serta FD sebagai pembina dan peserta yang hadir adalah semua warga di RT tersebut.

Sosialisasi di RT hanya dilakukan satu kali saja. Pihak yang memberikan penjelasan mengenai program PDM-DKE adalah Ketua RT, Pak Bayan dan kadang-kadang ada aparat desa, TPKd/k atau FD. Materi yang diberikan selama sosialisasi RT ini adalah pengenalan program kepada masyarakat (tujuan dan sasaran), pelaksanaan kegiatan program yang baik, menentukan calon penerima dana bantuan program PDM-DKE dan membentuk pengurus. Sosialisasi di RT dilaksanakan dengan waktu hanya dua jam dan bertempat di rumah ketua RT. Sosialisasi program di tingkat RT lebih terlihat dialogis dibandingkan saat di tingkat desa. Ketua RT yang sekaligus sebagai ketua kelompok memberikan tawaran kepada warganya untuk mengajukan dana pinjaman yang besarnya sudah ditentukan dari desa. Hampir semua warga hadir dalam sosialisasi tersebut karena acara dilakukan pada saat arisan rutin RT yang diikuti semua warga se-RT. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya sosialisasi antara lain, mereka bisa tahu akan ada dana bantuan dari pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk menambah modal usaha dengan bunga ringan. Selain itu, sosialisasi dapat menghindarkan dari kesalahan dalam pelaksanaan di kemudian harinya.

Dalam pelaksanaan sosialisasi ada sedikit permasalahan, yaitu adanya sekelompok kecil masyarakat yang tidak setuju dana bantuan program PDM-DKE digunakan untuk simpan pinjam yang harus dikembalikan lagi. Mereka beranggapan bahwa “bantuan” adalah pemberian dari pemerintah yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memerlukan modal dan tidak perlu dikembalikan kepada desa (LKMD). Ada juga masyarakat yang meminta dana bantuan tersebut dibagi rata kepada seluruh masyarakat seperti yang dilakukan desa sebelah (desa Kroyo). Namun

setelah melalui pendekatan secara kekeluargaan dan penjelasan yang lebih mendalam, mereka akhirnya mau mengerti dan menerima maksud dan tujuan dari program PDM-DKE. Kurangnya partisipasi semua anggota masyarakat dalam sosialisasi menyebabkan sosialisasi yang dilakukan terlalu cepat dan singkat, hal ini disebabkan masyarakat masih belum yakin adanya realisasi dari program PDM-DKE. Sosialisasi program yang tergesa-gesa tidak menimbulkan rasa memiliki. Hal ini terlihat dari pilihan anggota pada kegiatan ekonomi yang lebih cepat menghasilkan dan menguntungkan secara material tanpa mempertimbangkan prinsip keberlanjutan usaha. Selain itu, minimnya ketersediaan dana bagi desa Guworejo untuk menyelenggarakan sosialisasi juga sebagai penghambat sosialisasi.

6.1.2. Tahap Perencanaan

Setelah sosialisasi program PDM-DKE selesai, maka masuk tahapan selanjutnya yaitu tahap perencanaan yang dimulai dari awal Desember 1998 sampai dengan awal Januari 1999 atau sekitar 30 (tiga puluh) hari kalender. Tahap perencanaan di desa Guworejo meliputi pembuatan proposal pencairan dana BLMd/k, mengidentifikasi dan menetapkan calon penerima dana bantuan program PDM-DKE dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dan membuat aturan perguliran. Calon penerima dana bantuan program PDM-DKE ditentukan melalui musyawarah dengan menunjuk orang-orang yang sekiranya perlu dibantu terlebih dahulu dan didasarkan pada kriteria Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Pada Petunjuk Pelaksanaan Program PDM-DKE sudah ditetapkan sasaran penerima dana bantuan program, PDM-DKE yaitu penduduk miskin, miskin karena terkena krisis ekonomi, dan pengangguran. Pemilihan calon penerima dana bantuan ditentukan melalui musyawarah dan diberikan kepada keluarga yang termasuk kriteria Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Tidak ada persyaratan khusus untuk memperoleh dana bantuan program PDM-DKE, tetapi pihak TPKd/k desa Guworejo menambahkan persyaratan bahwa penerima dana bantuan harus mempunyai usaha produktif. Ketentuan tersebut menyebabkan masyarakat yang termasuk kriteria Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I tetapi tidak



mempunyai usaha produktif menjadi tersisihkan. Dengan demikian sasaran program PDM-DKE belum semuanya tercapai. Sedangkan pemilihan jenis usaha yang didanai berdasarkan usaha yang banyak dilakukan masyarakat desa Guworejo.

Untuk melaksanakan tahap perencanaan diselenggarakan Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa) di Balai Desa Guworejo. Musyawarah ini dihadiri oleh Kepala Desa dan aparatnya, TPKd/k, FD, LMD, Ketua RW/RT, dan tokoh masyarakat. Masyarakat desa tidak diikutsertakan dalam perencanaan sehingga sebagian besar masyarakat tidak tahu pengalokasian dana bantuan program PDM-DKE.

Dana BLMD/k yang diajukan dalam proposal sebesar Rp 42.687.940,00. Besar dana ini sebelumnya sudah ditetapkan di kecamatan Karangmalang yang diputuskan berdasarkan banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di desa Guworejo, sehingga besar dana bantuan yang diterima oleh masing-masing desa berbeda-beda. Data Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang digunakan untuk menentukan besarnya bantuan yang diterima diambil dari Rekap Data Keluarga Miskin Berdasarkan Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2000, Kecamatan Karangmalang. Pengajuan dana tahap I sebesar 70% dari total dana BLMD/k yaitu Rp 29.881.558,00 dan tahap II sebesar 30% dari total dana BLMD/k yaitu Rp 12.806.382,00.

Pembuatan proposal pencairan dana BLMD/k melalui perdebatan yang cukup panjang antara aparat desa dan TPKd/k. Pihak TPKd/k menghendaki dana bantuan digunakan untuk kegiatan ekonomi (simpan pinjam), sedangkan dari pihak aparat desa menghendaki dana bantuan tersebut dibelikan pompa air. Akhirnya setelah melalui musyawarah dengan KMT-II dan peserta yang lainnya, diputuskan bahwa dana bantuan digunakan untuk kegiatan ekonomi saja dengan pertimbangan supaya seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat adanya dana bantuan program PDM-DKE ini. Dalam proposal pencairan dana BLMD/k diajukan BLM kegiatan sebesar Rp 39.937.940,00, BOP sebesar Rp 2.000.000,00 dan insentif FD sebesar Rp 750.000,00.

Dalam proposal juga dicantumkan jenis usaha yang akan mendapatkan dana bantuan program PDM-DKE. Ada 7 kelompok usaha yang dikembangkan dan diberi bantuan modal yaitu usaha ternak ayam, candak kulak, warungan, bengkel sepeda/motor, penjahit, emping melinjo, dan pembuatan tempe. Pertimbangan pemilihan jenis usaha ini karena ketujuh usaha tersebut adalah usaha yang paling banyak dilakukan warga sebagai mata pencaharian utama maupun sampingan di desa Guworejo. Ketujuh kelompok usaha tersebut dijadikan kelompok masyarakat (pokmas) dimana dalam satu kelompok anggotanya mempunyai jenis usaha yang sama. Pada kelompok usaha ini tidak ada bentuk usaha bersama diantara anggotanya. Setiap anggotanya berusaha sendiri-sendiri berdasarkan usaha yang dijalankan. Pembentukan kelompok usaha ini diharapkan untuk memudahkan dalam pengontrolan dan pelaksanaan. Perincian mengenai alokasi dana untuk ketujuh usaha tersebut disajikan pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Jenis Usaha yang Didanai Program PDM-DKE T.A. 1998/1999 (dalam proposal)

Jenis Usaha	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah Penerima (Jiwa)	Jumlah Kelompok
Ternak ayam	13.000.000,00	26	1
Candak kulak	4.650.000,00	44	3
Warungan	5.237.000,00	35	2
Bengkel sepeda/motor	11.500.000,00	33	2
Penjahit	1.750.000,00	7	1
Emping melinjo	1.800.000,00	8	1
Tempe	2.000.000,00	8	1
Total	39.937.000,00	161	11

Sumber : Laporan pertanggungjawaban program PDM-DKE T.A. 1998/1999

Calon penerima diprioritaskan yang mempunyai usaha produktif sehingga bantuan ini dianggap sebagai tambahan modal usaha. Selain itu calon penerima harus masuk kriteria Keluarga Pra Sejahtera atau Keluarga Sejahtera I. Pemilihan calon

penerima diserahkan kepada kelompok masing-masing dengan mengajukan proposal kegiatan kelompok dan nama-nama calon penerima dana bantuan. Aturan perguliran diputuskan secara musyawarah pada saat musbangdes di tingkat desa, yaitu bunga pinjaman 1%, dengan cicilan sebulan sekali selama 10 bulan dan pengembalian dimulai 1 bulan setelah peminjaman. Aturan ini berlaku sama pada setiap kelompok usaha. Penentuan aturan perguliran tidak mengikutsertakan calon penerima dana bantuan karena hanya diputuskan oleh TPKd/k, FD, Kepala Desa, ketua RT/RW dan beberapa tokoh masyarakat.

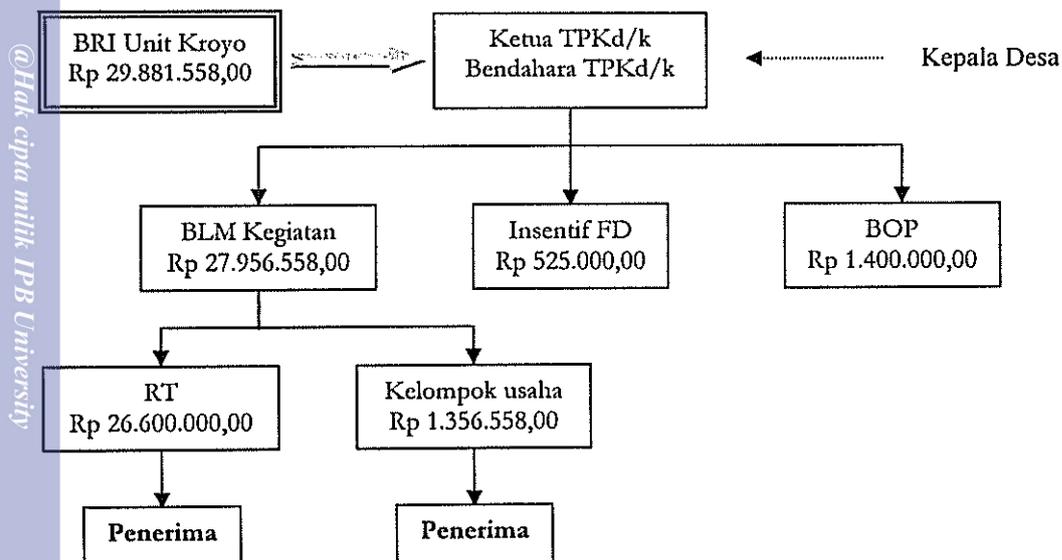
Pengajuan proposal dana bantuan tersebut tidak melibatkan masyarakat desa Guworejo secara keseluruhan, karena hanya dihadiri oleh Kepala Desa dan aparatnya, TPKd/k, FD, LMD, Ketua RW/RT, dan tokoh masyarakat. Selain itu hasil dari musyawarah tidak disebarluaskan sehingga masyarakat tidak ada yang tahu pengalokasian dana bantuan program PDM-DKE di desa Guworejo.

6.1.3. Tahap Pelaksanaan

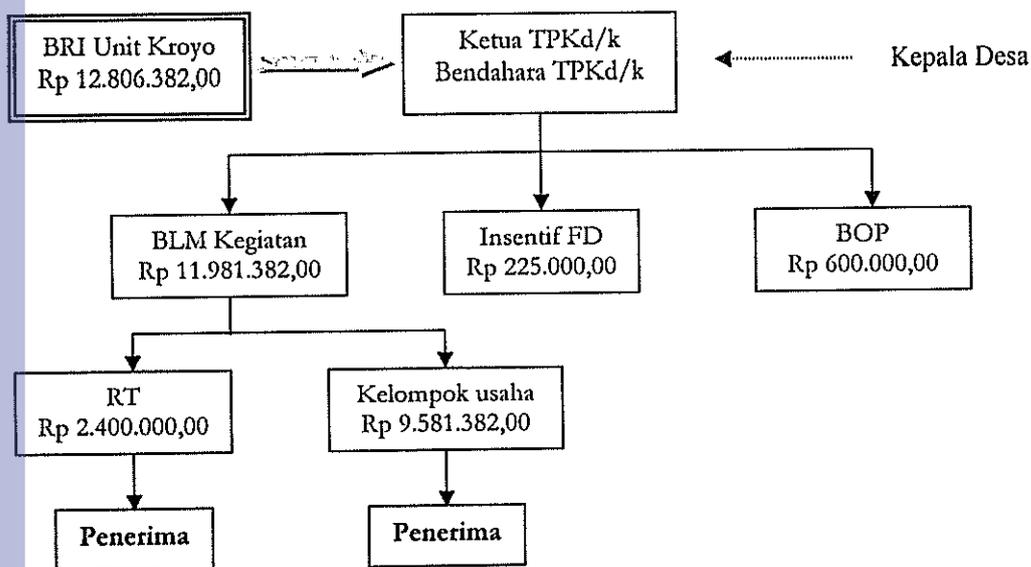
Tahap pelaksanaan dimulai awal Januari 1999 sampai dengan pertengahan Maret 1999. Pencairan dana BLMD/k oleh Ketua dan Bendahara TPKd/k dengan diketahui Kepala Desa Guworejo melalui BRI Unit Kroyo merupakan awal dari pelaksanaan program PDM-DKE. Pencairan dana BLMD/k melalui 2 tahap, yaitu tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar 30%. Pencairan dana dalam 2 tahap ini mengikuti ketentuan pencairan dana BLM pada Petunjuk Pelaksanaan Program PDM-DKE, yaitu Tahap Pertama: jumlah dana yang dapat ditarik adalah setinggi-tingginya 80% dari BLMD/k yang telah ditetapkan untuk setiap desa/kelurahan dan Tahap Kedua: jumlah dana yang dapat ditarik adalah maksimal 20% atau sebesar sisa dari BLMD/k yang telah ditarik pada Tahap Pertama. Jumlah dana yang diterima oleh TPKd/k telah sesuai dengan jumlah dana yang diajukan dan tidak ada potongan bahkan untuk biaya administrasi sekalipun. Penyerahan dana ini tepat waktu dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga dapat dikatakan bahwa pencairan dana berjalan dengan lancar dan tertib.



Tahap I (70% X Rp 42.687.940,00)



Tahap II (30% X Rp 42.687.940,00)



Gambar 5. Mekanisme Penyaluran BLMd/k di Tingkat Desa Guworejo

Dana ini langsung diserahkan kepada 29 RT dan 7 kelompok usaha dengan menyerahkan Surat Perjanjian Kerja Sama Bantuan Modal Bergulir yang sudah ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan Ketua TPKd/k. Penyerahan modal bergulir oleh TPKd/k kepada Ketua RT dan kelompok usaha dilakukan dalam musyawarah desa yang sebelumnya dijelaskan kembali aturan perguliran dana.

Setelah dana dicairkan, pengalokasian dana untuk kegiatan ekonomi tidak sesuai lagi dengan proposal yang diajukan pada tahap perencanaan. Pada awalnya hanya kelompok usaha yang diberikan dana bantuan karena diharapkan dengan pemberian dana bantuan tersebut akan segera meningkatkan volume usaha karena jumlah dana bantuan yang diterima cukup besar. Tetapi banyak masyarakat yang menginginkan dana bantuan juga dapat dirasakan oleh masyarakat lain yang tidak punya usaha. Selain itu, dikhawatirkan dana bantuan yang diberikan melalui kelompok usaha akan banyak kendala dan tidak merata karena hanya 161 jiwa saja yang menerima, sehingga pemantauan pelaksanaannya kurang transparan. Dalam kelompok usaha terdiri dari beberapa orang yang bertempat tinggal saling berjauhan sehingga waktu untuk bertemu sangat sedikit. Warga lain yang tidak ikut meminjam tidak tahu siapa saja yang memperoleh pinjaman karena tidak ada pemberitahuan yang terbuka, sehingga warga yang memperoleh pinjaman tidak mempunyai beban moral untuk mengembalikan pinjamannya.

Proses perencanaan yang seharusnya sudah tidak ada lagi pada tahap pelaksanaan, ternyata muncul lagi sehubungan dengan berubahnya alokasi dana untuk kegiatan ekonomi. Pada tahap pelaksanaan ini, alokasi dana untuk kegiatan ekonomi yang awalnya untuk 7 kelompok usaha akhirnya diubah untuk 29 RT dan 7 kelompok usaha. Setiap RT diberi wewenang untuk menentukan calon penerima dana bantuan dan jenis usaha yang dibiayai.

Alokasi dana bantuan program PDM-DKE untuk kegiatan ekonomi diserahkan kepada RT untuk dikelola dan dijadikan kas RT. RT dipilih sebagai lembaga yang dipercaya oleh TPKd/k untuk mengelola dana bantuan karena RT dianggap lembaga yang dapat mengurus dan mengelola dana paling efektif, dimana



▶ Ketua RT dijadikan Ketua Kelompok. Dikatakan efektif karena ruang lingkupnya hanya 1 RT saja dan tidak terlalu besar sehingga memudahkan dalam memantau dan mengontrol. Antar warga juga sudah saling mengenal dengan baik sehingga apabila ada yang tidak bisa mengangsur dia akan terbebani karena malu dengan warga yang lain. Disamping itu, RT mempunyai jadwal pertemuan rutin setiap bulan sekali dan pada pertemuan tersebut digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman ataupun perjanjian peminjaman.

Bantuan program PDM-DKE untuk 29 RT berjumlah Rp 29.000.000,00 dimana terbagi menjadi dua tahap. Tahap I sebesar Rp 26.600.000,00 dan tahap II sebesar Rp 2.400.000,00. Dana yang diterima setiap kelompok (RT) sudah dijatah dari LKMD yaitu masing-masing Rp 1.000.000,00. Di desa Guworejo terdapat 29 RT, dimana pada BLM tahap I RT yang warganya >40 KK mendapat Rp 1.000.000,00 sekaligus. Sedangkan RT yang warganya <40 KK memperoleh Rp 850.000,00, selanjutnya pada BLM tahap II ditambah Rp 150.000,00 sehingga jumlahnya genap Rp 1.000.000,00. Dana yang telah diserahkan kepada Ketua RT ini harus secepatnya diberikan kepada calon penerima, tidak boleh menginap satu malam di tangan Ketua RT. Dana ini selanjutnya akan menjadi dana abadi kas RT dan tidak dikembalikan lagi kepada LKMD. RT hanya diwajibkan menyeteror Rp 5.000,00 setiap bulan kepada LKMD sebagai biaya operasional program PDM-DKE apabila ada pertemuan, kunjungan, dll.

Pemilihan pengurus PDM-DKE di RT diputuskan melalui musyawarah RT pada saat pertemuan rutin RT. Pada umumnya Ketua RT menjabat sebagai Ketua Kelompok dengan dibantu bendahara yang dipilih dari warga yang bisa menulis dan berhitung. Dalam musyawarah pemilihan pengurus ini sekaligus memilih 10 warga yang akan menerima bantuan program PDM-DKE yang masing-masing menerima Rp 100.000,00. Sebelumnya Ketua RT bersama warga mengidentifikasi jenis usaha, tingkat pendapatan serta keadaan rumah tangga calon penerima. Calon penerima diprioritaskan yang punya usaha dan kurang mampu berdasarkan kriteria Keluarga Pra Sejahtera atau Keluarga Sejahtera I. Pemilihan calon penerima dana bantuan

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



program PDM-DKE dapat dilakukan dengan pengajuan sendiri sebagai calon penerima, ditawarkan oleh ketua RT yang sekaligus sebagai ketua kelompok ataupun diajukan oleh pihak lain. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang mengajukan diri sebagai penerima dana bantuan sebesar 53,33 persen, responden yang menerima karena ditawarkan ketua RT/ketua kelompok sebesar 40,00 persen dan sisanya sebesar 6,67 persen mendapatkannya karena diajukan oleh tetangga atau saudara. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 12.

Tabel 12. Pemilihan Responden sebagai Penerima Dana Bantuan Program PDM-DKE

Pemilihan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Mengajukan sendiri	16	53,33
Ditawari ketua RT/ketua kelompok	12	40,00
Ditawari lainnya...	2	6,67
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Pemilihan jenis usaha yang dipilih responden dapat dilakukan sendiri ataupun dibantu oleh pihak lain. Tabel 13 menunjukkan cara pemilihan jenis usaha responden dimana 93,33 persen responden memilih sendiri usaha yang akan didanai program PDM-DKE dengan mempertimbangkan usaha tersebut membutuhkan tambahan modal dan cepat menghasilkan meskipun penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut tidak terlalu besar. Sedangkan 6,67 persen responden lainnya memerlukan bantuan ketua RT/RW dan bayan dalam menentukan jenis usaha yang akan didanai program PDM-DKE. Jenis usaha yang didanai program PDM-DKE sudah sesuai dengan keinginan responden dan tidak ada unsur terpaksa dalam menjalankannya.

Tabel 13. Cara Pemilihan Jenis Usaha Responden

Cara pemilihan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Sendiri	28	93,33
Dibantu...	2	
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Dalam musbangdes juga membicarakan besarnya bunga pinjaman dan jangka waktu pengembalian. Setiap RT memberikan bunga pinjaman bervariasi antara 1,3 persen sampai 2,5 persen dengan jangka waktu pengembalian 10 bulan dimana bulan berikutnya sudah mulai mengangsur. Aturan perguliran di tiap RT berdasarkan hasil musyawarah desa pada saat perencanaan, namun pelaksanaannya diserahkan masing-masing RT.

Kelompok usaha memperoleh dana sebesar Rp 10.937.940,00 untuk 7 kelompok usaha yang terbagi dua tahap. Tahap I sebesar Rp 1.356.558,00 dan tahap II sebesar Rp 9.581.382,00. Dana bantuan yang diterima pada tahap pertama lebih kecil daripada tahap kedua, hal ini dikarenakan pada tahap pertama alokasi diprioritaskan untuk kelompok RT dahulu. Sebelumnya setiap kelompok usaha telah menyiapkan daftar nama penerima bantuan disertai besarnya bantuan yang akan diterima. Kelompok usaha mempunyai anggota bervariasi antara 5 sampai 16 orang. Pada kelompok usaha pengelolaan angsuran ditangani langsung oleh TPKd/k dan bertanggung jawab kepada TPKd/k, angsuran dilakukan dengan bunga pinjaman sebesar 2,5 persen dan jangka waktu pengembalian 10 bulan.

Warga yang sudah menerima dana bantuan program PDM-DKE lewat kelompok usaha, bisa juga memperoleh bantuan lewat RT. Hal ini terjadi karena informasi mengenai penerima bantuan lewat kelompok usaha tidak disebarluaskan sehingga kemungkinan terjadi penerimaan ganda sangat mungkin terjadi.

**Tabel 14. Rata-rata Pinjaman Dana Bantuan Program PDM-DKE
T.A. 1998/1999**

Kelompok	Σ Pinjaman awal (Rp)	Σ Peminjam sekarang (orang)	Σ Pinjaman sekarang (Rp)	Rata-rata pinjaman (Rp)
RT 1	1.000.000,00	20	1.800.000,00	90.000,00
RT 2	1.000.000,00	15	1.500.000,00	100.000,00
RT 3	1.000.000,00	21	1.500.000,00	71.428,57
RT 4	1.000.000,00	18	1.850.000,00	102.778,00
RT 5	1.000.000,00	17	1.750.000,00	102.941,18
RT 6	1.000.000,00	14	1.600.000,00	114.285,71
RT 7	1.000.000,00	15	1.700.000,00	113.333,33
RT 8	1.000.000,00	13	1.500.000,00	115.384,62
RT 9	1.000.000,00	14	1.400.000,00	100.000,00
RT 10	1.000.000,00	13	1.775.000,00	136.538,46
RT 11	1.000.000,00	13	1.650.000,00	126.920,08
RT 12	1.000.000,00	18	1.600.000,00	88.888,89
RT 13	1.000.000,00	13	1.450.000,00	111.538,46
RT 14	1.000.000,00	14	1.500.000,00	107.142,56
RT 15	1.000.000,00	12	1.800.000,00	150.000,00
RT 16	1.000.000,00	15	1.625.000,00	108.333,33
RT 17	1.000.000,00	16	1.450.000,00	90.625,00
RT 18	1.000.000,00	14	1.800.000,00	128.571,43
RT 19	1.000.000,00	15	1.700.000,00	113.333,33
RT 20	1.000.000,00	16	1.600.000,00	100.000,00
RT 21	1.000.000,00	14	1.575.000,00	112.500,00
RT 22	1.000.000,00	15	1.550.000,00	103.333,33
RT 23	1.000.000,00	17	1.700.000,00	100.000,00
RT 24	1.000.000,00	19	1.850.000,00	97.368,42
RT 25	1.000.000,00	16	1.550.000,00	96.875,00
RT 26	1.000.000,00	13	1.800.000,00	138.461,54
RT 27	1.000.000,00	12	1.450.000,00	120.833,33
RT 28	1.000.000,00	11	1.300.000,00	118.181,18
RT 29	1.000.000,00	13	1.525.000,00	117.307,69
Candak kulak	662.940,00	4	400.000,00	100.000,00
Tempe	1.650.000,00	2	1.000.000,00	500.000,00
Emping melinjo	1.225.000,00	-	-	-
Bengkel	2.900.000,00	4	2.000.000,00	500.000,00
Ternak ayam	1.900.000,00	-	-	-
Warungan	2.100.000,00	5	1.500.000,00	300.000,00
Penjahit	500.000,00	-	-	-
Total	39.937.940,00	451	51.750.000,00	114.745,01

Sumber : Data primer, diolah

Tabel 14 menunjukkan jumlah peminjam sampai dengan 25 Juli 2000 yaitu 449 orang, dimana peminjam dari kelompok RT sejumlah 436 orang dan kelompok usaha sejumlah 13 orang. Selain itu jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat sampai dengan 25 Juli 2000 adalah sejumlah Rp 47.150.000,00 untuk kelompok RT dan Rp 4.500.000,00 untuk kelompok usaha. Sedangkan rata-rata pinjaman dana bantuan program PDM-DKE adalah Rp 115.033,41. Dari tabel terlihat dengan jelas bahwa dana bantuan mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 11.712.060,00 atau 29,33 persen dari jumlah pinjaman awal. Peningkatan ini diperoleh dari angsuran dan bunga pinjaman yang pada bulan berikutnya dipinjamkan lagi sehingga peningkatan dana bantuan tersebut terasa lebih cepat.

6.1.4. Tahap Evaluasi

Evaluasi proyek program PDM-DKE di desa Guworejo dilaksanakan pada tanggal 6 April 1999 di Balai Desa Guworejo dan dihadiri oleh Camat selaku pembina, Kepala Desa, LMD, TPKd/k, FD, Ketua RW/RT serta tokoh masyarakat yang keseluruhannya berjumlah 37 orang. Evaluasi ini berguna untuk melihat hasil pelaksanaan program PDM-DKE yang telah berjalan selama dua bulan, yaitu awal Januari 1999 sampai dengan pertengahan Maret 1999. Evaluasi dilakukan dengan meminta pertanggungjawaban TPKd/k dalam menjalankan tugasnya. Pertanggungjawaban ini berbentuk laporan akhir mengenai pelaksanaan dan perkembangan program PDM-DKE di desa Guworejo. Setiap RT diminta memberikan laporan keuangan yang berupa buku penerimaan dan pengeluaran uang, buku nama-nama peminjam dan buku kas RT.

Evaluasi setelah proyek berakhir tidak dilakukan lagi karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh desa Guworejo. Evaluasi hanya terbatas di lingkup RT saja dimana setiap RT harus membuat administrasi dan laporan. Selama ini, administrasi berjalan lancar yang ditandai dengan adanya pembukuan pinjaman dan dilaporkan secara lisan setiap sebulan sekali pada saat pertemuan rutin RT. Pada evaluasi di RT, semua warga datang karena waktu evaluasi yang bersamaan dengan pertemuan rutin RT. Sedangkan pada kelompok usaha, pembukuan pinjaman tidak berjalan sehingga

pelaksanaan program PDM-DKE dianggap tidak berhasil. Dengan adanya pengalaman ini, membuat aparat desa dan LKMD menyadari bahwa pembentukan kelompok-kelompok usaha tidak efisien.

Pelaksanaan program PDM-DKE pada kelompok RT berjalan lancar dan tidak ada tunggakan pembayaran angsuran pinjaman. Ruang lingkup RT yang tidak luas memberikan keuntungan dalam mengontrol dan mengawasi jalannya pelaksanaan program PDM-DKE. Komunikasi antar warga se- RT dan adanya jadwal pertemuan rutin setiap bulan menjadi kontrol sosial dalam pelaksanaan program PDM-DKE. Selain itu, adanya sanksi sosial memberikan pengaruh pada perilaku warga yang hendak melakukan tindakan merugikan kepentingan bersama. Tidak adanya tunggakan angsuran juga dipengaruhi adanya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap dana bantuan yang sudah menjadi hak milik RT. Setiap warga berhak dan berkewajiban untuk melestarikan. Pelaksanaan program pada tingkat RT lebih transparan dalam pengelolaan (*open management*) sehingga RT dianggap sebagai lembaga yang paling efektif dalam mengelola dana bantuan program PDM-DKE.

Pelaksanaan program PDM-DKE pada kelompok usaha tidak berjalan lancar seperti pada kelompok RT. Terjadi tunggakan pembayaran angsuran pinjaman sebesar kurang-lebih Rp 6.000.000,00. Tunggakan ini terjadi karena kurang bertanggungjawabnya penerima dana bantuan terhadap keberlanjutan program PDM-DKE. Mereka beranggapan bahwa “bantuan” seharusnya tidak dikembalikan lagi ke desa dan menjadi hak milik penerima. Tidak ada komunikasi antar penerima dana bantuan karena jarak, tidak ada keterbukaan informasi penerima dan besar dana bantuan dan tidak ada *open management* pada pengelola program PDM-DKE tingkat desa (TPKd/k) menyebabkan terjadinya tunggakan angsuran.

Tingkat ekonomi penerima dana bantuan pada kelompok usaha lebih kuat dibandingkan pada kelompok RT. Hal ini terjadi karena penerima pada kelompok usaha merupakan warga yang mempunyai usaha produktif dan membutuhkan tambahan modal untuk memperbesar skala usahanya. Selain itu, dana bantuan yang diterima juga lebih besar dan diajukan sesuai dengan permintaan penerima. Tetapi

karena tidak adanya *open management* menyebabkan pelaksanaan program PDM-DKE pada kelompok usaha mengalami banyak hambatan.

6.1.5. Tahap Pelestarian

Tahap selanjutnya yang harus dilaksanakan dengan lebih baik lagi adalah tahap pelestarian dimana pemanfaatan dana bantuan program PDM-DKE diharapkan dapat dinikmati dalam jangka panjang. Pada prinsipnya dana program PDM-DKE adalah dana milik masyarakat yang harus bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya masyarakat miskin di desa Guworejo dan dijaga keberlanjutannya (*sustainability*).

Pelestarian dana untuk kegiatan ekonomi dilakukan dengan melanjutkan kegiatan modal bergulir yang pengelolannya diserahkan kepada setiap RT berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah. Sedangkan untuk kelompok usaha, pengelolannya dipegang oleh LKMD.

Aturan perguliran yang diterapkan di desa Guworejo adalah pola pinjaman berjangka dengan waktu 10 bulan dimana bulan berikutnya mulai mengangsur. Apabila jumlah dari angsuran anggota sudah memadai untuk dipinjam warga lain, maka uang tersebut langsung bisa diserahkan kepada peminjam berikutnya sesuai dengan urutan daftar tunggu. Dengan demikian, diharapkan pada bulan berikutnya bisa menambah seorang peminjam dan seterusnya sehingga jumlah peminjam terus bertambah.

Aturan perguliran untuk RT ditentukan secara musyawarah RT yang dipandu oleh ketua RT. Besarnya bunga pinjaman yang dikenakan pada tiap-tiap RT berbeda-beda antara 1,3 persen sampai dengan 2,5 persen dan tidak ada sanksi apabila terjadi keterlambatan mengangsur, karena pada pembayaran bulan berikutnya mereka akan membayar angsuran bulan tersebut ditambah bulan sebelumnya. Masyarakat pada umumnya setuju dengan adanya perguliran dan diharapkan ikut berpartisipasi dalam simpan pinjam, karena semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya, adil dan dapat terus berkembang yang pada akhirnya dipergunakan untuk keperluan RT sendiri sehingga jumlah uang di kas RT tersebut semakin bertambah. Masyarakat berpikir bahwa dengan adanya uang kas yang banyak akan meringankan beban

masyarakat apabila ada kegiatan yang memerlukan dana. Masyarakat tidak perlu lagi mengumpulkan uang, tetapi tinggal mengambilnya dari kas RT sehingga tidak merepotkan masyarakat yang pada saat itu tidak mempunyai uang.

Dari hasil evaluasi program PDM-DKE menunjukkan bahwa pelaksanaan program PDM-DKE di kelompok RT dapat berjalan lancar dan tidak terjadi tunggakan angsuran. Kesadaran penerima dana bantuan untuk mengembalikan pinjaman dengan cara angsuran sangat besar. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden sudah mengembalikan/mengangsur pinjaman. Responden yang sudah mengangsur dan melunasi pinjaman sebesar 6,67 persen, sedangkan 93,33 persen lainnya belum melunasi pinjamannya (Tabel 15). Beberapa responden yang belum melunasi pinjaman merupakan responden yang sudah dua kali menerima dana bantuan program PDM-DKE dimana pinjaman pertama harus sudah lunas terlebih dahulu. Dari 93,33 persen responden yang belum melunasi pinjaman semuanya menyatakan berniat untuk melunasinya. Hal ini didorong karena adanya sangsi sosial apabila mereka tidak mampu melunasi pinjaman, seperti rasa malu, beban moral dan rasa rendah diri.

Tabel 15. Keragaan Pengembalian Pinjaman Responden

Pengembalian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Sudah mengembalikan dan lunas	2	6,67
Sudah mengembalikan dan belum lunas	28	93,33
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Kondisi perguliran sudah dilaksanakan dengan lancar. Sampai sekarang, hampir semua masyarakat sudah pernah meminjam dan sebagian besar sudah lunas. Warga yang ingin meminjam diharuskan mendaftar terlebih dahulu kepada ketua dan bendahara program PDM-DKE RT sehingga masuk dalam daftar tunggu. Pengurus program PDM-DKE bersama warga bermusyawarah untuk menentukan siapa yang berhak meminjam bulan selanjutnya dengan mempertimbangkan warga yang

membutuhkan modal untuk usaha lebih diprioritaskan. Warga yang belum lunas angsurannya tidak diperbolehkan meminjam sebelum melunasi pinjamannya.

Pelaksanaan sistem perguliran tidak akan terpantau dengan baik, apabila tidak ditunjang dengan suatu administrasi yang baik. Setiap RT harus mempunyai buku administrasi dan pembukuan keuangan yang berisi penerimaan, penggunaan, dan perkembangan jumlah dana program PDM-DKE. Pelaporan dilakukan setiap bulan pada saat pertemuan rutin RT sehingga penggunaan uang terkontrol. Selama ini kontrol terhadap tahap pelestarian masih terus dilakukan oleh LKMD sehingga pelaksanaannya masih terkendali.

Pembayaran angsuran pinjaman dilakukan sebulan sekali pada saat pertemuan rutin RT. Pembayaran angsuran ini sekaligus dengan bunganya. Penunggakan angsuran pinjaman jarang terjadi, walaupun ada biasanya bulan selanjutnya mereka akan membayar angsuran bulan ini ditambah angsuran yang belum dibayar tanpa ada denda. Warga pada umumnya akan merasa beban moral dan malu apabila mereka mempunyai hutang dan tidak mampu membayar sehingga mereka akan berusaha untuk mengangsur meskipun harus hutang di lain tempat.

Pembayaran angsuran pinjaman pada kelompok usaha mengalami masalah, yaitu pinjaman tersebut macet. Hal ini terjadi karena ada sekelompok kecil warga yang mengatakan bahwa dana tersebut adalah bantuan dari pemerintah yang seharusnya tidak perlu dikembalikan. Mereka berpendapat bahwa yang namanya bantuan tidak perlu kembali, dan tidak boleh dipinjamkan. Kalau dipinjamkan berarti aparat desa hanya ingin mengambil keuntungan dari bantuan tersebut. Mereka yang mengatakan ini sebenarnya adalah orang-orang yang disegani warga yang tidak sepantasnya membuat pernyataan ini. Dengan adanya pernyataan tersebut, banyak anggota kelompok usaha yang tidak mengangsur pinjaman sehingga dana yang macet kurang-lebih sebesar Rp 6.000.000,00. Dana program PDM-DKE yang sudah kembali kepada TPKd/k hanya sejumlah kurang-lebih Rp 5.000.000,00 yang akhirnya dipinjamkan lagi kepada RT-RT dengan mengatasnamakan kelompok usaha tertentu sehingga dapat memperbesar kas. Rukun Tetangga (RT) yang meminjam harus

mengangsur pinjaman tersebut kepada TPKd/k setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk menghindari dana yang mengendap dan tidak berkembang yang ada di LKMD. Dengan sistem ini, uang yang ada di kas RT akan menjadi lebih besar sehingga masyarakat dapat meminjam lebih banyak dan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya. Kemacetan ini tidak terjadi pada kelompok RT, karena warga mempunyai tanggung jawab moral terhadap dana bantuan yang merupakan milik bersama dalam satu RT. Setiap warga akan bertanggung jawab dalam melestarikan dana bantuan sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan warga satu RT.

Rapat rutin untuk membahas mengenai pelaksanaan program PDM-DKE dilakukan sebulan sekali dengan memanfaatkan pertemuan rutin/arisan RT. Kehadiran penerima dana bantuan pada pertemuan ini sangat tinggi karena pertemuan rutin RT ini wajib dihadiri oleh semua warga se-RT. Dalam pertemuan ini digunakan untuk meminjam dan mengangsur pinjaman, sehingga perputaran uang dapat dipantau dan dikendalikan dengan baik, selain itu setiap ada masalah dengan pelaksanaan dibahas secara musyawarah sehingga dapat diperoleh pemecahannya. Sedangkan kelompok usaha tidak ada jadwal pertemuan rutin program PDM-DKE dan tidak mempunyai pengurus kelompok karena langsung bertanggung jawab kepada TPKd/k sehingga komunikasi antar anggota tidak ada. Hal demikian menyebabkan pelaksanaannya tidak dapat dikontrol dan diawasi serta banyak masalah terjadi karena pengelolaan yang tidak terbuka. Apabila akan mengangsur, mereka mendatangi bendahara program PDM-DKE dan antara penerima bantuan tidak pernah bertemu dan membicarakan masalah pelaksanaan bantuan.

Kegiatan penyuluhan/pembinaan program PDM-DKE kepada kelompok dan individu penerima dana bantuan program PDM-DKE sangat diperlukan. Penyuluhan/pembinaan merupakan suatu kegiatan yang bersifat instruktif dimana penyuluh/pembina memberikan arahan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program PDM-DKE. Penyuluhan/pembinaan program PDM-DKE diharapkan masyarakat menjadi lebih paham maksud dan tujuan program PDM-DKE dan mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan karena adanya kontrol dari pembina.



Pelaksanaan program PDM-DKE di desa Guwarejo juga ditandai dengan kegiatan penyuluhan/pembinaan di RT, namun tidak semua RT melakukannya. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 23,33 persen responden menyatakan tidak ada penyuluhan/pembinaan di RT tempat mereka tinggal. Sedangkan 76,67 persen responden menyatakan bahwa penyuluhan/pembinaan program DM-DKE dilakukan di RT mereka dan minimal dilakukan satu kali (Tabel 16).

Tabel 16. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan/Pembinaan pada Responden

Penyuluhan/Pembinaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Dilaksanakan penyuluhan/pembinaan	22	76,67
Tidak dilaksanakan penyuluhan/pembinaan	8	23,33
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Penyuluhan/pembinaan diberikan oleh ketua RT/RW, Bayan, tokoh masyarakat dan kadang-kadang aparat desa. Fasilitator Desa jarang memberikan penyuluhan/pembinaan kepada warga RT ataupun anggota kelompok usaha sehingga peran FD dalam penyuluhan/pembinaan tidak dirasakan masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan/pembinaan biasanya dilakukan pada saat pertemuan rutin RT yang diadakan sebulan sekali di rumah ketua RT masing-masing dan waktu yang diperlukan selama 30 menit. Penyuluhan/pembinaan dihadiri semua warga se-RT sehingga maksud dan tujuan penyuluhan/pembinaan dapat dirasakan semua warga. Materi yang disampaikan pada penyuluhan/pembinaan antara lain mengenai alokasi dana bantuan yang diperoleh warga supaya tidak salah arah pemanfaatan dan memberikan saran mengenai prospek usaha dan peragaan usaha. Dengan adanya penyuluhan/pembinaan masyarakat merasa bahwa pelaksanaan program PDM-DKE selalu dikontrol dan dapat mengurangi kesalahan penggunaan dana bantuan untuk kegiatan konsumsi. Masyarakat sebenarnya sangat membutuhkan bimbingan untuk mengontrol pelaksanaan dan juga untuk meningkatkan kemampuan usaha, mereka

menghendaki agar setiap sebulan sekali ada penyuluhan/pembinaan meskipun hanya sebentar sehingga dapat memberikan motivasi dalam melaksanakan program.

Dana bantuan program PDM-DKE di desa Guworejo pada awalnya diberikan kepada 320 orang. Setelah dana bantuan tersebut digulirkan jumlah peminjam menjadi 784 orang atau meningkat sebesar 244,38 persen (berdasarkan data sampai dengan 25 Juli 2000), dimana anggota lama yang meminjam lagi sejumlah 44 orang dan anggota baru sejumlah 457 orang (Tabel 13). Dari Tabel 17 juga terlihat jelas bahwa pada kelompok RT perguliran berjalan lancar karena hampir semua warga RT sudah pernah meminjam. Sedangkan pada kelompok usaha perguliran tidak berjalan, karena dana bantuan macet sejumlah kurang-lebih Rp 6.000.000,00.

Sebagian masyarakat merasa yakin dengan adanya dana bantuan program PDM-DKE dapat meningkatkan pendapatan dan dapat mengurangi kemiskinan meskipun memerlukan waktu yang relatif lama. Mereka juga berharap agar pelaksanaan program PDM-DKE jangan sampai berhenti supaya uang tersebut dapat berkembang selain itu masyarakat juga berharap ada tambahan bantuan lagi dari pemerintah untuk memperbesar modal peminjaman.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

**Tabel 17. Jumlah Penerima Dana Bantuan Program PDM-DKE
T.A. 1998/1999 (Januari 1999 – Juli 2000)**

Kelompok	Σ Warga/ RT atau Σ Anggota/ kelp (orang)	Σ Peminjam awal (orang)	Perguliran		Total anggota (orang)
			Σ Anggota lama (orang)	Σ Anggota baru (orang)	
RT 1	40	10	-	22	32
RT 2	26	10	1	13	23
RT 3	30	10	2	16	26
RT 4	25	8	3	15	23
RT 5	31	10	1	15	25
RT 6	37	10	1	18	28
RT 7	38	10	-	19	29
RT 8	38	10	1	17	27
RT 9	36	8	-	18	26
RT 10	26	10	2	15	25
RT 11	28	10	1	13	23
RT 12	41	10	-	20	30
RT 13	27	10	2	14	24
RT 14	38	10	-	16	26
RT 15	21	8	4	13	21
RT 16	29	10	1	14	24
RT 17	23	10	2	12	22
RT 18	37	8	-	19	27
RT 19	40	10	-	18	28
RT 20	30	10	-	15	25
RT 21	43	10	-	19	29
RT 22	35	10	1	17	27
RT 23	32	10	1	17	27
RT 24	41	10	-	19	29
RT 25	31	10	2	15	25
RT 26	25	8	-	14	22
RT 27	18	10	4	8	18
RT 28	19	10	3	9	19
RT 29	17	10	5	7	17
Candak kulak	7	7	3	1	8
Tempe	6	6	1	3	9
Emping melinjo	5	5	-	-	5
Bengkel	5	5	1	3	8
Ternak ayam	6	6	-	-	6
Warungan	16	16	2	3	16
Penjahit	5	5	-	-	5
Total	952	320	44	457	784

Sumber : Data primer, diolah

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

6.2. Kemampuan Pemerintah Lokal dan Masyarakat dalam Perencanaan Program PDM-DKE (Proses *Bottom-up*)

Program PDM-DKE merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menggunakan pendekatan pembangunan partisipatif, dimana mekanisme perencanaannya adalah perencanaan alir bawah (*bottom-up*). Dalam pelaksanaan program PDM-DKE masyarakat harus menjadi subyek (pelaku) dalam pembangunan ekonomi tersebut dan berperan aktif bukan sebagai obyek pembangunan.

Tahap perencanaan dan pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah lokal (dalam hal ini adalah pemerintahan desa) dan masyarakat sendiri (*bottom-up planning*) yang ditentukan melalui musyawarah pembangunan desa (musbangdes). Tahap ini mendidik masyarakat untuk melakukan asas demokrasi, karena semua keputusan diambil dengan asas mufakat.

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan, diketahui bahwa keterlibatan pemerintah lokal dan masyarakat desa Guworejo dalam perencanaan program PDM-DKE masih kurang. Hal ini terlihat pada saat musbangdes yang dihadiri oleh Kepala Desa dan aparatnya, TPKd/k, FD, LKMD, LMD, Ketua RW/RT dan tokoh masyarakat. Musbangdes ini membicarakan mengenai identifikasi dan penetapan penerima bantuan dan jenis kegiatan serta penyusunan dan pengajuan dokumen pencairan dana BLMd/k. Pada musbangdes Kepala Desa dan aparat desa mengemukakan pendapatnya mengenai alokasi dana bantuan untuk pembelian pompa air yang nantinya akan digunakan untuk mengairi sawah. Dalam menyampaikan pendapat, aparat desa menunjukkan bahwa keinginan tersebut adalah keinginan seluruh masyarakat desa Guworejo, padahal masyarakat tidak tahu dan tidak diikutsertakan dalam musbangdes tersebut. Rencana aparat desa tersebut ditentang oleh LKMD dengan alasan apabila dana tersebut dibelikan pompa yang digunakan untuk mengairi sawah maka yang akan merasakan manfaat langsung hanyalah warga yang mempunyai sawah saja yang jumlahnya hanya sedikit dan biasanya cukup mampu, sedangkan sebagian besar warga hanya sebagai buruh tani sehingga manfaat yang diperoleh tidak merata. Kehadiran KMT-II dalam musbangdes memberikan pengaruh yang besar terhadap keputusan musyawarah

karena KMT-II menyarankan agar dana bantuan program PDM-DKE sebaiknya digunakan untuk kegiatan ekonomi semuanya dimana seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Saran yang diberikan KMT-II didasarkan pada pengarahannya yang telah diberikan oleh Bupati Sragen mengenai alokasi dana bantuan program PDM-DKE akan lebih cepat memberikan manfaat apabila digunakan untuk modal bergilir. Saran dari KMT-II juga diperkuat dengan pendapat ketua TPKd/k yang mengatakan bahwa perbaikan kegiatan ekonomi lebih penting dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat apalagi masih banyak masyarakat desa Guworejo yang miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. Akhirnya dengan pertimbangan di atas, musbangdes memutuskan bahwa alokasi dana bantuan program PDM-DKE semuanya digunakan untuk kegiatan ekonomi setelah dikurangi untuk BOP dan insentif FD. Dari informasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa KMT-II dan ketua TPKd/k berperan dalam memutuskan suatu tindakan.

Masyarakat desa Guworejo tidak mengetahui alokasi dana bantuan program PDM-DKE di desa mereka karena hasil musyawarah pelaksanaan program PDM-DKE tidak dituangkan dalam papan informasi desa. Ketidaktahuan masyarakat pada program PDM-DKE secara keseluruhan dikarenakan pengumuman atau penyebaran yang bisa memberikan informasi secara lengkap kepada masyarakat tidak ada. Dengan demikian transparansi dalam tahap perencanaan tidak terjadi, padahal pada perencanaan alir bawah hal tersebut sangat diperlukan.

Keberadaan TPKd/k atau LKMD dalam perencanaan serta adanya beberapa wakil dari masyarakat di desa Guworejo sudah memperlihatkan adanya proses *bottom-up*, meskipun pelaksanaannya belum berjalan seperti yang dikehendaki karena pada waktu perencanaan peran aparat pemerintah (Kecamatan dan Kabupaten) masih dominan dan tidak adanya keterbukaan dalam perencanaan. Apalagi pemilihan FD berdasarkan penunjukan dari FK yang tidak melalui musyawarah.



6.3. Peran Pembinaan dan Pendampingan oleh Fasilitator Desa (FD) dalam Pelaksanaan Program PDM-DKE

Dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Program PDM-DKE, Fasilitator Desa mempunyai tugas untuk mendampingi masyarakat desa dalam membantu menyusun perencanaan yang akan diajukan untuk didanai program PDM-DKE dan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Peran FD dalam pelaksanaan program PDM-DKE mulai dari penyebarluasan konsep program PDM-DKE kepada masyarakat, memandu pelaksanaan musyawarah desa, mendampingi masyarakat dalam menyusun perencanaan kegiatan, membantu TPKd/k dalam merinci rencana kegiatan, penjadwalan dan mengorganisir masyarakat, mendampingi pokmas dalam pelaksanaan kegiatan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, mendorong partisipasi masyarakat, membantu TPKd/k dalam menangani pengaduan masyarakat serta memeriksa data dasar dan laporan pelaksanaan kegiatan yang kemudian diserahkan kepada FK.

Fasilitator Desa di desa Guworejo hanya dijabat oleh seorang saja yaitu Bapak Maridin yang merupakan pensiunan guru SD. Bapak Maridin dapat terpilih menjadi FD karena ditunjuk oleh FK dan Kepala Desa dengan mempertimbangkan bahwa Bapak Maridin merupakan orang yang berpendidikan dan berwawasan luas dan juga dianggap sebagai tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat. Pemilihan FD dilakukan pada saat musbangdes yang dihadiri oleh FK, Kepala Desa dan aparatnya, LKMD, LMD, Ketua RW/RT dan tokoh masyarakat. Dalam pemilihan FD, masyarakat tidak diikutsertakan sehingga mereka tidak tahu keberadaan FD dan fungsinya dalam pelaksanaan program PDM-DKE.

Sebelum melaksanakan tugasnya, FD terlebih dahulu mengikuti pelatihan/pembekalan yang dilaksanakan di kecamatan Karangmalang. Pelatihan ini dilakukan 2 kali dan dirasakan FD sudah cukup dengan pembina dari Bangdes Kabupaten, FK, KMT-I dan KMT-II. Dalam pembekalan ini, materi yang diberikan adalah sosialisasi program, prinsip-prinsip dasar program, operasionalisasi program, dan administrasi program PDM-DKE.

Pada tahap sosialisasi program PDM-DKE di tingkat RT dan RW, keberadaan FD kurang dirasakan oleh warga karena FD kurang menyebarluaskan dan menjelaskan maksud dan tujuan program PDM-DKE pada pertemuan-pertemuan rutin RT. Hanya beberapa RT saja yang didatangi FD, yaitu RT yang lokasinya masih berada dalam satu RW dimana FD tinggal. Sedangkan sebagian besar RT yang lain yang lokasinya jauh dari tempat tinggal FD tidak didatangi dengan pertimbangan jarak dan usia FD yang sudah cukup tua.

Pada saat musyawarah alokasi dana bantuan program PDM-DKE, Fasilitator Desa tidak mempunyai peran dalam penentuan penerima dan jenis usaha yang akan didanai. Penentuan penerima bantuan dan jenis usaha diserahkan langsung kepada ketua kelompok masing-masing dalam musyawarah warga. Fasilitator Desa hanya bekerja pada saat dana sebelum turun sampai dana disalurkan kepada ketua kelompok. Fasilitator Desa bekerja selama 2 bulan yaitu mulai bulan Februari sampai Maret 1999 dan mendapat insentif sebesar Rp 750.000,00.

Pada tahap pelaksanaan FD tidak pernah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada RT, hanya beberapa RT yang lokasinya berdekatan dengan rumah saja yang memperoleh pembinaan. Tabel 18 menunjukkan jumlah responden yang pernah mendapat pembinaan/pendampingan oleh FD. Responden yang pernah mendapat pembinaan/pendampingan dari FD hanya sebesar 26,67 persen sedangkan yang belum pernah mendapat pembinaan/pendampingan dari FD sebesar 73,33 persen. Ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh FD masih sangat sedikit sehingga pencapaian tujuan program PDM-DKE tidak dapat segera tercapai.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tabel 18. Pembinaan/pendampingan yang Dilakukan Fasilitator Desa terhadap Responden

Keterangan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Responden yang pernah mendapatkan pembinaan/pendampingan	8	26,67
Responden yang belum pernah mendapatkan pembinaan/pendampingan	22	73,33
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Masyarakat tidak tahu bahwa ada pendamping (FD) yang bertugas memberikan pembinaan dan pendampingan, hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang masih belum memahami maksud dan tujuan program PDM-DKE sehingga muncul beberapa masalah dalam pelaksanaan. Masyarakat beranggapan dana bantuan tersebut hanyalah sebagai simpan pinjam yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Padahal pada saat sosialisasi sudah dikatakan bahwa dana bantuan tersebut digunakan untuk tambahan modal atau untuk modal membuka usaha baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Tetapi masih banyak warga yang belum tahu keberadaan dana bantuan program PDM-DKE ini. Selain itu masih ada juga masyarakat yang menganggap dana bantuan ini harusnya diberikan kepada masyarakat tanpa harus dikembalikan lagi. Seharusnya masalah-masalah di atas dapat dihindari dengan pemberian pembinaan-pembinaan mengenai program PDM-DKE sehingga tidak ada kesalahfahaman dalam mengartikan maksud dan tujuan program PDM-DKE.

Pada RT yang memperoleh pembinaan dari FD mereka memperoleh masukan mengenai penggunaan buku laporan keuangan yang benar, pengembangan usaha, gambaran mengenai prospek usaha yang sedang dijalankan dan masyarakat merasakan adanya tambahan motivasi supaya berusaha lebih giat lagi. Selain itu, masyarakat optimis bahwa dengan adanya pembinaan kesalahan dalam penggunaan pinjaman dapat dihindarkan terutama untuk konsumsi.



Sebagian besar responden (73,33 persen) menghendaki kehadiran seorang pendamping untuk dapat membimbing, mengontrol, mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan program PDM-DKE. Selain itu juga dapat sebagai penengah dalam menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan dan dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam penggunaan pinjaman pada masyarakat untuk kegiatan konsumsi (Tabel 19). Hanya 26,67 persen responden saja yang kurang memerlukan peranan pendamping, karena mereka menganggap pendampingan yang diberikan FD hanya berupa administrasi saja. Responden menginginkan pendampingan tidak hanya berupa administrasi saja melainkan juga dalam hal pengembangan usaha (prospek usaha), anggaran usaha, dan lain-lain. Responden juga menghendaki bentuk pembinaan/pendampingan dalam bentuk diskusi karena antar peserta dapat melakukan tukar pendapat dan ada dialog dua arah antara pemberi dengan penerima materi.

Tabel 19. Peranan Pendamping di Mata Responden

Peranan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Perlu	22	73,33
Tidak perlu	8	26,67
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Pada Tabel 20 dapat dilihat mengenai lama pendampingan yang diinginkan responden. Responden yang menginginkan hanya 1 bulan pendampingan sebesar 23,33 persen, karena mereka merasa bahwa manfaat yang diperoleh dari pendampingan tidak berbeda jauh dibandingkan tanpa pendampingan sehingga hanya perlu dilakukan sekali saja. Sementara itu ada juga responden yang menginginkan pendampingan sebulan sekali untuk selamanya yaitu sebesar 30,00 persen, hal ini diinginkan karena dalam keadaan apapun pembinaan/pendampingan selalu dibutuhkan oleh masyarakat supaya pelaksanaannya dapat dikontrol. Sebagian besar responden menginginkan pembinaan/pendampingan sebulan sekali selama 1 tahun

(46,67 persen) dengan mengambil sedikit waktu pada acara pertemuan RT sehingga pelaksanaan dapat terpantau dengan baik.

Tabel 20. Lama Pendampingan yang Diinginkan Responden

Lama Pendampingan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1 Bulan dan hanya sekali	7	23,33
Sebulan sekali selama 1 Tahun	14	46,67
Sebulan sekali dan selamanya	9	30,00
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Dari pihak FD sendiri mengatakan bahwa tugas yang diemban oleh FD hanya pada saat dana sebelum diturunkan (selama 2 bulan) saja, setelah itu FD tidak lagi berperan. Pada awal pemilihan FD, Bapak Maridin merasa keberatan atas tugas yang diberikan kepadanya dengan alasan fisiknya sudah mulai melemah, tetapi Bapak Maridin tidak bisa menolak karena ditunjuk oleh FK.

Dari fakta-fakta yang ada, peran pendamping (FD) di tingkat desa sepertinya hanya sebagai pelengkap saja dan hanya sedikit peran FD yang sudah dilakukan seperti pemberian pendampingan dalam administrasi. Dengan demikian keberadaan FD belum dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat desa Guworejo. FD tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini disebabkan oleh usia yang relatif sudah tua, jarak antar RT yang cukup jauh dan jumlah FD yang hanya seorang.

VII. PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM PDM-DKE TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA DAN PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA

7.1. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah rumah tangga. Sebagian besar mereka terpilih menjadi peminjam karena ditawarkan oleh Ketua RT tetapi ada juga yang mengajukan sendiri. Karakteristik responden yang akan dijelaskan berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan pendapatan/pengeluaran, kondisi rumah dan luas pemilikan lahan. Untuk melihat apakah responden termasuk dalam sasaran penerima dana program PDM-DKE dijelaskan dengan melihat strata kesejahteraan dan pendapatan per kapita.

Ditinjau dari segi umur, dari 30 orang yang menjadi responden terdapat variasi umur. Sebagian besar responden berumur 35 tahun sampai 45 tahun (43,33 persen). Responden termuda berumur 27 tahun sedangkan yang tertua berumur 75 tahun. Untuk lebih jelasnya, perincian jumlah responden berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Jumlah Responden Menurut Umur

Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
< 35	6	20,00
35 - 45	13	43,33
> 45	11	36,67
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki meskipun sebenarnya laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi penerima dana bantuan program PDM-DKE. Dari Tabel 22 terlihat bahwa jumlah responden perempuan sebesar 40,00 persen. Walaupun jumlahnya lebih sedikit

dibandingkan responden laki-laki, jumlah sebesar 40,00 persen ini mempunyai makna yang sangat besar. Dengan responden perempuan sebesar 40,00 persen menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan mempunyai peranan yang besar terhadap kegiatan ekonomi rumah tangga.

Tabel 22. Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin

Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	18	60,00
Perempuan	12	40,00
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Tingkat pendidikan responden masih tergolong rendah. Tabel 23 menunjukkan bahwa warga yang hanya berpendidikan SD masih mendominasi responden (66,67 persen), sedangkan yang berpendidikan SMP sebesar 23,33 persen, SMA sebesar 6,67 persen dan Diploma sebesar 3,33 persen. Hal ini dikarenakan warga yang mendapat dana bantuan diprioritaskan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera, sehingga sebagian besar hanya berpendidikan SD dan tidak sampai lulus.

Tabel 23. Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
SD	20	66,67
SMP	7	23,33
SMA	2	6,67
Diploma	1	3,33
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Masyarakat di desa Guworejo mempunyai pola nafkah ganda, yaitu penghasilan tidak hanya dari sektor pertanian saja melainkan juga dari sektor non

pertanian. Ini terjadi karena penghasilan yang diperoleh dari sektor pertanian tidak cukup selain itu penghasilan dari sektor pertanian musiman sehingga diperlukan waktu untuk menunggu. Responden sebagian besar bekerja di bidang jasa dan pegawai, yaitu sejumlah 16 jiwa, sedangkan usaha peternakan/perikanan hanya diminati oleh 2 jiwa saja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Sumber Pendapatan Utama Responden

Sumber Pendapatan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Pertanian		
a. Usahatani	5	16,67
b. Peternakan/perikanan	2	6,67
c. Buruh pertanian	6	20,00
Non pertanian		
a. Dagang	13	43,33
b. Industri rumah tangga	3	10,00
c. Jasa dan pegawai	16	53,33
d. Buruh non pertanian	6	20,00
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Tabel 25 menunjukkan jumlah pendapatan dan pengeluaran responden selama tahun 1998 (sebelum program PDM-DKE diturunkan). Dengan mengacu pada tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah pengeluaran ternyata lebih besar daripada pendapatan sehingga terdapat surplus negatif sebesar Rp 648.035,00. Hal ini menunjukkan karakteristik masyarakat miskin dimana pengeluarannya lebih besar dibandingkan pendapatannya sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut masyarakat akan meminjam uang ke orang lain.



Tabel 25. Pendapatan dan Pengeluaran Responden (Tahun 1998)

No Responden	Pendapatan Tahun 1998 (Rp)	Pengeluaran Tahun 1998 (Rp)
1	2.100.000,00	3.052.100,00
2	3.720.000,00	5.412.200,00
3	5.185.000,00	4.405.450,00
4	4.940.000,00	1.462.500,00
5	2.640.000,00	4.382.600,00
6	1.808.000,00	2.441.860,00
7	2.245.000,00	3.891.000,00
8	3.468.000,00	3.792.600,00
9	2.285.000,00	2.832.000,00
10	4.548.000,00	2.941.000,00
11	2.304.000,00	1.909.500,00
12	4.182.000,00	3.340.400,00
13	1.500.000,00	1.771.600,00
14	4.224.000,00	4.039.000,00
15	3.984.000,00	3.941.500,00
16	2.934.000,00	1.851.250,00
17	7.900.000,00	5.429.200,00
18	1.560.000,00	2.307.625,00
19	4.238.000,00	5.633.000,00
20	4.677.500,00	5.092.500,00
21	1.560.000,00	2.023.500,00
22	2.307.500,00	2.288.550,00
23	25.800.000,00	27.250.000,00
24	6.495.000,00	9.842.000,00
25	3.985.000,00	3.227.700,00
26	4.745.000,00	4.585.500,00
27	6.570.000,00	5.004.100,00
28	8.450.000,00	6.620.000,00
29	2.256.000,00	2.844.200,00
30	2.940.000,00	2.584.600,00
Total	135.551.000,00	136.199.035,00

Sumber : Data primer, diolah

Pengeluaran paling banyak digunakan untuk konsumsi, yaitu sebesar 54,45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Guworejo masih miskin. Pengeluaran konsumsi digunakan untuk membeli beras, lauk dan sayur, buah dan makanan tambahan, minyak goreng, bumbu, teh, kopi, gula, susu, sabun mandi dan odol, dan sabun cuci.

Nilai pengeluaran untuk pendidikan cukup tinggi (16,89 persen), ini menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap pendidikan anak dan tingkat kesadaran warga terhadap pendidikan sudah tinggi meskipun sebagian besar pendapatan harus dialokasikan untuk pemenuhan pangan.

Pengeluaran sumbangan bagi masyarakat pedesaan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan sangat besar nilainya bagi warga (7,10 persen). Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan warga masih dirasakan sangat tinggi sehingga apabila ada warga yang mempunyai hajatan maka warga lain akan ikut membantu dengan memberikan sumbangan semampunya.

Pengeluaran untuk lain-lain adalah pengeluaran yang tidak terduga yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Besarnya pengeluaran ini adalah 7,05 persen. Untuk lebih jelas lihat Tabel 26 di bawah ini.

Tabel 26. Pengeluaran Rata-rata Responden Selama 1 Tahun (Tahun 1998)

Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Konsumsi	2.472.116,17	54,45
Bahan bakar	137.288,33	3,02
Kesehatan	47.100,00	1,04
Pendidikan	766.900,00	16,89
Pakaian	90.446,67	1,99
Transportasi	81.283,33	1,79
Iuran	128.000,00	2,82
Perbaikan rumah	174.833,33	3,85
Sumbangan	322.333,33	7,10
Lain-lain	319.666,67	7,05
Total	4.539.967,83	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Dilihat dari kondisi rumah (Tabel 27), sebagian besar rumah responden masih berupa semi permanen (Tipe B) yaitu sebesar 50,00 persen. Sedangkan responden yang sudah mempunyai rumah permanen (Tipe A) sebesar 20,00 persen. Meskipun

rumah mereka sudah permanen, tembok rumah belum disemen masih berupa bata merah. Responden yang mempunyai rumah tidak permanen sebesar 30,00 persen dan mereka biasanya termasuk Keluarga Pra Sejahtera.

Tabel 27. Kondisi Rumah Responden

Kondisi-rumah	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Permanen (TipeA)	6	20,00
Semi Permanen (Tipe B)	15	50,00
Tidak Permanen (Tipe C)	9	30,00
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Luas rata-rata pemilikan lahan pertanian responden sebesar 971,63 m², dimana hanya sebagian kecil responden yang mempunyai lahan pertanian. Sebagian besar responden sudah mempunyai rumah sendiri dan rata-rata luasnya sebesar 104,33 m² dan pekarangan sebesar 359 m² (Tabel 28).

Tabel 28. Rata-rata Luas Pemilikan Lahan Responden

Kondisi rumah	Luas (m ²)
Lahan pertanian	971,63
Rumah	104,33
Pekarangan	10.770,00

Sumber : Data primer, diolah

Dari berbagai karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa responden peserta program PDM-DKE di desa Guworejo masih banyak yang miskin, yaitu dengan melihat pengeluaran yang banyak digunakan untuk konsumsi, kondisi rumah responden yang sebagian besar masih semi permanen dan pemilikan lahan yang tidak seimbang diantara responden.

Penerima bantuan program PDM-DKE seringkali tidak tepat sasaran sehingga pencapaian tujuan program PDM-DKE menjadi tidak tercapai. Penerima

bantuan program PDM-DKE harus masuk dalam kriteria Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Berdasarkan data yang diperoleh dari desa menunjukkan bahwa penerima awal bantuan program PDM-DKE sudah tepat sasaran (Lampiran 7). Namun, dari hasil penelitian terhadap responden diperoleh data bahwa tidak semua responden yang menerima bantuan program PDM-DKE adalah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, tetapi ada sejumlah 16,67 persen responden yang masuk kriteria Keluarga Sejahtera II (Tabel 29). Beberapa kriteria Keluarga Sejahtera II antara lain: sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan, dan dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti pendidikan, KB, interaksi dengan keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.

Tabel 29. Klasifikasi Responden Berdasarkan Strata Kesejahteraan

Strata	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Keluarga Pra Sejahtera	8	26,67
Keluarga Sejahtera I	17	56,66
Keluarga Sejahtera II	5	16,67
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Data ini didukung oleh data pendapatan per kapita responden dimana terdapat 20,00 persen responden yang sudah melampaui garis kemiskinan atau pendapatan per kapitanya di atas 480 kg/kap/th sedangkan yang masih tergolong sangat miskin sebesar 23,33 persen, miskin sebesar 26,67 persen dan hampir cukup sebesar 30,00 persen (Tabel 30). Ini terjadi karena putaran pertama pinjaman bantuan program PDM-DKE yang lebih mengutamakan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sudah digulirkan sehingga banyak warga yang seharusnya belum boleh meminjam karena dianggap sudah mampu bersikeras untuk dapat meminjam. Mereka beranggapan bahwa semua warga berhak meminjam baik yang miskin maupun yang mampu karena dana tersebut sudah menjadi hak milik warga RT.

Tabel 30. Pendapatan per Kapita Responden Sebelum Menerima Bantuan Program PDM-DKE

Pendapatan per Kapita (Kg/kap/th)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
< 240 (Sangat miskin)	7	23,33
240 – 320 (Miskin)	8	25,67
320 – 480 (Hampir cukup)	9	30,00
> 480 (Cukup)	6	20,00
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Dengan demikian meskipun sebagian besar responden masih tergolong miskin, tetapi ada sejumlah kecil responden yang sudah mampu juga mendapatkan bantuan program PDM-DKE. Hal seperti inilah yang membuat pencapaian tujuan program menjadi gagal karena masih banyak warga miskin yang belum memperoleh bantuan padahal merekalah yang seharusnya diutamakan.

7.2. Pengaruh Program PDM-DKE terhadap Perkembangan Usaha

7.2.1. Jenis dan Perkembangan Usaha yang Didanai Program PDM-DKE

Bentuk usaha yang didanai program PDM-DKE bervariasi diantara responden. Dari 30 responden 13,33 persen diantaranya membuka usaha baru yaitu untuk membeli becak dan ternak ayam. Sedangkan 86,70 persen responden, menggunakan dana bantuan program PDM-DKE untuk menambah modal pada usaha yang sudah ada sebelum krisis ekonomi. Dan ada 1 responden yang menggunakan semua dana bantuan untuk konsumsi (Tabel 31). Hal ini terjadi karena TPKd/k mensyaratkan penerima bantuan diutamakan bagi mereka yang mempunyai usaha produktif dan perlu tambahan modal. Dengan demikian masyarakat yang pengangguran dan termasuk Keluarga Pra Sejahtera atau Keluarga Sejahtera I kurang mendapat perhatian.

Tabel 31. Bentuk Usaha Responden yang Didanai Program PDM-DKE

Bentuk Usaha	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Usaha Lama	25	83,33
Usaha Baru	4	13,33
Konsumsi	1	3,34
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Dari Tabel 32 terlihat bahwa dana bantuan program PDM-DKE lebih banyak digunakan untuk menambah modal pada usaha dagang (33,33 persen) dan selanjutnya diikuti oleh usaha jasa (30,00 persen). Dari 30 responden, ada 1 responden (3,34 persen) yang menggunakan seluruh pinjamannya untuk konsumsi. Usaha dagang menempati urutan tertinggi karena kebanyakan masyarakat desa Guworejo mempunyai usaha sampingan berdagang yang dianggap cepat menghasilkan uang dan mudah dilakukan siapa saja. Sebagian besar masyarakat desa Guworejo masih menggunakan sepeda sebagai alat transportasi sehingga membuka bengkel sepeda sebagai usaha jasa memberikan penghasilan yang cukup menguntungkan. Responden yang mempunyai usaha ternak ayam dan industri yang didanai program PDM-DKE masing-masing sebesar 13,33 persen. Sedangkan responden yang usaha pertaniannya didanai program PDM-DKE hanya sebesar 6,67 persen, ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih usaha yang cepat menghasilkan supaya hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar angsuran.

Pemilihan jenis usaha yang didanai responden sebagian besar dilakukan sendiri dengan mempertimbangkan usaha yang sudah dijalankan sebelum dana bantuan turun (Tabel 13). Sedikit responden yang pemilihan jenis usahanya diusulkan oleh FD, Ketua RW/RT, ataupun Bayan. Mereka yang pemilihan usahanya dibantu pada umumnya adalah usaha baru dan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan mempertimbangkan kemauan berusaha mereka.



Tabel 32. Jenis Usaha Responden yang Didanai Program PDM-DKE

Jenis Usaha	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Ternak ayam	4	13,33
Pertanian	2	6,67
Usaha dagang	10	33,33
Usaha jasa	9	30,00
Industri dan Kerajinan	4	13,33
Konsumsi	1	3,34
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Di desa Guworejo, dana bantuan program PDM-DKE sudah digulirkan dan hampir semua warga sudah merasakannya. Dari Tabel 33 terlihat bahwa 70,00 persen responden pernah meminjam 2 kali, 23,33 persen pernah meminjam 1 kali dan 6,67 persen telah meminjam 3 kali. Warga diperbolehkan meminjam lagi tetapi dengan syarat pinjaman yang terdahulu harus sudah lunas dan harus antri terlebih dahulu dalam daftar tunggu peminjam.

Tabel 33. Frekuensi Responden Meminjam Bantuan Program PDM-DKE

Frekuensi	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	7	23,33
2	21	70,00
3	2	6,67
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Dengan melihat frekuensi peminjaman responden yang bervariasi, maka jumlah pinjaman yang diterima setiap responden juga berbeda (Tabel 34). Sebagian besar responden (53,34 persen) mempunyai total pinjaman sejumlah Rp 200.000,00 sampai Rp 250.000,00. Besarnya pinjaman yang diterima responden berkisar antara Rp 100.000,00 sampai Rp 200.000,00 sekali meminjam dan sudah ditentukan oleh

pihak pengelola tingkat desa (TPKd/k). Dana bantuan yang diterima sudah sesuai dengan yang diajukan dan tidak ada potongan dalam bentuk apapun. Penerimaannya dilakukan pada saat pertemuan rutin RT karena mempertimbangkan semua warga bisa hadir sehingga bersifat terbuka.

Tabel 34. Jumlah Pinjaman Bantuan Program PDM-DKE Responden (Sampai Juli 2000)

Jumlah Pinjaman (Rp)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
100.000 – 150.000	7	23,33
200.000 – 250.000	16	53,34
> 300.000	7	23,33
Total	30	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Responden mengeluhkan kecilnya dana bantuan program PDM-DKE yang diberikan kepada masyarakat. Mereka beranggapan bahwa dengan dana bantuan sebesar Rp 100.000,00 masih jauh dari cukup untuk menambah modal usaha. Tetapi ada juga responden yang mengatakan bahwa dana bantuan yang diterima sudah mencukupi untuk tambahan modal bahkan sisanya digunakan untuk konsumsi. Besarnya dana bantuan yang dibutuhkan untuk menambah modal usaha tergantung dari jenis usaha yang didanai, semakin besar skala usahanya semakin besar pula tambahan modal yang dibutuhkan.

Dana bantuan program PDM-DKE yang diberikan kepada penerima ternyata tidak semuanya digunakan untuk tambahan modal ataupun sebagai modal membuka usaha baru, tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari meskipun persentase penggunaan setiap penerima berbeda-beda. Tabel 35 menunjukkan 55,59 persen dana bantuan digunakan untuk menambah modal usaha yang sedang dijalankan, sedangkan yang digunakan sebagai modal untuk membuka usaha sebesar 9,29 persen. Penggunaan dana bantuan untuk kebutuhan konsumsi

sebesar 19,87 persen dan sisanya sebesar 15,25 persen digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti membayar uang sekolah, membayar tagihan dan lain-lain.

Tabel 35. Penggunaan Dana Bantuan Program PDM-DKE oleh Responden

Digunakan untuk...	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Membuka usaha baru	685.000,00	9,29
Menambah modal	4.100.000,00	55,59
Konsumsi	1.465.000,00	119,87
Lain-lain	1.125.000,00	15,25
Total	7.375.000,00	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Usaha yang didanai bantuan program PDM-DKE diharapkan dapat terus berkembang dan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Total modal responden pada saat menerima dana bantuan semua meningkat tetapi satu bulan terakhir hanya 9 responden yang meningkat dan cenderung stabil. Pada saat menerima dana bantuan volume produksi responden yang meningkat sebesar 63,33 persen sedangkan 36,67 persen lainnya stabil, hal ini terjadi karena tambahan modal yang tidak besar. Namun peningkatan ini hanya sesaat karena tambahan modal yang diberikan hanya kecil sedangkan harga-harga faktor produksi meningkat sehingga volume produksi kembali seperti semula. Tenaga kerja yang dipakai tidak berubah karena usaha yang dijalankan dikerjakan oleh anggota keluarga, namun 1 tahun terakhir ada 10,00 persen responden yang mengatakan tenaga kerjanya bertambah. Jika total modal dan volume produksi meningkat, maka pendapatan rumah tangga juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan terbesar terjadi pada saat menerima bantuan yaitu sebesar 70,00 persen responden. Pada sebagian besar responden (90,00 persen) mengatakan bahwa jangkauan pasar, kualitas, dan kemasan tidak berubah karena dana bantuan yang diterima masih sangat kecil sehingga belum dapat untuk memperbaiki segi pemasarannya. Pemberian dana bantuan lebih digunakan untuk



menambah volume produksi saja dibandingkan pemasarannya. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 36 dan Lampiran 10.

Tabel 36. Perkembangan Usaha Setelah Menerima Dana Bantuan Program PDM-DKE

Keterangan	Saat Menerima Bantuan PDM-DKE						Saat Menerima Bantuan PDM-DKE											
	Naik		Stabil		Turun		1 Bulan Terakhir				1 Tahun Terakhir							
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Total modal	30	100,00	-	-	-	-	9	30,00	19	63,33	2	6,67	15	50,00	12	40,00	3	10,00
Volume produksi	19	63,33	11	36,67	-	-	11	36,67	17	56,67	2	6,67	17	56,67	10	33,33	3	10,00
Jumlah tenaga kerja	-	-	30	100,00	-	-	3	10,00	17	56,67	-	-	3	10,00	17	56,67	-	-
Pendapatan	21	70,00	9	30,00	-	-	11	36,67	17	56,67	2	6,67	21	70,00	7	23,33	2	6,6
Pemasaran																		
a. Jangkauan pasar	3	10,00	27	90,00	-	-	3	10,00	27	90,00	-	-	3	10,00	27	90,00	-	-
b. Kualitas	3	10,00	27	90,00	-	-	2	6,67	28	93,33	-	-	3	10,00	27	90,00	-	-
c. Kemasan	1	3,33	29	96,67	-	-	1	3,33	29	96,67	-	-	1	3,33	29	96,67	-	-

Sumber : Data primer, diolah

7.2.2. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pendapatan Usaha yang Didanai Program PDM-DKE

Peubah-peubah yang dimasukkan dalam persamaan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE adalah peubah-peubah yang berhubungan langsung dengan kegiatan program PDM-DKE, yaitu peubah umur (X_1), pendidikan (X_2), jumlah tanggungan keluarga (X_3), tenaga kerja (X_4), lama berusaha (X_5), jumlah pinjaman (X_6), tingkat bunga (X_7), perubahan output dari usaha yang didanai program PDM-DKE (X_8), jenis kelamin (X_9) dan jumlah modal yang digunakan usaha (X_{10}). Peubah jenis kelamin dimasukkan dalam model sebagai peubah *dummy*, dimana diasumsikan jenis kelamin perempuan = 0 dan laki-laki = 1.

Umur penerima dana bantuan program PDM-DKE tidak dibatasi sehingga semua golongan umur dapat menerima dana bantuan. Dari umur dapat diduga bahwa semakin bertambah umur maka akan menurunkan perubahan pendapatan usaha yang

didanai program PDM-DKE, karena semakin tua akan semakin tidak produktif sehingga pendapatannya berkurang. Tingkat pendidikan menunjukkan pendidikan formal yang pernah diikuti di sekolah. Tingkat pendidikan diduga akan berpengaruh positif, artinya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akan meningkatkan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE, karena mereka yang berpendidikan tinggi akan lebih rasional dalam memanfaatkan dana bantuan yang diperoleh. Jumlah tanggungan keluarga merupakan indikator tingkat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi keluarga tersebut, sehingga dapat diduga jika jumlah tanggungan keluarga meningkat maka perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE akan menurun. Tenaga kerja yang digunakan adalah dari anggota keluarga sendiri karena usaha yang dilakukan tidak berskala besar. Tenaga kerja diduga berpengaruh positif, artinya meningkatnya tenaga kerja yang digunakan akan meningkatkan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE. Lama berusaha mempunyai kaitan yang erat terhadap perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE. Semakin lama mereka menjalankan usaha diduga akan semakin meningkatkan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE.

Jumlah pinjaman menunjukkan besarnya dana bantuan program PDM-DKE yang diperoleh. Jumlah pinjaman diduga berpengaruh positif, artinya semakin besar pinjaman yang diperoleh maka semakin besar modal yang digunakan sehingga akan meningkatkan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE. Tingkat bunga yang dikenakan pada penerima dana bantuan merupakan harga yang dibayar untuk mendapatkan pinjaman. Dari tingkat bunga diduga bahwa semakin besar bunga yang ditetapkan akan menurunkan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE. Perubahan output merupakan indikator peningkatan pendapatan sehingga dapat diduga bahwa jika perubahan output meningkat maka perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE juga akan meningkat. Jenis kelamin merupakan peubah *dummy* dimana diasumsikan perempuan = 0 dan laki-laki = 1. Jenis kelamin diduga berpengaruh positif terhadap perubahan

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE. Jadi apabila jenis kelamin yang menerima dana bantuan adalah perempuan maka perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE lebih kecil dibandingkan perubahan pendapatan yang diusahakan laki-laki. Modal yang digunakan usaha yang didanai program PDM-DKE diduga akan berpengaruh positif, artinya jika modal semakin besar maka akan memperbesar perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE.

Untuk mengetahui pengaruh dari berbagai peubah tersebut, digunakan Analisa Regresi Berganda. Semua peubah yang dimasukkan dalam persamaan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE menghasilkan koefisien regresi dengan tanda yang sesuai harapan. Persamaan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE adalah sebagai berikut:

$$Y^* = 948883 - 61617 X_1 + 231293 X_2 - 343078 X_3 + 139849 X_4 + 61327 X_5 + 4748 X_6 - 471038 X_7 + 2,65 X_8 + 565710 X_9 + 0,019 X_{10}$$

Dengan melihat Tabel 37, dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,814. Nilai koefisien determinasi (R^2) tersebut mempunyai arti bahwa 81,4 persen keragaman perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE dapat dijelaskan oleh peubah umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, tenaga kerja, lama berusaha, jumlah pinjaman, tingkat bunga, perubahan output usaha yang didanai program PDM-DKE, jenis kelamin dan jumlah modal yang digunakan usaha. Sedangkan 18,6 persen pengaruh lainnya dijelaskan oleh peubah lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan.

Tabel 37. Hasil Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pendapatan Usaha yang Didanai Program PDM-DKE

Peubah	Koefisien	t_{hitung}	P	VIF
Konstanta	948883	0,53	0,600	
X ₁	-61617	-3,15	0,005*	1,8
X ₂	231293	3,16	0,005*	1,8
X ₃	-343078	-2,43	0,025*	1,4
X ₄	139849	0,47	0,640	1,6
X ₅	61327	1,77	0,093	2,0
X ₆	4748	3,47	0,003*	1,6
X ₇	-471038	-0,49	0,632	1,3
X ₈	2.646	1,71	0,103	1,4
X ₉	565710	1,32	0,201	1,4
X ₁₀	0.0186	0,10	0,924	1,4

S = 965834 R-Sq = 81,4% R-Sq(adj) = 71,6% Durbin-Watson = 2,01

Sumber : Data primer, diolah

Keterangan :

Y* = Perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE (Rp/th)

x₁ = Umur (Tahun)

x₆ = Jumlah pinjaman (Rp)

x₂ = Tingkat pendidikan (Tahun)

x₇ = Tingkat bunga (Persen)

x₃ = Jumlah tanggungan keluarga (jiwa)

x₈ = Perubahan output (Rp)

x₄ = Tenaga kerja (jiwa)

x₉ = Jenis Kelamin (0 = perempuan ; 1 = laki-laki)

x₅ = Lama berusaha (Tahun)

x₁₀ = Jumlah modal (Rp)

* : Signifikan pada taraf kepercayaan 95%

Pengaruh dari masing-masing peubah bebas terhadap peubah tak bebas dapat dilihat dari nilai t_{hitung} . Nilai t_{hitung} dengan tingkat kepercayaan 95 persen menunjukkan bahwa peubah bebas yang mempunyai pengaruh nyata terhadap perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE adalah peubah umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan jumlah pinjaman. Sedangkan peubah yang tidak berpengaruh nyata adalah peubah tenaga kerja, lama berusaha, tingkat bunga, perubahan output, jenis kelamin dan jumlah modal.

Selain pengaruh dari masing-masing peubah bebas di atas juga dapat diketahui pengaruh keseluruhan peubah bebas secara bersama-sama terhadap peubah tak bebas

dengan melihat nilai F_{hitung} . Nilai F_{hitung} yang diperoleh sebesar 8,30 yang nyata pada tingkat kepercayaan 95 persen. Artinya peubah dugaan secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap perubahan total pendapatan rumah tangga atau paling tidak ada satu dari beberapa peubah dugaan yang berpengaruh nyata terhadap perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE.

Hasil analisis ragam model terhadap perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE dari model ekonometrik dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38. Analisis Ragam Model Perubahan Pendapatan Usaha yang Didanai Program PDM-DKE

Sumber	DB	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F_{hitung}	P
Regresi	10	7,74683E+13	7,74683E+12	8,30	0,000
Sisa	19	1,77239E+13	9,32836E+11		
Total	29	9,51921E+13			

Sumber : Data primer, diolah

Model ekonometrik yang diperoleh memberikan nilai Durbin-Watson sebesar 2,01. Nilai ini memberikan arti bahwa dalam model tidak terjadi autokorelasi berderajat. Berdasarkan uji Marquardt, persamaan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE tidak mengalami masalah multikolinier, karena nilai VIFnya tidak ada yang lebih besar dari 10. Dari kriteria operasional dan statistik yang dilakukan maka persamaan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE yang dihasilkan dari pendugaan regresi sudah menunjukkan koefisien regresi yang diharapkan.

Dari uji statistik menunjukkan peubah umur (X_1) memberikan hasil sesuai dugaan yaitu berpengaruh negatif terhadap perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE selain itu juga berpengaruh nyata. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan umur satu persen akan menurunkan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE sebesar 61.617 persen *ceteris paribus*. Umur berpengaruh terhadap produktifitas kerja. Masyarakat usia produktif adalah berada pada umur 17 –

45 tahun, sehingga bertambahnya umur di atas 45 tahun akan menurunkan produktifitas kerja yang pada akhirnya menurunkan pendapatan mereka.

Peubah tingkat pendidikan (X_2) berpengaruh positif dan nyata terhadap perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE. Ini dapat dilihat dari nilai regresi sebesar 2.311.293, artinya setiap peningkatan pendidikan sebesar satu persen akan meningkatkan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE sebesar 2.311.293 persen *ceteris paribus*. Hal ini secara logika ekonomi dapat diterima karena jika pendidikan penerima dana bantuan tinggi maka mereka akan lebih rasional atau akan lebih tepat dalam memanfaatkan dana bantuan yang diperoleh sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hasil regresi menunjukkan bahwa peubah jumlah tanggungan keluarga (X_3) mempunyai hubungan yang negatif sebesar -343.078 dan berpengaruh nyata. Ini menunjukkan bahwa penambahan tanggungan keluarga sebesar satu persen akan menurunkan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE sebesar 343.078 persen *ceteris paribus*. Keadaan ini dimungkinkan karena dengan bertambahnya tanggungan keluarga maka pengeluaran untuk kebutuhan keluarga seperti konsumsi makin meningkat sehingga ketersediaan dana untuk modal berusaha menjadi kecil yang akhirnya menyebabkan tidak berkembangnya usaha yang dijalankan.

Koefisien regresi hasil dugaan regresi untuk peubah tenaga kerja (X_4) sebesar 139.849. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan tenaga kerja sebesar satu persen akan meningkatkan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE sebesar 139.849 persen *ceteris paribus*. Pada umumnya tenaga kerja yang digunakan adalah anggota keluarga sendiri, karena usaha yang dijalankan merupakan usaha rumah tangga yang tidak membutuhkan tenaga kerja banyak. Selain itu juga untuk mengurangi biaya produksi apabila menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga.

Peubah lama berusaha (X_5) penerima dana bantuan berpengaruh positif sebesar 61.327. Artinya bertambahnya pengalaman berusaha sebesar satu persen maka akan meningkatkan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-



DKE sebesar 61.327 persen *ceteris caribus*. Lama berusaha yang dimaksud adalah pengalaman penerima dana bantuan dalam mengelola usaha sebelum mendapatkan dana bantuan program PDM-DKE. Semakin lama usaha dijalankan menunjukkan kemampuan usaha tersebut sehingga dapat dengan mudah menyerap modal yang diberikan yang pada akhirnya mampu mengembangkan skala usaha.

Hasil dugaan regresi menunjukkan bahwa peubah jumlah pinjaman (X_6) mempunyai hubungan positif dengan koefisien yaitu 4.748 dan berhubungan nyata. Hubungan tersebut sesuai dengan hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Hasil regresi ini berarti bahwa setiap peningkatan jumlah pinjaman satu persen akan meningkatkan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE sebesar 4.748 persen *ceteris caribus*. Pinjaman yang diperoleh ini merupakan dana bantuan PDM-DKE yang digunakan sebagai modal untuk membuka usaha baru ataupun sebagai tambahan modal usaha yang sedang dijalankan. Pemberian pinjaman dengan jumlah yang besar diharapkan mempercepat perkembangan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Peubah tingkat bunga (X_7) berhubungan negatif yaitu -471.038. Artinya meningkatnya tingkat bunga sebesar satu persen maka akan menurunkan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE sebesar 61.327 persen *ceteris caribus*. Hal ini bisa saja terjadi yaitu apabila tingkat bunga terus meningkat sedangkan masyarakat tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tidak lagi meminjam dana bantuan program PDM-DKE sehingga modal yang digunakan akan berkurang. Dengan modal yang kecil, masyarakat tidak akan mampu mengembangkan usahanya.

Peubah perubahan output (X_8) usaha yang didanai program PDM-DKE berpengaruh positif sebesar 2,646. Artinya bertambahnya perubahan output sebesar satu persen maka akan meningkatkan perubahan pendapatan dari usaha yang didanai program PDM-DKE sebesar 2,646 persen *ceteris caribus*. Perubahan output yang dimaksud adalah perkembangan jumlah output dari usaha yang didanai program



PDM-DKE pada tahun 1998 sampai 2000. Meningkatnya jumlah output yang dihasilkan akan memperbesar skala usaha sehingga pendapatan juga akan meningkat.

Hasil dugaan regresi menunjukkan bahwa peubah *dummy* jenis kelamin (X_9) mempunyai hubungan positif terbesar yaitu 565.710. Hal ini menunjukkan bahwa penerima dana bantuan yang berjenis kelamin laki-laki mempunyai perbedaan perubahan pendapatan dari usaha yang didanai program PDM-DKE 565.710 lebih besar daripada penerima dana bantuan yang berjenis kelamin perempuan. Ini menunjukkan bahwa laki-laki merupakan kepala keluarga yang harus mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga mata pencaharian utama dipengang laki-laki. Sedangkan usaha yang dikelola perempuan adalah usaha yang sifatnya sampingan sehingga pendapatan yang diperoleh tidak terlalu besar.

Hasil dugaan regresi menunjukkan bahwa peubah jumlah modal (X_{10}) mempunyai hubungan positif dengan koefisien yaitu 0,0186. Hubungan tersebut sesuai dengan hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Hasil regresi ini berarti bahwa setiap peningkatan satu persen jumlah modal akan meningkatkan perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE sebesar 0,0186 persen *ceteris paribus*. Untuk mengembangkan usaha senantiasa dibutuhkan modal, baik modal sendiri maupun modal yang berasal dari luar yang berupa pinjaman. Jumlah modal yang dimaksud pada penelitian ini adalah modal yang berasal dari modal sendiri dan modal dari luar selain pinjaman dana bantuan program PDM-DKE.

7.3. Pengaruh Program PDM-DKE terhadap Pendapatan Rumah Tangga

7.3.1. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga

Perubahan pendapatan rumah tangga dihitung dari selisih pendapatan akhir dengan pendapatan awal yang nilainya telah disesuaikan terlebih dahulu. Pendapatan awal adalah pendapatan responden pada tahun 1998 dimana program PDM-DKE belum dilaksanakan (program PDM-DKE dilaksanakan mulai awal tahun 1999) dan pendapatan akhir adalah pendapatan pada tahun 2000 dimana program PDM-DKE

sudah dalam tahap pelestarian. Tingkat suku bunga yang digunakan adalah suku bunga tabungan rata-rata pada tahun 2000 (sampai bulan Juli).

Perubahan pendapatan ini akan menunjukkan apakah pendapatan masyarakat berubah selama dua tahun dengan adanya program PDM-DKE. Perubahan ini bisa positif bisa juga negatif. Perubahan positif apabila pendapatan masyarakat mengalami peningkatan dan perubahan negatif apabila terjadi penurunan pendapatan.

Besarnya rata-rata perubahan pendapatan adalah Rp 789.042,63 dimana rata-rata untuk pendapatan akhir adalah Rp 6.507.600,00 dan pendapatan awal yang telah disesuaikan adalah Rp 5.718.557,81. Ada 7 responden yang perubahan pendapatannya negatif. Hal ini dikarenakan menurunnya pendapatan dari usahatani pertanian yang harga jualnya mengalami penurunan, dan terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Penurunan pendapatan bervariasi, mulai dari Rp 94.960,94 sampai Rp 3.698.437,50. Sedangkan 23 responden mengalami perubahan pendapatan yang positif. Peningkatan pendapatan ini bervariasi mulai dari Rp 157.062,50 sampai Rp 4.094.046,88.

Dengan demikian perubahan pendapatan dari tahun 1998 ke tahun 2000 dapat dikatakan perubahan yang positif karena sebagian besar responden total pendapatannya mengalami peningkatan.

Tabel 39. Perubahan Total Pendapatan Responden

No Responden	Pendapatan Akhir Tahun 2000 (Rp)	Pendapatan Awal (Tahun 1998) yang telah Disesuaikan (Rp)	Perubahan Pendapatan (Rp)
1	3.900.000,00	2.657.812,50	1.242.187,50
2	5.400.000,00	4.708.125,00	691.875,00
3	7.970.000,00	6.562.265,63	1.407.734,38
4	6.090.000,00	6.252.187,50	-162.187,50
5	4.180.000,00	3.341.250,00	838.750,00
6	2.008.000,00	2.288.250,00	-280.250,00
7	2.413.000,00	2.841.328,13	-428.328,13
8	6.228.000,00	4.389.187,50	1.838.812,50
9	6.986.000,00	2.891.953,13	4.094.046,88
10	6.150.000,00	5.756.062,50	393.937,50
11	3.096.000,00	2.916.000,00	180.000,00
12	6.114.000,00	5.292.843,75	821.156,25
13	5.700.000,00	1.898.437,50	3.801.562,50
14	8.348.000,00	5.346.000,00	3.002.000,00
15	5.808.000,00	5.042.250,00	765.750,00
16	2.745.000,00	3.713.343,75	-968.343,75
17	6.300.000,00	9.998.437,50	-3.698.437,50
18	2.268.000,00	1.974.375,00	293.625,00
19	6.490.000,00	5.363.718,75	1.126.281,25
20	5.825.000,00	5.919.960,94	-94.960,94
21	1.560.000,00	1.974.375,00	-414.375,00
22	3.942.000,00	2.920.429,69	1.021.570,31
23	33.200.000,00	32.653.125,00	546.875,00
24	10.045.000,00	8.220.234,38	1.824.765,63
25	6.155.000,00	5.043.515,63	1.111.484,38
26	7.665.000,00	6.005.390,63	1.659.609,38
27	9.125.000,00	8.315.156,25	809.843,75
28	11.475.000,00	10.694.531,25	780.468,75
29	4.172.000,00	2.855.250,00	1.316.750,00
30	3.878.000,00	3.720.937,50	157.062,50
Jumlah	195.236.000,00	171.556.734,38	23.679.265,63
Rata-rata	6.507.866,67	5.718.557,81	789.308,86

Sumber : Data primer, diolah

Kemampuan program PDM-DKE dalam mengentaskan kemiskinan dilakukan dengan membandingkan pendapatan per kapita peserta program PDM-DKE sebelum dan sesudah program PDM-DKE dilaksanakan dan disajikan pada Tabel 40 di bawah ini.

Tabel 40. Perbandingan Pendapatan per Kapita Responden Sebelum dan Sesudah Program PDM-DKE dilaksanakan

No	Pendapatan per Kapita (Kg/Kap/th)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	< 240 (Sangat miskin)		
	a. Sebelum Program PDM-DKE	7	23,33
	b. Sesudah Program PDM-DKE	3	10,00
2	240 – 320 (Miskin)		
	a. Sebelum Program PDM-DKE	8	26,67
	b. Sesudah Program PDM-DKE	3	10,00
3	320 – 480 (Hampir cukup)		
	a. Sebelum Program PDM-DKE	9	30,00
	b. Sesudah Program PDM-DKE	10	33,33
4	480 (Cukup)		
	a. Sebelum Program PDM-DKE	6	20,00
	b. Sesudah Program PDM-DKE	14	46,67

Sumber : Data primer, diolah

Ditinjau dari kategori kemiskinan, setelah adanya program PDM-DKE terjadi peningkatan pendapatan per kapita atau dengan kata lain terjadi penurunan kemiskinan. Dari hasil analisis di atas dapat dilihat bahwa pendapatan per kapita responden sesudah program PDM-DKE secara umum mengalami peningkatan. Peningkatan ini ditunjukkan dengan menurunnya kategori pendapatan responden sangat miskin (23,33 persen) dan miskin (26,67 persen) pada sebelum program PDM-DKE menjadi masing-masing sebesar 10,00 persen sesudah program PDM-DKE. Disamping itu juga adanya peningkatan kategori pendapatan responden sesudah program PDM-DKE dari 30,00 persen menjadi 33,33 persen (hampir cukup) dan dari 20,00 persen menjadi 46,67 persen (cukup). Dengan demikian sebagian besar responden (46,67 persen) sudah berhasil melampaui garis kemiskinan

(480/kg/kap/th). Hanya yang menjadi masalah apakah perubahan tersebut terjadi benar karena pengaruh pelaksanaan program PDM-DKE/perkembangan usaha yang didanai program PDM-DKE atau lebih karena pengaruh perubahan sumber pendapatan lain. Hal ini akan dibahas di sub bab berikut.

7.3.2. Pengaruh Program PDM-DKE terhadap Pendapatan Rumah Tangga

Kebanyakan pedesaan Jawa masih mengikuti pola nafkah ganda, yaitu suatu pola usaha dan bekerja di sektor pertanian dan non pertanian. Dengan demikian pendapatan rumah tangga masyarakat dapat berasal dari berbagai bidang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 41.

Tabel 41. Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Pendapatan (Tahun 1998 dan 2000)

Sumber Pendapatan	Tahun 1998		Tahun 2000	
	Jumlah (Rp)	Persentase (%)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Sektor pertanian				
a. Usahatani padi sawah	872.817,19	15,26	756.000,00	11,62
b. Peternakan/perikanan	92.812,50	1,62	45.333,33	0,70
c. Buruh pertanian	179.718,75	3,14	194.133,33	2,97
Sektor non pertanian				
b. Perdagangan	526.310,16	9,22	558.800,00	8,59
c. Industri rumah tangga	43.031,25	0,75	30.000,00	0,46
d. Pegawai dan Jasa	1.220.568,75	21,34	1.521.766,67	23,38
e. Buruh non pertanian	658.884,38	11,52	662.266,67	10,18
Usaha PDM-DKE				
Sektor pertanian	151.875,00	2,66	180.066,67	2,77
Sektor non pertanian	1.974.539,85	34,49	2.559.500,00	39,33
Total	5.718.557,81	100,00	6.507.866,67	100,00

Sumber : Data primer, diolah

Sektor pertanian merupakan mata pencaharia utama sebagian besar masyarakat desa Guworejo. Sumber pendapatan dari sektor pertanian dapat berasal dari bidang usahatani padi sawah, peternakan/perikanan dan buruh pertanian. Sektor non pertanian memberikan pengaruh yang besar terhadap total pendapatan rumah

tangga karena sebagian besar masyarakat desa Guworejo bekerja pada bidang ini. Sumber pendapatan dari sektor non pertanian berasal dari bidang perdagangan, industri rumah tangga, pegawai dan jasa, dan buruh non pertanian. Sedangkan pendapatan dari usaha yang didanai program PDM-DKE dapat berasal dari sektor pertanian maupun sektor non pertanian.

Secara proporsi sumber pendapatan dari sektor non pertanian memberikan sumbangan terbesar terhadap total pendapatan rumah tangga, yaitu sebesar 42,82 persen pada tahun 1998 dan 42,61 persen pada tahun 2000 dibandingkan dari sektor pertanian, meskipun sektor pertanian masih merupakan mata pencaharian utama di desa Guworejo. Proporsi sumber pendapatan dari sektor pertanian terhadap total pendapatan rumah tangga sebesar 20,02 persen pada tahun 1998 dan 15,29 persen pada tahun 2000. Sedangkan usaha yang didanai program PDM-DKE memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap total pendapatan rumah tangga, yaitu sebesar 37,15 persen pada tahun 1998 dan 42,10 persen pada tahun 2000.

Meskipun pendapatan dari usaha yang didanai program PDM-DKE mempunyai proporsi lebih kecil dibandingkan pendapatan dari sektor non pertanian, tetapi pendapatan dari usaha yang didanai program PDM-DKE mengalami peningkatan proporsi sebesar 4,95 persen. Sedangkan pendapatan dari sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 4,73 persen begitu juga pendapatan dari sektor non pertanian yaitu sebesar 0,21 persen. Dengan demikian program PDM-DKE dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dimana rata-rata perubahan pendapatan dari usaha yang didanai program PDM-DKE sebesar Rp 489.751,82.





VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

8.1. Kesimpulan

Pelaksanaan program PDM-DKE di desa Guworejo dijalankan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Program PDM-DKE yaitu melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian. Hanya saja masing-masing tahapan tersebut belum dilaksanakan secara intensif sehingga belum sesuai dengan tujuannya, khususnya dalam tahap persiapan (sosialisasi) dan perencanaan. Dana bantuan program PDM-DKE di desa Guworejo seluruhnya digunakan untuk kegiatan ekonomi sebagai modal usaha karena kondisi sarana dan prasarana fisik ekonomi dan non ekonomi masih memadai. Besarnya pinjaman yang diterima berkisar antara Rp 100.000,00 sampai Rp 200.000,00. Nilai bantuan tersebut ditentukan secara sepihak oleh pengelola program PDM-DKE tingkat desa (IPKd/k) dan tidak berdasarkan kebutuhan penerima bantuan program PDM-DKE dan penerima bantuan menilai bantuan tersebut relatif terlalu kecil dibandingkan total modal yang mereka gunakan.

Dana bantuan program PDM-DKE disalurkan dan dikelola oleh 7 kelompok usaha bentukan baru dan seluruh kelompok RT. Penyertaan RT dalam kegiatan tersebut dengan pertimbangan untuk pemerataan dan kelompok RT dianggap sebagai lembaga yang dipercaya dalam mengelola dana bantuan program PDM-DKE. Terdapat perbedaan dalam hal perguliran dana antara yang dikelola kelompok usaha dan kelompok RT. Dalam kelompok RT pengembalian dan perguliran dana berjalan lancar dan sebaliknya yang terjadi di kelompok usaha. Hal ini karena kelompok RT merupakan kelompok yang sudah melembaga dan sudah terbiasa mengelola dana pinjaman dengan pengelolaan secara terbuka (*open management*).

Visi *bottom-up* yang diemban program PDM-DKE sudah diterapkan di desa Guworejo meskipun belum dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Hasil musbangdes tidak disebarluaskan di papan informasi desa kepada masyarakat sehingga tidak ada transparansi dalam perencanaan. Disamping itu ketua RT belum

berfungsi sebagai wakil rakyat melainkan lebih berperan secara pribadi. Selain itu peran aparat pemerintah (kabupaten dan kecamatan) masih dominan dalam pengambilan keputusan alokasi dana.

Fungsi pendampingan oleh Fasilitator Desa (FD) di desa Guworejo hanya dilakukan pada beberapa RT yang terdekat dari tempat tinggal FD. Hal ini karena FD merasa bahwa wilayah kerja satu desa terlalu luas ditambah jumlah kelompok yang terlalu besar. Disamping itu pendampingan yang diberikan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program PDM-DKE tetapi hanya terbatas pada administrasi saja sehingga sebagian besar penerima program PDM-DKE tidak merasa puas dengan pendampingan tersebut dan merasa tidak perlu ada pendampingan. Pendampingan yang mereka harapkan tidak hanya masalah administratif saja tetapi juga masalah yang berkaitan dengan perkembangan usaha.

Secara umum usaha yang didanai program PDM-DKE mengalami peningkatan pendapat yaitu sebesar Rp 489.751,82. Peningkatan pendapatan tersebut lebih disebabkan karena total modal dan volume produksi. Jumlah tenaga kerja, jangkauan pemasaran, kualitas dan kemasan produk tidak mengalami perubahan karena modal yang diberikan hanya cukup untuk menambah volume produksi saja sehingga mengesampingkan pemasarannya. Pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE mengalami peningkatan, meskipun tidak besar karena kecilnya modal.

Dari uji statistik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE menunjukkan bahwa peubah bebas yang mempunyai pengaruh nyata terhadap perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE adalah peubah umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan jumlah pinjaman. Sedangkan peubah yang tidak berpengaruh nyata adalah peubah tenaga kerja, lama berusaha, tingkat bunga, perubahan output, jenis kelamin dan jumlah modal.

Dari pengolahan data persamaan pendapatan diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,814, artinya bahwa 81,4 persen keragaman perubahan pendapatan usaha yang didanai program PDM-DKE dapat dijelaskan oleh peubah

umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, tenaga kerja, lama berusaha, jumlah pinjaman, tingkat bunga, perubahan output usaha yang didanai program PDM-DKE, jenis kelamin dan jumlah modal yang digunakan usaha. Sedangkan 18,6 persen pengaruh lainnya dijelaskan oleh peubah lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan.

Pendapatan rumah tangga peserta program PDM-DKE juga mengalami peningkatan dengan melihat rata-rata perubahan total pendapatan rumah tangga peserta program PDM-DKE sebelum dan sesudah program PDM-DKE dilaksanakan yaitu sebesar Rp 789.042,19 dan terjadi penurunan kemiskinan dengan membandingkan pendapatan per kapita sebelum dan sesudah program PDM-DKE dilaksanakan. Penurunan kemiskinan dilihat dari berkurangnya jumlah peserta program kategori sangat miskin dan miskin serta meningkatnya jumlah peserta program kategori hampir cukup dan cukup. Peningkatan pendapatan ini bukan semata-mata karena adanya bantuan program PDM-DKE saja, melainkan bisa saja dari sektor pendapatan lainnya, karena masyarakat desa Guworejo masih mengikuti pola nafkah ganda.

Peran bantuan program PDM-DKE terhadap peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan tersebut cukup besar dilihat dari besarnya perubahan proporsi pendapatan dari usaha yang didanai program PDM-DKE. Proporsi pendapatan dari usaha yang didanai program PDM-DKE meningkat sebesar 4,95 persen sedangkan proporsi sumber pendapatan dari sektor lainnya justru mengalami penurunan.

8.2. Saran

Mengingat dana bantuan program PDM-DKE mampu meningkatkan usaha dan pendapatan rumah tangga miskin maka program tersebut perlu dilanjutkan dengan melakukan perbaikan dalam beberapa hal demi tercapainya efektifitas tujuan program PDM-DKE :

- a. Dalam hal penentuan sasaran seyogyanya sasaran benar-benar ditujukan pada golongan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan besarnya dana bantuan disesuaikan dengan kebutuhan tambahan modal.
- b. Pembinaan dan pendampingan kepada penerima bantuan perlu dilakukan lebih intensif dari segi kualitasnya oleh instansi terkait agar dalam pelaksanaannya, pelestarian kegiatan dapat berjalan dengan baik. Selain itu sumberdaya manusia pendamping juga harus berkualitas dari segi pendidikan, pengalaman, dan fisik sehingga dapat menjadi panutan masyarakat.
- c. Waktu dalam tahap persiapan dan perencanaan perlu ditinjau ulang kembali supaya proses sosialisasi dan *bottom-up* dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat.
- d. Mengingat pendidikan, jumlah anggota keluarga dan jumlah pinjaman yang diterima berpengaruh nyata, maka keberadaan pendampingan dan peningkatan jumlah bantuan perlu diperhatikan.
- e. Hasil penelitian ini dirasa masih kurang memberikan gambaran pelaksanaan program PDM-DKE secara utuh sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungannya dengan lembaga ekonomi desa dalam menjaga keberlanjutan program PDM-DKE.





DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Shalfi. 1995. *Peranan Pekerja Wanita Sektor Informal dalam Peningkatan Pendapatan dan Pengambilan Keputusan Rumah Tangga*. Skripsi Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Anonymous. 1999a. *Petunjuk Pelaksanaan Program PDM-DKE Tahun 1999/2000*. Tim Koordinasi Pengelola Program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi.
- _____. 1999b. *Pedoman Umum Program PDM-DKE Tahun 1999/2000*. Tim Koordinasi Pengelola Program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi.
- _____. 1999c. *Petunjuk Pengisian Formulir Kegiatan Program PDM-DKE Tahun 1999/2000*. Tim Koordinasi Pengelola Program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi.
- _____. 1999d. *Program PDM-DKE*. Laporan Bulan I. Konsultan Manajemen Tingkat II Kabupaten Bogor.
- Arif, Burhanul. 1997. *Tinjauan Analisis Sumber Pendapatan dan Distribusi Pendapatan Petani pada Laban Padi Sawah Beririgasi dan Laban Kering*. Skripsi Sarjana. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Biro Pusat Statistik. 1994. *Kemiskinan dan Pemerataan Pembangunan di Indonesia 1976-1990, dan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tingkat Nasional dan Propinsi 1994*. Jakarta.
- BKKBN. 1996. *Ekonomi Keluarga Bangkit Kemiskinan Makin Sedikit*. Gramedia. Jakarta.
- BPS. 1993. *Desa Miskin 1993: Penjelasan dan Metodologi*. Jakarta.
- Friedmann, John. 1992. *EMPOWERMENT. The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers. Three Cambridge Center. Cambridge, Massachusetts 02142. USA.
- Kartasamita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES. Jakarta.

@Hak Cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

- Haeruman J.S, Herman. 1997. *Strategi Kebijakan dan Program Pembangunan Masyarakat Desa: Ke Arab Integrasi Perekonomian Kota-Desa*. Mimbar Sosek, Journal of Agricultural and Resource Sosio-Ekonomics. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Julianta, Heri. 1997. *Evaluasi Pelaksanaan Program IDT*. Skripsi Sarjana. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kompas. 1999. *Pengentasan Kemiskinan*. 18 Agustus.
- Mardinus. 1995. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Suatu Tinjauan Umum. Tesis Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Marina A, D. Made. 1997. *Peranserta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Inpres Desa Tertinggal*. Skripsi Sarjana. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Marita. 1999. *Produksi dan Pendapatan Petani di Areal Percontohan Usaha Pelestarian SDA (UPSA), Areal Dampak, dan Areal Non Proyek*. Skripsi Sarjana. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mubyarto. 1985. *Peluang Kerja Dan Berusaha Di Pedesaan*. BPF. Yogyakarta.
- _____ 1996. *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*. Aditya Media. Jakarta.
- _____ 1997. *IDT dan Program Menghapus Kemiskinan*. Aditya Media. Jakarta.
- Muchtar, Neni M. 1997. *Interaksi Sosial Pendamping Dengan Pokmas Dalam Pelaksanaan Program IDT*. Skripsi Sarjana. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Papilaya, Eddy Chiljon. 1998. *Tingkat Kemandirian Peserta dan Non Peserta Program Pemberdayaan "Ekonomi Rakyat"*. Tesis Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Saharti. 1998. *Tinjauan Pelaksanaan Program IDT dan Pengaruhnya Terhadap Pengentasan Kemiskinan*. Skripsi Sarjana. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sajogyo dkk. 1999. *Memacu Perekonomian Rakyat*. Bappenas dan YAE. Jakarta.

Samuelson, Paul A dan William D. Nordhaus. 1989. *Ekonomi*. Edisi Keduabelas. Jilid 2. Erlangga. Jakarta.

Sanit, Arbi. 1991. *Penanggulangan Kemiskinan: Di antara Pendekatan Kemasyarakatan dan Politik*. Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Penanggulangan Kemiskinan 20 – 24 Mei 1991. Bogor.

Simanjuntak, Helen E. 1995. *Pendekatan Pembangunan Dari Bawah Dalam Rangka Pembangunan Wilayah*. Studi Pustaka. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sjamsudin, Patongai H. 1988. *Evaluasi Dampak Transmigrasi Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Pola Pengeluaran Warga Transmigrasi dan Masyarakat Sekitarnya*. Tesis Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan. LPFE UI. Jakarta.

Sulacman, YT. 1997. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja dan Pendapatan Pekerja pada Industri Kecil Tas Kulit*. Skripsi Sarjana. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi kedua. PT. Bina Rena Pariwara. Jakarta.

_____ 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Gramedia. Jakarta.

Sumodiningrat, Gunawan, dkk. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Impac. Jakarta.

Ursula, Fancisca B. 1995. *Kajian Keragaman Sumber dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani pada Laban Sawah dan Laban Kering*. Skripsi Sarjana. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

PSP dan JICA. 2000. *Study on The Status of Implementation of The Development Program Initiated by The Local Government and Village Group in West Java*. PSP LP IPB. Bogor.

P3R-YAE. 1999. *Menuju Program Partisipatif dan Berkelanjutan*. Pusat P3R-YAE dan Pemda Jawa Barat. Bogor.

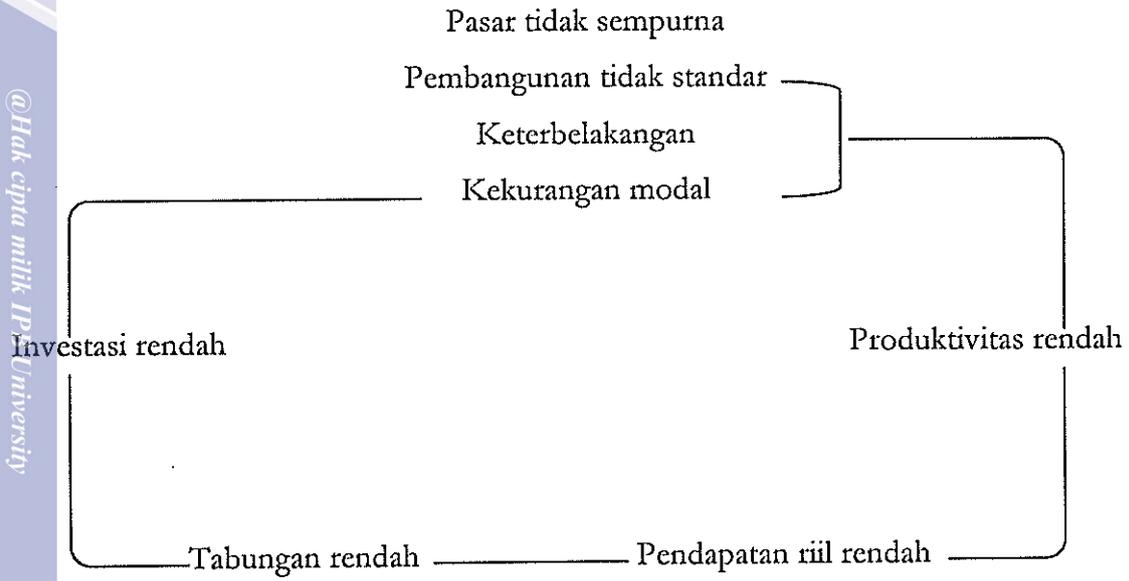


@Hak cipta milik IPB University

IPB University

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lingkaran Kemiskinan

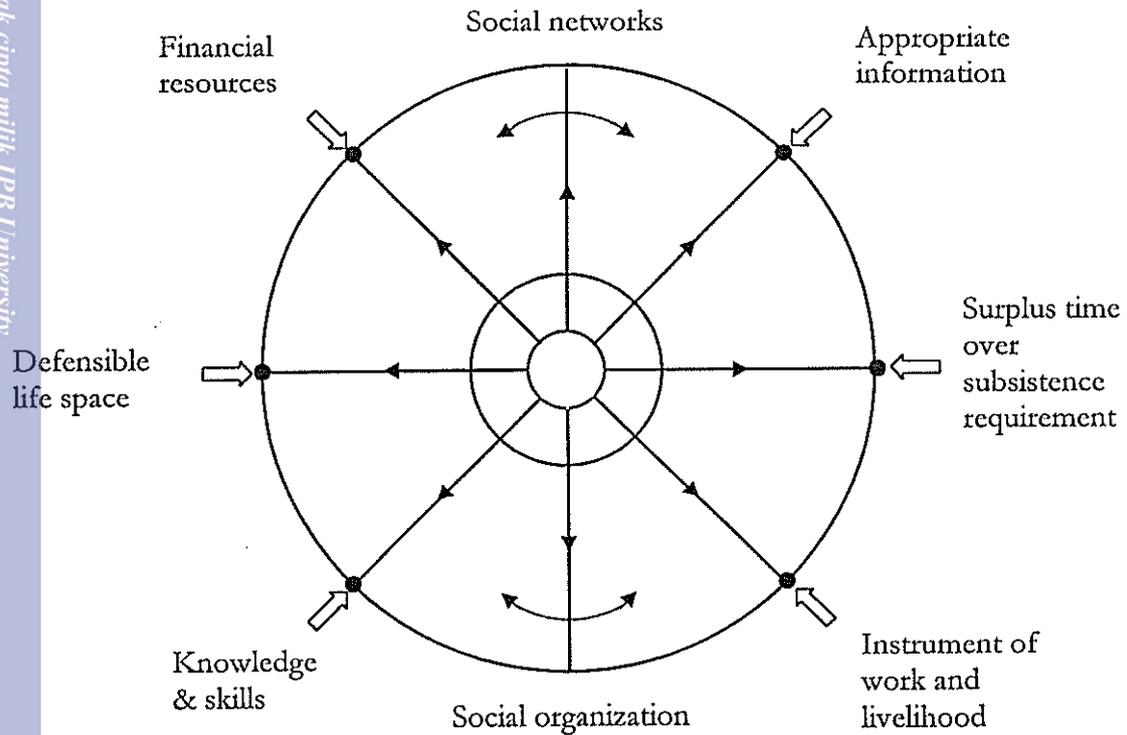


Sumber : Nurske dalam Sumodiningrat (1997)

@Hak cipta milik IPI University

IPB University

Lampiran 2. Model Ketidakberdayaan terhadap Kemiskinan (*The (dis) empowerment Model of Poverty*)



Keterangan :

- ⇒ : Tindakan
● : Ruang partisipasi dan negosiasi

Sumber : John Friedmann. EMPOWERMENT, The Politics of Alternative Development

Lampiran 3. Batas Miskin, Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin 1976-1996

Tahun	Kota			Desa			Desa+Kota	
	Batas Miskin (Rp/Kap/Bl)	Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	%	Batas Miskin (Rp/Kap/Bl)	Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	%	Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	%
1976	4.552	10,0	38,8	2.849	44,2	40,4	54,2	40,1
1978	4.969	8,3	30,8	2.981	38,9	33,4	47,2	33,3
1980	6.831	9,5	29,0	4.449	32,8	28,4	42,3	28,6
1981	9.777	9,3	28,1	5.877	31,3	26,5	40,6	26,9
1984	13.731	9,3	23,1	7.746	25,7	21,2	35,0	21,6
1987	17.381	9,7	20,1	10.294	20,3	16,4	30,0	17,4
1990	20.614	9,4	16,8	13.295	17,8	14,3	27,2	15,1
1993	27.905	8,7	13,4	18.244	17,2	13,8	25,9	13,7
1996	37.854	6,9	3,4	27.573	15,7	7,8	22,6	11,2

Sumber : Biro Pusat Statistik, Kemiskinan dan Pemerataan Pembangunan di Indonesia 1976-1990, dan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tingkat Nasional dan Propinsi 1994

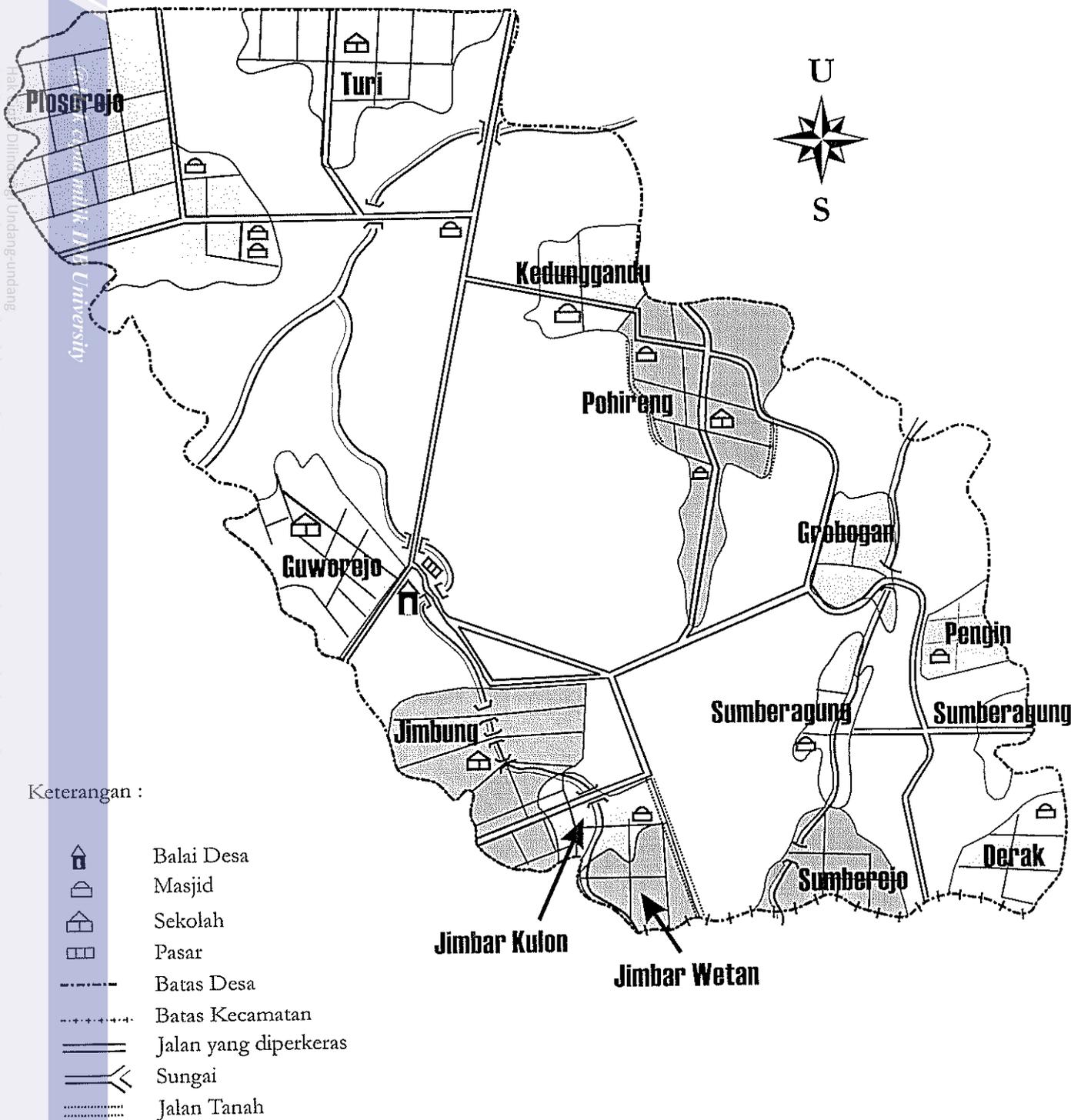
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 2. Peta Desa Guworejo



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 5. Pengalokasian Dana Bantuan PDM-DKE T.A. 1998/1999 di Desa Guworejo

Kelompok	Jumlah Dana (Rp)	
	Tahap I	Tahap II
RT 1	1.000.000,00	-
RT 2	850.000,00	150.000,00
RT 3	850.000,00	150.000,00
RT 4	850.000,00	150.000,00
RT 5	850.000,00	150.000,00
RT 6	850.000,00	150.000,00
RT 7	850.000,00	150.000,00
RT 8	850.000,00	150.000,00
RT 9	850.000,00	150.000,00
RT 10	1.000.000,00	-
RT 11	850.000,00	150.000,00
RT 12	1.000.000,00	-
RT 13	850.000,00	150.000,00
RT 14	1.000.000,00	-
RT 15	850.000,00	150.000,00
RT 16	850.000,00	150.000,00
RT 17	850.000,00	150.000,00
RT 18	1.000.000,00	-
RT 19	1.000.000,00	-
RT 20	1.000.000,00	-
RT 21	1.000.000,00	-
RT 22	1.000.000,00	-
RT 23	1.000.000,00	-
RT 24	850.000,00	150.000,00
RT 25	1.000.000,00	-
RT 26	850.000,00	150.000,00
RT 27	850.000,00	150.000,00
RT 28	1.000.000,00	-
RT 29	850.000,00	150.000,00
Ternak ayam	400.000,00	1.500.000,00
Candak kulak	106.558,00	556.382,00
Warungan	100.000,00	2.000.000,00
Bengkel	400.000,00	2.500.000,00
Penjahit	100.000,00	400.000,00
Emping	100.000,00	1.125.000,00
Tempe	150.000,00	1.500.000,00
Total	27.806.558,00	12.131.382,00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program PDM-DKE T.A. 1998/1999



Lampiran 6. Pemasukan dan Pengeluaran Dana Bantuan Program PDM-DKE T.A. 1998/1999 di Desa Guworejo

PENERIMAAN			PENGELUARAN		
Tgl	Uraian	Jumlah (Rp)	Tgl	Uraian	Jumlah (Rp)
5/2/99	Terima Dana BLM PDM-DKE dari BRI Unit Kroyo tahap I	29.881.558,00	5/8/99	Disalurkan untuk BLM tahap I	27.950.558,00
			5/2/99	Insentif/gaji FD	525.000,00
			5/2/99	Honor pengurus	500.000,00
			5/2/99	Pertemuan/pembinaan di tiap-tiap RT @ Rp 19.335,00 sebanyak 29 RT	560.650,00
			5/2/99	Foto copy blangko laporan	225.000,00
			5/2/99	Membeli alat-alat tulis, dll	114.350,00
5/3/99	Terima Dana BLM PDM-DKE dari BRI Unit Kroyo tahap II	12.806.382,00	5/3/99	Disalurkan untuk BLM tahap II	11.981.382,00
			5/3/99	Insentif/gaji FD	225.000,00
			5/3/99	Membeli kertas dan alat-alat tulis	111.150,00
			5/3/99	Membeli film dan cuci cetak	123.850,00
			5/3/99	Penutupan proyek	365.000,00
	TOTAL	42.687.940,00		TOTAL	42.687.940,00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan PDM-DKE T.A. 1998/1999

Lampiran 7. Daftar Penerima (Penerima Awal) Dana Bantuan Program PDM-DKE T.A. 1998/1999 dan Nilai Dana Bantuan yang Diterima

Kelompok	Nama	Status			Jumlah (Rp)	Nama	Status			Jumlah (Rp)	
		Pra KS	KS I	Pen gg			Pra KS	KS I	Pen gg		
RT 1 @Hak cipta milik IPPB University	Dalimim	o			100.000	Sutimin		o		100.000	
	Sutrisno	o			100.000	Parjo		o		100.000	
	Sugino	o			100.000	Suratmin		o		100.000	
	Sutiyono		o		100.000	Senen		o		100.000	
	Karmin		o		100.000	Supriyanto	o			100.000	
RT 2	Sri Sunarni	o			150.000	Wiji			o	150.000	
	Wagirah		o		100.000	Parto Suwilony	o			150.000	
	Painah		o		150.000	Darno		o		150.000	
	Pupon		o		150.000						
RT 3	Sutaryo	o			100.000	Saimin	o			100.000	
	Sastro	o			100.000	Darmo		o		100.000	
	Ibu Harjo		o		100.000	Ngadiah		o		100.000	
	Kardi		o		100.000	Aminah		o		50.000	
	Diro		o		100.000	Saiman		o		150.000	
RT 4	Suwarto	o			100.000	Samiyem		o		100.000	
	Sumini		o		100.000	Sarto		o		100.000	
	Maki		o		100.000	Parti	o			50.000	
	Sumarni	o			100.000	Ngadiman	o			100.000	
	Suparmi	o			100.000	Sumirah		o		50.000	
	Kardi	o			100.000						
RT 5	Saroso		o		100.000	Kasino		o		100.000	
	Lestari		o		100.000	Tugimin	o			100.000	
	Slamet		o		100.000	Midi		o		100.000	
	Martodikromo	o			100.000	Samin		o		50.000	
	Suhadi		o		100.000	Slamet		o		150.000	
RT 6	Karso	o			100.000	Sarino	o			100.000	
	Karyo	o			100.000	Wiryo		o		100.000	
	Marsini	o			100.000	Suwarti		o		100.000	
	Sunarti	o			100.000	Sastro		o		50.000	
	Sukini		o		100.000	Jooy		o		150.000	
RT 7	Sutar	o			100.000	Karjan		o		100.000	
	Sukamto		o		100.000	Karyo	o			100.000	
	Narto		o		100.000	Mariman	o			100.000	
	Ny. Sri S		o		100.000	Marto	o			50.000	
	Joyobejo	o			100.000	Wanto		o		150.000	
RT 8	Partodiyono	o			100.000	Wagiyo	o			100.000	
	Suparti		o		100.000	Tekad	o			100.000	
	Sugimin		o		100.000	Ngadiryo	o			100.000	
	Giman		o		100.000	Dinem		o		50.000	
	Sukiyani	o			100.000	Harto		o		50.000	
	Sadikromo	o			100.000						

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPPB University.

RT 9	Karyadi	o		100.000	Sumarno		o	100.000
	Gunawan	o		100.000	Nokromo		o	100.000
	Mbah Mul		o	100.000	Bambang	o		100.000
	Ngadiman		o	100.000	Parno	o		150.000
	Sali		o	100.000	Rebana	o		50.000
RT 10	Dariyo	o		100.000	Sumarni	o		100.000
	Arjo	o		100.000	Tukiyem		o	100.000
	Panikem		o	100.000	Waginem		o	100.000
	Daliyem		o	100.000	Situn		o	200.000
	Sukinah	o		100.000				
RT 11	Sumadi	o		100.000	Payogiyono		o	100.000
	Seno		o	100.000	Tun	o		100.000
	Mento		o	100.000	Mul	o		150.000
	Sadimin		o	100.000	Wagiman	o		150.000
	Suradi	o		100.000				
RT 12	Ngatmin		o	100.000	Sugimin	o		100.000
	Tugiyono	o		100.000	Kartodimejo		o	100.000
	Tardi	o		100.000	Paiyem		o	100.000
	Topik		o	100.000	Gimin		o	100.000
	Parmin	o		100.000	Joko Santoso	o		100.000
RT 13	Ribut K		o	100.000	Parjo		o	100.000
	Suprpto	o		100.000	Indras		o	100.000
	Warsito	o		100.000	Karno	o		150.000
	Hari	o		100.000	Wirodimejo	o		150.000
	Paiman	o		100.000				
RT 14	Lasiyem	o		100.000	Samsulhadi	o		100.000
	Suharno		o	100.000	Suwarni	o		100.000
	Ny. Marto		o	100.000	Suradi	o		100.000
	Paiman	o		100.000	Maryam		o	100.000
	Marijo		o	100.000	Sujad		o	100.000
RT 15	Paidin	o		100.000	Gimanto	o		100.000
	Suminem	o		100.000	Maridin	o		100.000
	Samiyo		o	100.000	Ny. Darso		o	100.000
	Tinah		o	100.000	Kartodikromo	o		50.000
	Kushadi		o	100.000	Giyono	o		150.000
RT 16	Paimin	o		100.000	Parno Sd		o	100.000
	Rebo	o		100.000	Sunaryo	o		100.000
	Suwono	o		100.000	Suhito	o		150.000
	Katno	o		100.000	Supodo	o		150.000
	Parmin	o		100.000				
RT 17	Mantono		o	100.000	Surahmad		o	100.000
	Daliyo	o		100.000	Wiryo Semito		o	100.000
	Sunarto		o	100.000	Sutris	o		150.000
	Kromomijo	o		100.000	Arjo	o		150.000
	Sarimo	o		100.000				
RT 18	Santo		o	100.000	Panem	o		100.000
	Wiyono		o	100.000	Sumiyem	o		100.000
	Rajinem		o	100.000	Darso	o		100.000
	Kasmi	o		100.000	Warso Sainem	o		100.000
	Nurhayati	o		100.000				100.000

RT 19	Kaliman Ari Miasih Supriyanto Tugino Kijan	o o o o	o	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	Supomo Kardi Ginah Giman Marni	o o o o	o	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
RT 20	Ny. Asih R Ny. Sarki Ny. Midin Ny. Kasmi Ny. Suniyem Ny. Riyem	o o o o o	o	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	Ny. Rasi Ny. Sanimi Ny. Sugi Ny. Sumi Ny. Harsini	o o o o	o	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
RT 21	Sugimin Darmo Kumis Radiyo Sukimin Wartono Wagino	o o o o o	o o	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	Sriyatun Sasmorejo Barjo Darmosemito Laso Mulyono	o o o o	o	100.000 100.000 100.000 50.000 50.000
RT 22	Suparmi Poniyem Daliyo Waloyo Katik	o o o o o	o o o o	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	Ngadimin Giyono Mariyo Sukimin Arjo Samin	o o o o o		100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
RT 23	Ny. Poni Ny. Suyatno Ny. Yadi Ny. Wardoyo Ny. Suwardi	o o o o o	o	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	Ny. Rohmadi Ny. Saminah Ny. Suginem Ny. Sukarmin Ny. Joko	o o o o o	o	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
RT 24	Supriyadi Marwan Rasmi Sadikromo	o o o o	o o	100.000 100.000 100.000 100.000	Ny. Parno Ny. Parmin Ny. Mulyadi Ny. Mariyem	o o o o	o	100.000 100.000 200.000 200.000
RT 25	Ny. Dadi Ny. Sugiyo Ny. Ngadino Ny. Suyoto Ny. Supardi	o o o o o	o	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	Ny. Padmo Ny. Sumardi Ny. Sutarno Ny. Sutiman Ny. Suyatno	o o o o	o o	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
RT 26	Ny. Tarno Ny. Sugino Ny. Pariyem Ny. Santo Ny. Giyanto	o o o o o	o o	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	Ny. Parno Ny. Sukinem Ny. Harjo Ny. Supriyo	o o o o	o o	100.000 100.000 50.000 150.000
RT 27	Suyitno Wiryosantoso Suparmin Sugito	o o o o	o o	200.000 200.000 100.000 100.000	Bandriyo Mulyono S. Hartono	o o o		100.000 100.000 100.000 100.000
RT 28	Trinoswati Darmi Sati Yatno Hartowiyono	o o o o o	o	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	Citro Warti Tukijo Pariyem Kartini	o o o o o	o o o	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

RT 29	Suwarni Sudadi Ramelan Sastrowiyono	o o	o o o	100.000 200.000 200.000 100.000	Ny. Sugini Parmin Karno	o o o			150.000 100.000 150.000
Candak kulak I	Kiyem	o		106.558					
Ternak ayam I	Kushadi		o	400.000					
Penjahit I	Rahayu		o	100.000					
Tempe I	Wardoyo		o	150.000					
Emping I	Darmosuharjo	o		100.000					
Bengkel I	Darso	o		400.000					
Warungan I	Sutini	o		100.000					
Candak kulak II	Sugiyem Padmi Ny. Tugiyono	o o	o o	105.000 105.000 136.382	Wahyem Ngadiyem	o o			105.000 105.000
Tempe II	Giyem Mariyo Wardoyo	o o o		250.000 250.000 250.000	Kamto Bejo Gini	o o	o o		250.000 250.000 250.000
Emping II	Suradi Sutinem Ny. Yati	o o	o o	225.000 225.000 225.000	Ny. Sukemi Karno E.S	o o			225.000 225.000 225.000
Bengkel II	Sukir Kamto Parman	o o o		500.000 500.000 500.000	Suparmin Sastro	o o	o		500.000 500.000 500.000
Ternak ayam II	Ny. Sugini Ngadikun	o o	o	500.000 500.000	Karno			o	500.000
Warungan II	Karto Suwito Gimin Supawiro Samin Sastro Wijoyo	o o o o	o o o	150.000 150.000 150.000 150.000 150.000	Martodikromo Karsiman Rochmadi Atmowijoyo	o o o	o o		150.000 150.000 150.000 150.000

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Program PDM-DKE T.A. 1998/1999



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University
 2. Di larang mengumumkan nama atau menggunakan logo IPB University atau seluruh atau sebagian unsur logo IPB University secara terbuka atau tertutup tanpa izin IPB University

Lampiran 8. Pendapatan Responden Tahun 1998 dan Tahun 2000

Res-pon-den	Pendapatan 1998		Suku bunga	Pendapatan 1998*		Jumlah 1998*	Pendapatan 2000			Jumlah 2000	Perubahan Total
	x1	x2		x1	x2		x1	x2	x3		
1	900.000,00	1.200.000,00	1,2656	1.139.062,50	1.518.750,00	2.657.812,50	1.500.000,00	0,0	2.400.000,00	3.900.000,00	1.242.187,50
2	0,00	3.720.000,00	1,2656	0,00	4.708.125,00	4.708.125,00	0,00	1.200.000,00	4.200.000,00	5.400.000,00	691.875,00
3	0,00	5.185.000,00	1,2656	0,00	6.562.265,63	6.562.265,63	0,00	3.650.000,00	4.320.000,00	7.970.000,00	1.407.734,38
4	800.000,00	4.140.000,00	1,2656	1.012.500,00	5.239.687,50	6.252.187,50	0,00	4.440.000,00	1.650.000,00	6.090.000,00	-162.187,50
5	2.160.000,00	480.000,00	1,2656	2.733.750,00	607.500,00	3.341.250,00	2.380.000,00	1.200.000,00	600.000,00	4.180.000,00	838.750,00
6	800.000,00	1.008.000,00	1,2656	1.012.500,00	1.275.750,00	2.288.250,00	1.000.000,00	0,00	1.008.000,00	2.008.000,00	-280.250,00
7	420.000,00	1.825.000,00	1,2656	531.562,50	2.309.765,63	2.841.328,13	588.000,00	0,00	1.825.000,00	2.413.000,00	-428.328,13
8	0,00	3.468.000,00	1,2656	0,00	4.389.187,50	4.389.187,50	0,00	1.860.000,00	4.368.000,00	6.228.000,00	1.838.812,50
9	605.000,00	1.680.000,00	1,2656	765.703,13	2.126.250,00	2.891.953,13	980.000,00	1.350.000,00	4.656.000,00	6.986.000,00	4.094.046,88
10	900.000,00	3.648.000,00	1,2656	1.139.062,50	4.617.000,00	5.756.062,50	1.050.000,00	4.860.000,00	240.000,00	6.150.000,00	393.937,50
11	864.000,00	1.440.000,00	1,2656	1.093.500,00	1.822.500,00	2.916.000,00	1.080.000,00	0,00	2.016.000,00	3.096.000,00	180.000,00
12	0,00	4.182.000,00	1,2656	0,00	5.292.843,75	5.292.843,75	0,00	5.490.000,00	624.000,00	6.114.000,00	821.156,25
13	0,00	1.500.000,00	1,2656	0,00	1.898.437,50	1.898.437,50	0,00	3.600.000,00	2.100.000,00	5.700.000,00	3.801.562,50
14	1.824.000,00	2.400.000,00	1,2656	2.308.500,00	3.037.500,00	5.346.000,00	1.200.000,00	5.520.000,00	1.628.000,00	8.348.000,00	3.002.000,00
15	0,00	3.984.000,00	1,2656	0,00	5.042.250,00	5.042.250,00	0,00	3.792.000,00	2.016.000,00	5.808.000,00	765.750,00
16	384.000,00	2.550.000,00	1,2656	486.000,00	3.227.343,75	3.713.343,75	560.000,00	360.000,00	1.825.000,00	2.745.000,00	-968.343,75
17	1.300.000,00	6.600.000,00	1,2656	1.645.312,50	8.353.125,00	9.998.437,50	300.000,00	4.800.000,00	12.000.000,00	6.300.000,00	-3.698.437,50
18	1.080.000,00	480.000,00	1,2656	1.366.875,00	607.500,00	1.974.375,00	588.000,00	1.140.000,00	540.000,00	2.268.000,00	293.625,00
19	0,00	4.238.000,00	1,2656	0,00	5.363.718,75	5.363.718,75	0,00	2.840.000,00	3.650.000,00	6.490.000,00	1.126.281,25
20	0,00	4.677.500,00	1,2656	0,00	5.919.960,94	5.919.960,94	0,00	4.000.000,00	1.825.000,00	5.825.000,00	-94.960,94
21	600.000,00	960.000,00	1,2656	759.375,00	1.215.000,00	1.974.375,00	600.000,00	0,00	960.000,00	1.560.000,00	-414.375,00
22	0,00	2.307.500,00	1,2656	0,00	2.920.429,69	2.920.429,69	0,00	292.000,00	3.650.000,00	3.942.000,00	1.021.570,31
23	15.000.000,00	10.800.000,00	1,2656	18.984.375,00	13.668.750,00	32.653.125,00	14.000.000,00	12.000.000,00	7.200.000,00	33.200.000,00	546.875,00
24	0,00	6.495.000,00	1,2656	0,00	8.220.234,38	8.220.234,38	0,00	8.220.000,00	1.825.000,00	10.045.000,00	1.824.765,63
25	700.000,00	3.285.000,00	1,2656	885.937,50	4.157.578,13	5.043.515,63	680.000,00	1.825.000,00	3.650.000,00	6.155.000,00	1.111.484,38
26	0	4.745.000,00	1,2656	0,00	6.005.390,63	6.005.390,63	0,00	2.190.000,00	5.475.000,00	7.665.000,00	1.659.609,38
27	0,00	6.570.000,00	1,2656	0,00	8.315.156,25	8.315.156,25	0,00	3.650.000,00	5.475.000,00	9.125.000,00	809.843,75
28	0,00	8.450.000,00	1,2656	0,00	10.694.531,25	10.694.531,25	0,00	6.000.000,00	5.475.000,00	11.475.000,00	780.468,75
29	1.776.000,00	480.000,00	1,2656	2.247.750,00	607.500,00	2.855.250,00	504.000,00	780.000,00	2.888.000,00	4.172.000,00	1.316.750,00
30	636.000,00	2.304.000,00	1,2656	804.937,50	2.916.000,00	3.720.937,50	854.000,00	2.880.000,00	144.000,00	3.878.000,00	157.062,50
Total	30.749.000,00	104.802.000,00	1,2656	3.8916.703,10	132.640.031,30	171.556.734,40	27.864.000,00	87.939.000,00	79.433.000,00	195.236.000,00	23.679.265,63

Sumber : Data primer, diolah

Lampiran 9. Hasil Pendugaan Persamaan Perubahan Pendapatan Usaha yang Didanai Program PDM-DKE

Regression Analysis

The regression equation is

$$Y = 948883 - 61617 x_1 + 231293 x_2 - 343078 x_3 + 139849 x_4 + 61327 x_5 + 4748 x_6 - 471038 x_7 + 2.65 x_8 + 565710 x_9 + 0.019 x_{10}$$

Predictor	Coef	StDev	T	P	VIF
Constant	948883	1779053	0.53	0.600	
x1	-61617	19547	-3.15	0.005	1.8
x2	231293	73080	3.16	0.005	1.8
x3	-343078	140910	-2.43	0.025	1.4
x4	139849	294676	0.47	0.640	1.6
x5	61327	34624	1.77	0.093	2.0
x6	4748	1367	3.47	0.003	1.6
x7	-471038	966996	-0.49	0.632	1.3
x8	2.646	1.545	1.71	0.103	1.4
x9	565710	427308	1.32	0.201	1.4
x10	0.0186	0.1933	0.10	0.924	1.4

S = 965834 R-Sq = 81.4% R-Sq(adj) = 71.6%

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	10	7.74683E+13	7.74683E+12	8.30	0.000
Error	19	1.77239E+13	9.32836E+11		
Total	29	9.51921E+13			

Source	DF	Seq SS
x1	1	2.78856E+13
x2	1	2.00174E+13
x3	1	4.26231E+12
x4	1	2.41980E+12
x5	1	55793879578
x6	1	1.60194E+13
x7	1	1.27495E+12
x8	1	3.79243E+12
x9	1	1.73187E+12
x10	1	8662140494

Durbin-Watson statistic = 2.01

Lampiran 10. Perkembangan Usaha yang Didanai Bantuan Program PDM-DKE

Respon den	Jenis usaha	Jumlah modal (Rp)		Jumlah tenaga kerja (Jiwa)		Jumlah output (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	Sbl	Ssd	Sebelum	Sesudah
1	Warung	2.000.000/th	2.250.000/th	2	2	300.000/mg	325.000/mg
2	Loper koran	100.000/hr	150.000/hr	1	1	105.000/mg	160.000/mg
3	Mie ayam	1.000.000/th	1.300.000/th	2	2	150.000/mg	160.000/mg
4	Usahatani	450.000/3bl	500.000/3bl	2	2	900.000/3bl	1.000.000/3bl
5	Emping melinjo	50.000/hr	55.000/hr	3	3	52.000/hr	60.000/hr
6	Konsumsi	-	-	-	-	-	-
7	Warung nasi	120.000/hr	160.000/hr	1	2	130.000/hr	140.000/hr
8	Beli becak	-	235.000/th	1	1	-	13.000/hr
9	Kedelai goreng	500.000/mg	520.000/mg	2	2	225.000/mg	240.000/hr
10	Ternak ayam	1.500.000/th	1.780.000/th	1	2	-	-
11	Jual sayur	100.000/hr	110.000/hr	1	1	105.000/hr	120.000/hr
12	Candak kulak	450.000/mg	600.000/mg	1	1	550.000/mg	650.000/hr
13	Salon	2.400.000/th	2.550.000/th	1	1	75.000/mg	100.000/mg
14	Usahatani	2.150.000/th	2.400.000/th	2	2	2.650.000/th	3.000.000/th
15	Bengkel	50.000/hr	75.000/hr	1	1	51.000/hr	77.000/hr
16	Jual bakso	60.000/hr	65.000/hr	1	1	65.000/hr	67.000/hr
17	Ternak ayam	500.000/th	600.000/th	1	1	100.000/bl	120.000/bl
18	Ternak ayam	-	200.000/th	1	1	-	-
19	Usaha tempe	400.000/mg	500.000/mg	4	4	560.000/mg	620.000/mg
20	Usaha tempe	500.000/mg	580.000/mg	3	3	580.000/mg	690.000/mg
21	Dagang beras	450.000/mg	480.000/mg	1	1	490.000/mg	525.000/mg
22	Bengkel	3.000.000/th	3.750.000/th	3	3	200.000/mg	242.000/mg
23	Penjahit	1.800.000/th	2.000.000/th	1	1	250.000/mg	270.000/mg
24	Jual sayur	100.000/hr	130.000/hr	1	1	100.000/mg	145.000/mg
25	Jamu gendong	10.000/hr	13.500/hr	1	1	25.000/hr	28.000/ml
26	Bengkel	1.000.000/th	2.300.000/th	1	2	10.000/hr	15.000/hr
27	Bengkel	2.500.000/th	3.000.000/th	1	1	45.000/hr	52.000/hr
28	Penjahit	960.000/th	1.000.000/th	1	1	145.000/hr	160.000/hr
29	Beli becak	-	250.000/th	1	1	-	40.000/hr
30	Ternak ayam	-	150.000/th	1	1	-	225.000/hr

Sumber : Data primer, diolah

Lampiran 11. Karakteristik Responden

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (th)	Pendidikan	Jumlah Tanggungan (orang)	Pekerjaan utama	Penggunaan bantuan	Pengalaman berusaha	Motivasi menjadi anggota Pokmas	Jumlah bantuan (Rp)	Pendapatan (Rp/th)
1	Ibu Hartono	P	43	SD	4	Tani	Warung	18	Tambah modal	100.000	3.900.000
2	Bp. Hariyanto	L	30	SMP	6	Dagang	Loper koran	13	Tambah modal	100.000	5.400.000
3	Bp. Rebo	L	45	SD	6	Buruh non pertanian	Mic ayam	12	Tambah modal	200.000	7.970.000
4	Bp. Maksum	L	75	SD (TL)	2	Tani	Pupuk	31	Tambah modal	150.000	6.090.000
5	Ibu Kasi	P	40	SD	6	Buruh tani	Emping mclinjo	6	Tambah modal	300.000	4.180.000
6	Bp. Sukiman	L	53	SD	6	Buruh tani	Beli genteng	0	Konsumsi	300.000	2.008.000
7	Ibu Salimin	P	45	SD	3	Dagang	Warung nasi	7	Tambah modal	100.000	2.413.000
8	Bp. Sugito	L	37	SD	5	Buruh non pertanian	Beli becak	1	Usaha baru	700.000	6.228.000
9	Bp. Warsito	L	33	D2	3	Pegawai dan jasa	Kedelai goreng	3	Tambah modal	200.000	6.986.000
10	Bp. Sasmopawiro	L	52	SD	5	Pegawai dan jasa	Ternak ayam	5	Tambah modal	200.000	6.150.000
11	Ibu Harsini	P	34	SD (TL)	3	Buruh tani	Jual sayur	6	Tambah modal	200.000	3.096.000
12	Bp. Rebo	L	40	SD	3	Buruh non pertanian	Candak kulak	2	Tambah modal	100.000	6.114.000
13	Ibu Nur	P	29	SMA	2	Pegawai dan jasa	Salon	4	Tambah modal	200.000	5.700.000
14	Ibu Wagini	P	40	SD (TL)	3	Tani	Pupuk	20	Tambah modal	100.000	8.348.000
15	Bp. Ramelan	L	50	SD (TL)	5	Pegawai dan jasa	Bengkel	11	Tambah modal	250.000	5.808.000
16	Bp. Suradi	L	47	SD (TL)	5	Dagang	Jual bakso	5	Tambah modal	300.000	2.745.000
17	Bp. Suparman	L	37	D2	3	Pegawai dan jasa	Ternak ayam	4	Tambah modal	200.000	6.300.000
18	Bp. Saim	L	65	SD (TL)	4	Pegawai dan jasa	Ternak ayam	1	Usaha baru	100.000	2.268.000
19	Bp. Wardoyo	L	48	SD	3	Buruh non pertanian	Usaha tempe	10	Tambah modal	200000	6.490.000
20	Ibu Paini	P	44	SD (TL)	2	Industri	Usaha tempe	9	Tambah modal	200.000	5.825.000
21	Ibu Saminah	P	65	-	2	Dagang	Dagang beras	25	Tambah modal	200.000	1.560.000
22	Bp. Yadi	L	38	SD	4	Pegawai dan jasa	Bengkel	7	Tambah modal	200.000	3.942.000
23	Ibu Bambang	P	73	SMA	6	Tani	Penjahit	7	Tambah modal	250.000	33.200.000
24	Ibu Kaliman	P	46	SD (TL)	4	Dagang	Jual sayur	16	Tambah modal	200.000	10.045.000
25	Ibu Pani	P	40	SD (TL)	3	Tani	Jamu gendong	12	Tambah modal	200.000	6.155.000
26	Bp. Sutardi	L	32	SMP (TL)	4	Pegawai dan jasa	Bengkel	7	Tambah modal	200.000	7.665.000
27	Bp. Parmin	L	38	SD	3	Pegawai dan jasa	Bengkel	12	Tambah modal	600.000	9.125.000
28	Ibu Suwarni	P	27	SD	3	Pegawai dan jasa	Penjahit	6	Tambah modal	200.000	11.475.000
29	Bp. Supardi	L	35	SD	4	Buruh non pertanian	Beli becak	1	Usaha baru	750.000	4.172.000
30	Bp. Lasmo	L	50	SD (TL)	3	Buruh tani	Ternak ayam	1	Usaha baru	475.000	3.878.000

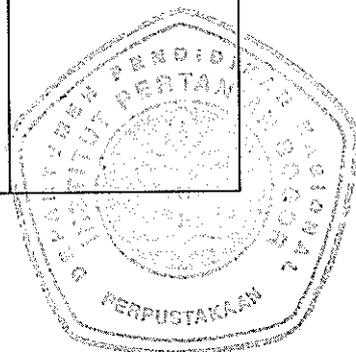
Sumber : Data primer, diolah



Lampiran 12. Karakteristik Keluarga Sejahtera

Pra'S	KS I	KS II	KS III	KS III Plus
<ul style="list-style-type: none"> ◊ Belum bisa melakukan ibadah ◊ Belum bisa memenuhi makan 2x sehari ◊ Belum ada pakaian yang berbeda-beda (kerja, sekolah, bepergian) ◊ Sebagian besar lantai rumah masih tanah ◊ Belum bisa melakukan jasa kesehatan dan KB 	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga ◊ Pada umumnya anggota keluarga makan 2x sehari atau lebih ◊ Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian ◊ Bagian terluas dari rumah bukan lantai tanah ◊ Bila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Semua kriteria KS I ◊ Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur ◊ Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur ◊ Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian baru per tahun ◊ Luas lantai rumah paling kurang 8m² untuk tiap penghuni rumah ◊ Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat ◊ Paling kurang satu anggota keluarga di atas 15 tahun ke atas berpenghasilan tetap ◊ Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa baca tulis huruf latin ◊ Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini ◊ Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil) 	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Semua kriteria KS II ◊ Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama ◊ Sebagian dari penghasilam dapat disisihkan untuk tabungan keluarga ◊ Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga ◊ Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya ◊ Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang 1x/6 bulan ◊ Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah ◊ Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai dengan kondisi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Semua kriteria KS III ◊ Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil ◊ Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat

Sumber : BKKBN, 1996



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University

Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.